



JOURNAL OF
POLITICAL ISSUES

JOURNAL OF POLITICAL ISSUES

VOLUME	NOMOR	TAHUN	HALAMAN	ISSN
4	1	Juli 2022	01-61	2785-7766

Hirarki Pengaruh Pada Talkshow Kick Andy Double Check Metro TV Program Guiteeres Pahlawan
pp. 01-09

(Arif Rasyidi; Hendra Eka Syahputra; Sri Suparni)

Politik Air Bersih di Desa Sukaringin
pp. 10-19

(Restu Rahmawati; Firman Firman)

Kekuatan Dinasti Politik Aang Hamid Suganda Di Kabupaten Kuningan
pp.19-28

(Dina Fadiyah; Rahmi Kania Dewi; Ayi Karyana)

Pemilu dan COVID-19 di Indonesia: Partisipasi Pemilih dalam Pilkada Serentak 2020

pp. 29-41

(Samsul Ode; Benediktus Dalupe; Surya Yudha Regif; Dejehave Al Jannah)

Impacts of Covid-19 on Migrants and Refugees

pp. 42-49

(Subhash Kumar Baitha; Rinkal Tyagi; Souvik Chatterjee)

Rekonsiliasi Politik Pasca Pilpres 2019: Menumbuhkan Semangat Kebangsaan dalam Konstruksi Sosial Budaya

50-61

(Agam Primadi, David Efendi, dan Sahirin)

JURUSAN ILMU POLITIK

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG

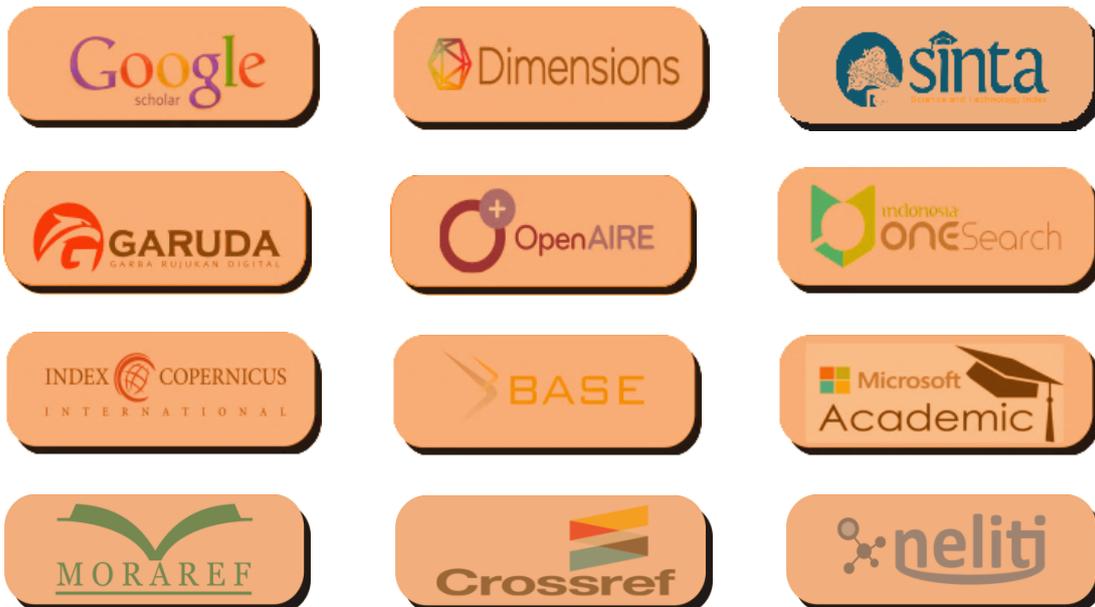
CALL FOR PAPER:

Journal of Political Issues (JPI) menerima naskah hasil penelitian, kajian maupun pemikiran kritis mengenai isu-isu dalam lingkup bidang politik yang orisinal dan belum pernah dimuat/dipublikasi di jurnal maupun majalah lain. Naskah diketik dengan menggunakan Ms Word menggunakan Bahasa Indonesia dengan ketentuan spasi tunggal huruf *Times New Romans*, ukuran kertas A-4, dan banyak kata berjumlah 4.500-6.000 kata atau 8-15 halaman. Naskah di *submit online* melalui laman <https://jpi.ubb.ac.id/index.php/JPI>, serta dilengkapi dengan keaslian Naskah dan daftar riwayat hidup penulis. Redaksi JPI berhak melakukan penilaian dan penyuntingan terhadap naskah yang masuk. Naskah yang lolos seleksi oleh redaksi, akan di *review* oleh Mitra Bestari (*Reviewer*). Petunjuk penulisan selengkapnya dapat dilihat di <https://jpi.ubb.ac.id/index.php/JPI>

Sub tema naskah meliputi:

- Demokrasi
- Desentralisasi
- Partai Politik
- Kebijakan Publik
- Pemilu
- Keamanan dan Politik Internasional
- Gerakan Sosial
- Gender dan Politik Identitas
- Kesejahteraan Sosial
- Masyarakat dan Manajemen Publik

JOURNAL OF POLITICAL ISSUES SUDAH TERINDEKS DI:



Volume 4 Nomor 1, Juli 2022

Journal of Political Issues diterbitkan pertama kali pada bulan Juli 2019 dan saat ini secara konsisten diterbitkan sebanyak 2 kali dalam setahun setiap Juli dan Desember oleh Jurusan Ilmu Politik Universitas Bangka Belitung.

Pengarah:

Kepala Jurusan Ilmu Politik, Universitas Bangka Belitung

Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab (*Editor in Chief*):

Ranto, M.A.

Redaktur (*Managing Editor*):

Komang Jaka Ferdian, M.Si.

Penyunting (*Section Editor*):

Bahjatul Murtasidin, M.Si.

Sandy Pratama, M.Si.

Rendy, M.A.

La Ode Muhamad Muliawan, M.A.

Amir Syamsuadi, M.Si.

Restu Karlina Rahayu, S.IP., M.Si

Dewan Editor (*Editorial Board*)

Dr. H. S. Tisnanta, M.H.

Dr. Yusa Djuyandi, M.Si.

Dr. Oki Hajiansyah Wahab, M.H.

Copy Editor & Lay Out Editor:

Agun Sutrisno, A.md.

Mitra Bestari (*Reviewer*):

Prof. Syarif Hidayat (Ilmu Politik, Universitas Nasional, Jakarta)

Leo Agustino, M.Si., Ph.D. (Administrasi Publik, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Banten)

Luthfi Makhasin, M.Si., Ph.D. (Ilmu Politik, Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto)

Agung Wibowo, M.Si. Ph.D. (Jurusan Kehutanan, Universitas Palangkaraya, Palangkaraya)

Dr. Ibrahim, M.Si. (Ilmu Politik, Universitas Bangka Belitung, Kepulauan Bangka Belitung)

Dr. Ratnia Solihah, M.Si. (Ilmu Politik, Universitas Padjadjaran, Bandung)

Dr. Sulistya Ekwati, M.Si. (Puslitbang Sosial Ekonomi KLHK, Jakarta)

Dr. Yusnarida Eka Nizmi, M.Si. (Hubungan Internasional, Universitas Riau, Riau)

Dr. Pahrudin HM, M.A. (Ilmu Pemerintahan, STISIP Nurdin Hamzah, Jambi)

Dr. Ardli Johan Kusuma, M.H.I. (Hubungan Internasional, Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta)

Dodi Faedlulloh, M.Si. (Administrasi Publik, Universitas Lampung, Lampung)

Restu Rahmawati, M.A. (Ilmu Politik, Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta)

Alamat:

Jurusan Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Bangka Belitung
Jl. Kampus Terpadu UBB, Desa Balunijuk, Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan
Bangka Belitung, Kode Pos: 33172, Indonesia

Email: jpi@ubb.ac.id

Url: <https://jpi.ubb.ac.id/index.php/JPI>

e-ISSN: 2685-7766

Daftar Isi

Hirarki Pengaruh Pada Talkshow Kick Andy Double Check Metro TV Program Guiteeres Pahlawan (Arif Rasyidi, Hendra Eka Syahputra, Sri Suparni) https://doi.org/10.33019/jpi.v4i1.75	01-09
Politik Air Bersih di Desa Sukaringin (Restu Rahmawati, Firman Firman) https://doi.org/10.33019/jpi.v4i1.80	10-18
Kekuatan Dinasti Politik Aang Hamid Suganda Di Kabupaten Kuningan (Dina Fadiyah, Rahmi Kania Dewi, Ayi Karyana) https://doi.org/10.33019/jpi.v4i1.77	19-28
Pemilu dan COVID-19 di Indonesia: Partisipasi Pemilih dalam Pilkada Serentak 2020 (Samsul Ode, Benediktus Dalupe, Surya Yudha Regif, Dejehave Al Jannah) https://doi.org/10.33019/jpi.v4i1.74	29-41
Impacts of Covid-19 on Migrants and Refugees (Subhash Kumar Baitha, Rinkal Tyagi, Souvik Chatterjee) https://doi.org/10.33019/jpi.v4i1.76	42-49
Rekonsiliasi Politik Pasca Pilpres 2019: Menumbuhkan Semangat Kebangsaan dalam Konstruksi Sosial Budaya (Jerry Indrawan, Anwar Ilmar, Ardli Johan Kusuma) https://doi.org/10.33019/jpi.v4i1.78	50-61

Salam Redaksi

Salam Hangat. . .

Tiada kata yang dapat mewakili kegembiraan kami saat menyampaikan edisi pertama *Journal of Political Issues*. *Journal of Political Issues* kini hadir kembali dengan terbitan terbaru Volume 4 Nomor 1 Juli 2022 yang terbit sesuai dengan jadwal yang ditargetkan. Melalui proses *Open Journal System*, secara tidak langsung dapat kita sadari bahwa peran dari teknologi dapat membantu kita dalam berbagai macam hal, terutama dalam mengelola jurnal secara elektronik.

Terbitan Januari, Volume 4 Nomor 1 kali ini memuat enam artikel berbobot dan menarik yang dikontribusikan oleh para penulis dari berbagai instansi baik di Indonesia. Berbagai macam tema dalam bidang politik dalam edisi ini akan membawa pembaca untuk lebih dekat dengan dunia sains dalam bidang Politik. Artikel pertama ditulis oleh Arif Rasyidi, Hendra Eka Syahputra, dan Sri Suparni mengeksplorasi mekanisme kebijakan yang diterapkan dari pimpinan redaksi sampai dengan berita tersebut ditayangkan sangat memenuhi unsur-unsur yang disampaikan dimulai dari lingkaran paling kecil pada level individu pelaku media, praktik rutinitas, organisasi media, extramedia, sampai dengan level ideologi pada Talkshow “Kick ANDY DOUBLE CHECK” METRO TV. Artikel kedua ditulis oleh Restu Rahmawati dan Firman Firman yang menggambarkan politik pengelolaan air bersih sebuah tinjauan atas langkanya kualitas air bersih di Kampung Kedungringin Kecamatan Sukawangi Kabupaten Bekasi.

Artikel ketiga ditulis oleh Dina Fadiyah, Rahmi Kania Dewi dan Ayi Karyana menjelaskan tentang Kekuatan Dinasti Politik Aang Hamid Suganda di Kabupaten Kuningan. Penelitian ini didasari oleh dinasti politik yang masih eksis di era demokrasi, padahal demokrasi sendiri menyebutkan bahwa dinasti politik itu sistem yang buruk dan bertolakbelakang dengan demokrasi. Artikel keempat ditulis oleh Samsul Ode, Benediktus Dalupe, Surya Yudha Regif dan Dejhawe Al Jannah yang menunjukkan gagalnya tesis linearitas partisipasi yang tinggi dengan tingkat kualitas demokrasi. Model perilaku pemilih juga gagal menjelaskan mengapa di saat kondisi ekonomi memburuk akibat pandemi, antusiasme pemilih justru meningkat.

Artikel kelima ditulis oleh Subhash Kumar Baitha, Rinkal Tyagi, Souvik Chatterjee yang menjelaskan terkait dengan upaya untuk memahami tantangan yang dihadapi oleh pengungsi dan migran selama Covid-19 dan upaya global apa saja yang telah dilakukan untuk memitigasi dampak pandemi terhadap kehidupan pengungsi dan migran. Artikel keenam ditulis oleh Jerry Indrawan, Anwar Ilmar, dan Ardli Johan Kusuma yang membahas tentang rekonsiliasi politik sebaiknya dilakukan untuk mempersatukan kembali pihak-pihak yang bertikai pasca Pilpres 2019. Rekonsiliasi yang dilakukan ini pada akhirnya harus dapat menumbuhkan semangat kebangsaan dalam konstruksi sosial budaya.

Akhirnya, *Journal of Political Issues* mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada tim pengelola edisi *Journal of Political Issues* Volume 4 Nomor 1 Juli 2022 serta kepada mitra bestari (*Reviewer*) yang berperan aktif membantu penerbitan jurnal ini. *Journal of Political Issues* tidak akan pernah berhenti untuk mengedepankan kualitas artikel yang diterbitkan dan terus berusaha secara konsisten untuk mempersiapkan dan mempersembahkan pengetahuan baru dalam lingkup Politik. Kami berharap artikel-artikel tersebut akan memberikan manfaat bagi para pembaca dalam menambah wawasan. Kami juga mengajak para pembaca berkontribusi untuk berbagi ilmu dan bidang keahliannya

untuk menuliskan karya ilmiah dalam bentuk jurnal di edisi Journal of Political Issues Volume 4 Nomor 1 Juli 2022 yang akan terbit sesuai dengan target terbitan. Terima Kasih.

Selamat membaca,
Salam Publikasi!



Hirarki Pengaruh Pada Talkshow Kick Andy Double Check Metro TV Program Guiteeres Pahlawan

Arif Rasyidi¹, Hendra Eka Syahputra¹; Sri Suparni¹

¹ Jurusan Komunikasi Politik, Universitas Paramadina, 12790, Jakarta-Indonesia

Info Artikel

Dikirim: Apr 04, 2022

Diterima: Jul 15, 2022

Dipublikasi: Jul 31, 2022

Kata Kunci:

Program TV; Pelanggaran HAM; Media;

Koresponden:

Arif Rasyidi

Jurusan Komunikasi Politik,
Universitas Paramadina

Email:

arif.rasyidi@students.paramadina.ac.id

Sitasi Cantuman:

Rasyidi, A., Syahputra, H. E., Suparni, S. (2022). Hirarki Pengaruh Pada Talkshow "Kick Andy Double Check" Metro TV Program Guiteeres Pahlawan/Pelanggar HAM. *Journal of Political Issues*. 4(1); 1-9. <https://doi.org/10.33019/jpi.v4i1.75>



DOI:

<https://doi.org/10.33019/jpi.v4i1.75>

Lisensi:



Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC- BY-NC-SA 4.0)



ABSTRAK

Abstract The purpose of this study was to determine the mechanism of the policy that is applied from the leadership of the editor to the news aired very meet the elements presented starting from the smallest circle at the level of the individual perpetrators of the media, the practice of routine, media organizations, extra media, up to the level of ideology on the talk show "Kick ANDY DOUBLE CHECK" METRO TV. This research uses a qualitative research method with a descriptive analysis approach and purposive sampling technique, with unstructured interviews (unstructured interview) free interviews. The results showed that the influence of the ownership of the media content media is very influential. The same is true with the case study program Kick Andy Metro TV. It is clear how the levels of the factors described how the hierarchy of the influence of the hierarchy in making the policy editor on the television station Metro TV. From the orientation of the personal media workers, the professionalism, the company's policy, the company's ownership pattern, the economic environment, the advertisers to influence - the influence of ideology. So, the five factors described earlier are very influential on the content of media that is delivered.

Abstrak Tujuan riset ini bertujuan mengetahui mekanisme kebijakan yang diterapkan dari pimpinan redaksi sampai dengan berita tersebut ditayangkan sangat memenuhi unsur-unsur yang disampaikan dimulai dari lingkaran paling kecil pada level individu pelaku media, praktik rutinitas, organisasi media, extramedia, sampai dengan level ideologi pada Talkshow "Kick ANDY DOUBLE CHECK" METRO TV. Metode riset ini menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan analisis deskriptif dan menggunakan teknik purposive sampling, dengan wawancara tak terstruktur yang mana berupa wawancara yang bebas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaruh kepemilikan sebuah media terhadap konten media sangat berpengaruh sama halnya dengan studi kasus program Kick Andy di Metro TV. Sudah jelas bagaimana level-level faktor menggambarkan bagaimana hirarki pengaruh hirarki dalam membuat kebijakan redaksi pada stasiun televisi Metro TV. Dari orientasi personal para pekerja media, profesionalisme, kebijakan perusahaan, pola kepemilikan perusahaan, lingkungan ekonomi, pengiklan sampai dengan pengaruh-pengaruh ideologi. Jadi dari kelima faktor-faktor yang sudah dijelaskan sebelumnya sangat berpengaruh terhadap isi media yang disampaikan.

Tentang:

Arif Rasyidi menyelesaikan Studi Sarjana Jurusan Ilmu Komunikasi di Universitas Wanita Internasional pada tahun 2018. Saat ini penulis sedang melanjutkan studi S-2 di Pasca Sarjana Magister Komunikasi Politik Universitas Paramadina Jakarta.

Hendra Eka Syahputra menyelesaikan Studi Sarjana di Jurusan Teknik Sipil Universitas Kahuripan Kediri pada tahun 2020. Saat ini penulis sedang melanjutkan studi S-2 di Pasca Sarjana Magister Komunikasi Politik Universitas Paramadina Jakarta.

Sri Suparni menyelesaikan Studi Sarjana Jurusan Administrasi Negara Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA Al Amin Sorong) pada tahun 2004. Saat ini penulis sedang melanjutkan studi S-2 di Pasca Sarjana Magister Komunikasi Politik Universitas Paramadina Jakarta.

PENDAHULUAN

Pers Indonesia memasuki babak baru yang ditandai dengan keterbukanya pintu kebebasan pers pasca era reformasi bergulir. Pada Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) Tahun 1945 yang telah diamandemen, nilai-nilai kebebasan pers diatur didalam Pasal 28E Ayat (2) dan (3) serta Pasal 28F. Pengejawantahan dari Pasal 28 UUD 1945 adalah dengan terbitnya Undang-undang (UU) No. 40 Tahun 1999 terkait Pers. Pers terdiri dari media cetak, media elektronik dan lainnya yang mana sebagai sarana teruntuk mengeluarkan pikiran secara tulisan dan lisan. Perihal ini menandakan bahwa negara sudah mengakui kebebasan dalam mengemukakan pendapat dan kebebasan berpikir yang mana bagian dari perwujudan negara yang demokratis dan berdasar atas hukum.

Pada era reformasi ini, tak ada objek, instansi pemerintah, pejabat Negara atau Presiden sekali pun, yang tak sanggup disentil, disentuh dan dikecam oleh pers. Seiring dengan berjalannya kebebasan pers, kemudian memunculkan kebijakan pemberitaan yang agresif dan kritis, khususnya berhubungan dengan hak-hak asasi manusia ([Lesmana, 2015](#)). Tiap pers atau bisa disebut media massa seperti media cetak, elektronik, ataupun lainnya, berlomba-lomba menghadirkan berita atau laporan yang sebelumnya dianggap memiliki resiko tinggi yang dikarenakan bisa mengganggu stabilitas politik untuk diberikan pada masyarakat. Media massa mengakomodir masyarakat yang seolah haus akan berbagai berita yang berani bersikap kritis pada pemerintah beserta kebijakannya ([Gani, 2005](#)). Berdasarkan uraian tersebut maka eksistensi media massa, salah satunya ialah televisi yang mana media massa yang sangat populer, menjadi sumber informasi yang dominan bagi masyarakat ([Khoirun Nida, 2015](#)).

Pers atau media massa sering dikatakan sebagai the fourth estate atau pilar kekuasaan keempat dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan politik. Teori pers libertarian mengungkapkan bahwa media massa sebagai pilar kekuasaan keempat ada di posisi tertinggi. Media massa jadi watchdog dari kekuasaan eksekutif, legislatif ataupun yudikatif. Media massa juga melakukan pengawasan roda kehidupan masyarakat secara keseluruhan ([Laksono, 2020](#)). Perihal ini dikarenakan media massa memiliki peran sebagai suatu institusi yang membentuk opini publik bisa jadi penekanan ide, gagasan, serta citra maka mampu merepresentasikan pada konteks yang lebih empiris ([Drianus, 2018](#)). Media massa yang representatif dalam merefleksikan sebuah realitas sosial menjadikan kehadirannya sebagai suatu kekuatan penyeimbang. Kemudian, karakterisasi media massa juga sebagai alat dalam komunikasi massa, menjadikannya salah satu instrumen penting dalam civil society yang memiliki keistimewaan tertentu, yaitu hak kritik dan kontrol sosial ([Poti, 2018](#)). Tentunya dengan mengedepankan tanggung jawab sosial dan independensinya dalam memproses sebuah pemberitaan.

Berkaitan dengan proses sebuah pemberitaan, isi media massa tidak luput dari dampak internal dan eksternal yang disebut Teori Hirarki Pengaruh Media yang diperkenalkan Pamela J. Shoemaker dan Stephen D. Reese didalam esainya yang berjudul A Media Sociology for the Networked Public Sphere: The Hierarchy of Influences Model. Asumsi dasar teori dalam komunikasi massa ini ialah teori mengenai isi media (media content) dan berbagai faktor dampak yang membentuknya. Didalam teori tersebut, Shoemaker dan Reese menjabarkan dampak pada isi pemberitaan media yang dibagikan pada beberapa level, yakni individu pekerja media (individual level), rutinitas media (media routines level), organisasi media (organizational level), luar media (extremedia level), dan ideologi (ideology level). Teori tersebut menerangkan terkait isi media yang diberikan ke masyarakat adalah hasil pengaruh kebijakan internal organisasi media dan eksternal. Pengaruh internal pada isi media berkaitan dengan kepentingan pemilik media, pandangan

Arif Rasyidi, Sri Suparni, Hendra Eka Syahputra:

Hirarki Pengaruh Pada Talkshow “Kick Andy Double Check” Metro TV Program Guiteeres
Pahlawan/Pelanggar HAM

subjektif individu wartawan selaku pencari berita, serta rutinitas organisasi media. Lalu faktor eksternal media berhubungan dengan individu-individu yang berpengaruh secara sosial, ekonomi, dan politik. Bisa dikatakan, pada dasarnya konten media yakni hasil tekanan dari luar dan dalam organisasi media (Reese & Shoemaker, 2018)

Keberhasilan pada media televisi dilihat dari adanya berbagai program yang dihasilkan stasiun televisi tersebut. Setiap televisi memiliki ciri khas dan program unggulan masing-masing sesuai dengan tujuan pemilikinya. Seperti halnya Metro TV salah satu stasiun televisi yang berfokus pada penyebaran informasi dan berita. Selain itu di Metro TV memiliki program unggulan yaitu talkshow “Kick Andy Double Check”, talkshow ini terkenal dengan berani dan kritis dalam menyajikan isu sosial, politik, kesehatan, pendidikan, dan kemasyarakatan lainnya. Hal tersebut tentu tidak terlepas dari peranan sang pemandu acara, yaitu Andy F. Noya. Salah satu episode yang menggelitik banyak pihak adalah episode “Guterres, Pahlawan Atau Pelanggar HAM?” yang ditayangkan pada hari Minggu 12 September 2021 pukul 19.05 WIB. Di episode Kick Andy Double Check tersebut, Andy F Noya mengundang tokoh yang sedang menjadi polemik dan pergunjungan masyarakat, soal penghargaan yang diberikan oleh Presiden Jokowi kepada Eurico Guterres yang dianggap tidak layak untuk diberikan kepada tokoh tersebut. Adapun isu – isu yang dibahas dalam Kick Andy Double Check, adalah profil Eurico Guterres, kontroversi penghargaan yang diberikan oleh Presiden, isu sensitif kasus pelanggaran HAM yang dilakukan Eurico Guterres, serta soal berbagai pihak yang ingin menggugat dan mencabut penghargaan yang diberikan oleh Presiden kepadanya. Oleh sebab itu, ini sangat menarik teruntuk diteliti secara lanjut, sehingga peneliti mempergunakan teori Hirarki Pengaruh Media Shoemaker dan Reese dalam hal ini.

METODE PENELITIAN

Metode riset mempergunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan analisis deskriptif dan menggunakan teknik purposive sampling. Data-data yang dikumpulkan pada riset ini berbentuk kata-kata, yang didapatkan dari studi pustaka, wawancara, dan pengumpulan dokumen. Adapun pada riset ini, peneliti melaksanakan pengumpulan data lewat data sekunder dan data primer. Di riset ini, peneliti memilih menggunakan wawancara tak terstruktur (unstructured interview) yang mana wawancara yang bebas. Peneliti dalam pengumpulan datanya tak mempergunakan tata cara pedoman wawancara yang sudah tersusun sistematis dan lengkap. Penggunaan pedoman wawancara hanya berupa garis besar persoalan yang dirancang untuk memunculkan sudut pandang dan pendapat opini yang diperoleh dari para informan (Sugiyono, 2017; Cresswell, 2016).

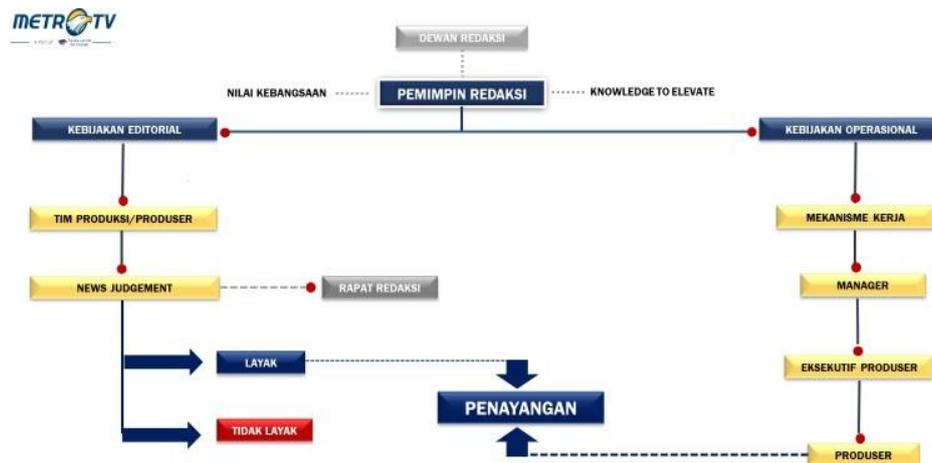
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Media massa mempunyai peran sebagai sebuah institusi yang membentuk opini publik dan mampu merefleksikan sebuah realitas sosial, sehingga menjadikan kehadirannya menjadi suatu kekuatan penyeimbang. Begitu pula yang coba dihadirkan oleh Metro TV. Metro TV yakni stasiun televisi berita pertama di Indonesia yang terhitung mengudara sejak 25 November 2000. Metro TV yang dimiliki oleh Surya Paloh memiliki tujuan guna melakukan persebaran berita dan informasi ke berbagai penjuru Indonesia. Selain memuat berita, Metro TV juga menyiarkan berbagai macam program informasi terkait kemajuan teknologi, pengetahuan umum, kesehatan, seni dan budaya. Selain itu, Metro TV juga melakukan kerjasama dengan berbagai televisi asing berskala internasional untuk dapat memberi sumber berita yang bisa dipercaya dan komprehensif terkait kondisi dalam negeri pada dunia luar. Dengan membawa tagline “Knowledge to Elevate” yang berarti Metro TV terus melakukan upaya meningkatkan wawasan dan pengetahuan, serta jadi media yang mempunyai kredibilitas dan kecepatan serta ketepatan dalam menyampaikan informasi.

Dewasa ini, media memiliki peran sentral dalam masyarakat. Dengan adanya media, berbagai informasi, pandangan, gagasan dan wacana bisa saling dipertukarkan dan kemajuan masyarakat juga tergambar di dalamnya. Pada masyarakat modern, media tertanam secara mendalam pada kehidupan sosial: tak ada perkara sosial yang tak mengikutsertakan media⁶. Peran dan fungsi media dalam konteks demokrasi adalah memberikan penyaluran informasi kepada publik, dimana terdapat nilai-nilai demokrasi yang juga sebagai fungsi kontrol terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah yang berlaku sebagai fungsi kritik yang menyuarakan tuntutan-tuntutan yang menjadi perhatian publik (Nugroho, 2015). Kemudian, salah satu tugas dan fungsi Metro TV adalah penyebaran informasi kepada publik. Penyebaran informasi terhadap publik menjadi value dasar sebagai manfaat yang dapat diterima oleh masyarakat dan dapat mengedukasi, karena nilai-nilai demokrasi mengukung kebersamaan, kebhinekaan, kebangsaan dan nilai universal (Hajad, 2018). Selain itu, terdapat nilai persamaan serta hak sebagai warga negara dan hubungan antara warga negara dengan pemerintah.

Metro TV mempunyai visi untuk menjadikan stasiun televisi yang berbeda dengan stasiun televisi lainnya dan jadi nomor satu pada program beritanya, serta program hiburan dan gaya hidup yang berkualitas. Sesuai dengan visi yang dimiliki hingga kini tahun 2021, Metro TV telah mengudara selama 21 tahun dan merupakan salah satu televisi mainstream berjaringan nasional tanpa bayar (free to air/FTA) dan mempunyai performa bisnis yang baik dalam perihal menarik pengiklan. Selaku televisi yang dipunyai seorang pengusaha dan juga politisi, Metro TV merupakan sumber keuntungan dan juga menjadi media yang seringkali dipergunakan Surya Paloh guna menyampaikan pesan dan kepentingan politiknya. Hal ini terlihat sejak masuknya Surya Paloh ke Partai Golkar, hingga ia mendirikan Partai Nasdem pada tanggal 26 Juli 2011. Terlihat dalam bermacam program acara, kemunculan Surya Paloh dan Partai Nasdem dalam berbagai kegiatan kerap muncul di Metro TV.

Dalam menghasilkan sebuah pemberitaan, terdapat beberapa tahap yang dilakukan Metro TV sampai dengan berita tersebut dapat ditayangkan. Hasil dari wawancara dengan beberapa narasumber, tahapan yang dilakukan oleh Tim Redaksi Metro TV bisa ditinjau pada gambar, seperti berikut:



Gambar 1 Mekanisme Redaksional pada Metro TV

Konteks dari politik dan editorial, untuk seluruh kebijakan editorial dalam konteks di Metro TV, dipegang oleh pemegang kendali tertinggi yaitu Pemimpin Redaksi yang saat ini

Arif Rasyidi, Sri Suparni, Hendra Eka Syahputra:

Hirarki Pengaruh Pada Talkshow “Kick Andy Double Check” Metro TV Program Guiteeres
Pahlawan/Pelanggar HAM

diduduki oleh Arief Suditomo. Walaupun terdapat Dewan Redaksi yang saat ini ketua oleh Elman Saragih. Namun, Pemimpin Redaksi diharuskan untuk memegang dan menjaga nilai-nilai kebangsaan dan fungsi dari media serta visi misi dari Metro TV dengan membawa tagline “Knowledge to Elevate” sehingga Metro TV dapat memberikan informasi yang kredibel, akurat dan terpercaya kepada publik. Dalam fungsi operasional, Pemimpin Redaksi memberikan arahan untuk kebijakan arus besar. Yang sifatnya kontrol harian, terletak di News Judgement dalam nilai jurnalistik. Dari sisi tersebut, maka karya jurnalistik sudah melewati proses yang panjang. Seluruh materi pemberitaan sudah melewati rapat redaksi, dimana keputusan terhadap berita yang layak maupun tidak layak untuk ditayangkan.

Pada Gambar tersebut, terdapat dua jenis kebijakan yaitu kebijakan Editorial dan kebijakan Operasional. Kebijakan Editorial merupakan kebijakan-kebijakan yang diambil dalam program-program tertentu yang membutuhkan diskusi dalam penentuan tema, atau pengaruh unsur-unsur politik didalamnya yang dilakukan oleh tim produksi atau produser yang terlibat pada suatu program. Pada proses kebijakan editorial, terdapat rapat redaksi yang nantinya akan menghasilkan news judgement. Contohnya terdapat berita yang dirasa memiliki potensi untuk menimbulkan perdebatan di dalam masyarakat, maka tidak akan ditayangkan atau akan diolah kembali bagaimana format penayangannya sehingga tidak memberikan dampak buruk kepada ruang publik. Setelah itu baru akan memasuki tahap penentuan layak atau tidaknya konten tersebut ditayangkan.

Yang kedua adalah kebijakan Operasional. ini merupakan kebijakan yang biasanya digunakan untuk konten pemberitaan harian atau yang dilakukan secara rutin. Sehingga mekanisme kerja pada kebijakan ini menyesuaikan dengan prosedur atau SOP yang sudah terbentuk. Dari berita-berita yang sudah ditentukan, akan langsung diserahkan kepada manager. Pada tatanan redaksi, terdapat beberapa manager yang bertanggung jawab sesuai dengan zona yang sudah ditentukan seperti zona pagi dan zona prime time. Manager pada zona pagi akan bertanggung jawab pada konten berita yang ditayangkan dari pagi sampai sore hari. Contohnya seperti program Metro Pagi Prime Time, Selamat Pagi Indonesia, Metro Siang, dan sebagainya. Sedangkan zona prime time contohnya adalah program Metro Hari Ini, Prime Time News, Talk News, dan lain-lain. Dalam hal ini manager bertanggung jawab tentang konten yang akan ditayangkan secara daily routine. Setelah itu akan dilanjutkan kepada eksekutif produser dan produser yang bertanggung jawab, baru sampai kepada tahap penayangan. Semua bentuk berita dan informasi yang disampaikan baik melalui mekanisme kebijakan Editorial maupun kebijakan Operasional tanggung jawabnya diberikan kepada Pimpinan Redaksi. Apabila terdapat penuntutan terhadap suatu konten berita, maka Pimpinan Redaksi yang akan bertanggung jawab.

Narasumber lain menyampaikan bahwa kebijakan-kebijakan tersebut mutlak untuk dilaksanakan dari level jurnalis sampai dengan pimpinan. Pada kebijakan operasional, berita-berita yang ditayangkan cenderung bersifat mirroring dari berita-berita yang sedang hangat di perbincangkan. Walaupun tetap melewati beberapa tahapan sampai dengan berita tersebut layak di ditayangkan, tahap mekanisme kerja yang cukup menentukan pada jenis kebijakan ini. Hal ini tentunya akan mempengaruhi hasil akhir yang akan dilihat oleh audiens. Audiens diajak untuk menerima informasi yang diinginkan oleh media. Namun bagaimana hal tersebut disampaikan dengan mempertimbangkan banyak faktor adalah suatu proses yang cukup rumit.

Kebijakan Editorial tersebut menjadi sangat penting terutama pada program-program yang sifatnya wawancara atau talkshow. Menurut Narasumber, terdapat perbedaan pendekatan yang dilakukan dalam program acara talkshow dengan program bulletin atau hard news yang biasanya hanya disampaikan satu arah. Begitu pula dengan Program Kick Andy Double Check yang merupakan salah satu program baru dari Metro TV yang baru berusia sekitar dua bulan. Bentuk pendekatan konten dan kekuatan yang ditampilkan pada program ini terletak pada pembawa acaranya yaitu Andy F. Noya. Andy Noya merupakan seorang

jurnalis yang sangat senior yang secara pribadi merupakan individu yang sangat netral dan apa adanya. Segala sesuatu yang ditayangkan pada program Kick Andy harus berdasarkan pada fakta. Inilah yang menjadi salah satu faktor program Kick Andy dapat bertahan selama lebih dari 17 tahun.

Andy F. Noya bergabung bersama Metro TV sudah sejak lama ketika awal berdirinya. Hingga akhirnya saat ini Andy F. Noya diberi kepercayaan untuk membawakan sebuah acara di Metro TV pada program Kick Andy dan Kick Andy Double Check. Dimana program tersebut saat ini sering kali menjadi sorotan publik dan disukai banyak orang karena kontennya yang menarik. Sebelumnya, program Kick Andy memiliki pendekatan yang humanis dan mengarah kepada realita sosial di Indonesia. Segala sesuatu yang disampaikan pada program Kick Andy selalu berdasarkan fakta. Andy Noya tidak pernah melakukan wawancara tanpa melakukan riset yang kuat sebelumnya, bahkan riset yang dilakukan bisa sangat dalam. Namun, seiring berjalannya waktu, Kick Andy juga membahas berbagai isu termasuk isu Hak Asasi Manusia. Salah satu episodenya yaitu membahas tentang Eurico Guterres yang sebelumnya telah diberikan penghargaan oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Guterres yakni terduga pelaku pelanggaran HAM di Timor Leste tahun 1999, dianggap tidak layak diberikan penghargaan tersebut karena mencederai hak asasi manusia di Indonesia.

Teori Hirarki Pengaruh Media menggambarkan bahwa isi media yang diberikan ke masyarakat ialah hasil pengaruh kebijakan internal organisasi media dan eksternal. Dengan kata lain, pada dasarnya konten media yakni hasil tekanan dari dalam dan luar organisasi media. Proses pemberitaan pada Metro TV, khususnya talkshow Kick Andy Double Check pada episode “Guterres, Pahlawan atau Pelanggar HAM?” cukup mencerminkan klasifikasi lingkaran level pengaruh isi media yang disebutkan Shoemaker dan Reese.

Pertama, pada level individu yang dianggap mampu mempengaruhi sikap ataupun perilaku personal serta professional yang berhubungan yang kemudian turut memengaruhi isi media ([Aufriandra, dkk, 2017](#)). Pengaruh pada level individu tergambar oleh sosok Andy F. Noya. Menurut narasumber, Andy F. Noya tidak akan melakukan wawancara sebelum dilakukan riset yang kuat terkait isu tersebut. Pada level ini, peran pelaku media terbagi jadi dua yakni mereka yang memilih netral atau selaku partisipan dalam peristiwa. Pada kasus ini juga Andy bersikap kritis bahkan sampai menanyakan hal yang sensitif. Andy memosisikan sebagai partisipan dimana ia tidak hanya sekedar mendudukan diri sebagai perantara tetapi melakukan penyelidikan atas berbagai klaim yang sudah ada di masyarakat. Level ini mempengaruhi sikap maupun perilaku personal dan professional dari Andy F. Noya yang kemudian turut mempengaruhi isi media.

Kedua adalah pengaruh isi media dari rutinitas media atau kebiasaan media dalam mengemas berita ([Krisdinanto, 2014](#)). Pada rutinitas media terdapat tiga unsur yang saling berhubungan yakni sumber berita, organisasi media dan audiens. Hal ini terlihat dari pola kebijakan operasional yang dijelaskan oleh narasumber. Bagaimana redaksi Metro TV menyajikan berita yang sifatnya daily routine dengan menggunakan mekanisme kerja sesuai dengan SOP yang sudah terbentuk. Ketiga unsur tersebut tercakup pada prosedur ini, yaitu pemilihan berita, organisasi media dari manager, eksekutif produser sampai dengan produser, serta penonton yang selalu menginginkan berita terbaru dalam kehidupan sehari-harinya. Metro TV juga memiliki mekanisme penyajian yang berbeda menyesuaikan dengan waktu penayangannya. Hal ini tentu saja dipengaruhi oleh rutinitas penonon misalnya pagi dan malam hari akan diisi oleh Hard News karena banyak dari pekerja kantoran yang menonton. Namun untuk siang dan sore hari akan menyajikan berita yang sifatnya lebih ringan. Hal ini tentu saja berimplikasi pada hadirnya konsep nilai berita sebagai syarat yang harus dipenuhi

Arif Rasyidi, Sri Suparni, Hendra Eka Syahputra:

Hirarki Pengaruh Pada Talkshow “Kick Andy Double Check” Metro TV Program Guiteeres Pahlawan/Pelanggar HAM

agar peristiwa tertentu layak disajikan pada audiens. Dengan kata lain, nilai berita akan menjaga keseimbangan antara proses produksi berita dengan pemasarannya.

Ketiga, level organisasi media yang berhubungan dengan struktur manajemen organisasi, kebijakan dan tujuan media (Krisdinanto, 2014). Menurut narasumber, Metro TV merupakan stasiun televisi berita, dimana performance menjadi nomor dua. Inilah yang membedakan dengan stasiun televisi lain yang mengutamakan general entertainment. Karena Metro TV memiliki tujuan untuk selalu aktual dan berdasarkan fakta dalam menyampaikan berita, maka bisa saja suatu isu yang dirasa kurang menarik bagi penonton, namun menurut tim redaksi hal itu perlu disampaikan atau disuarakan kepada khalayak, maka konten tersebut akan tetap ditayangkan. Selain itu, tim redaksi Metro TV juga fokus pada pengolahan berita. Misalnya terdapat berita yang sedang banyak diperbincangkan, namun apabila berita tersebut terus diulang maka akan menjadi kurang menarik bagi audiens. Tim redaksi akan mengolah kembali berita tersebut misalnya dengan menyajikan fakta lain, atau melihat berita dari sudut pandang yang berbeda. Dalam level organisasi media, jika akan mengangkat suatu isu tidak bisa sembarangan langsung di up ke publik seorang jurnalis diharuskan untuk menyampaikan pada sudut pandang tertentu, misalnya yang tidak meyudutkan pemerintah. Perihal ini mau tak mau harus dilaksanakan sebab hal tersebutlah yang disepakati pada rapat redaksi. Level organisasi dianggap memiliki posisi yang sangat dominan karena kebijakan kekuasaan organisasi tertinggi pasti dipegang oleh pemilik media. Selain itu, struktur dan kebijakan organisasi media pasti akan berhubungan langsung dengan tujuan media itu sendiri.

Keempat adalah extramedia level atau level pengaruh dari luar organisasi media. Pengaruh ini bisa bersumber dari berita, penonton, pemerintah, maupun pangsa pasar (Krisdinanto, 2014). Pada berita-berita harian, Metro TV mengedepankan dua unsur penting dalam level ini yaitu pengiklan dan audiens. Audiens Metro TV termasuk golongan penonton Smart People., karena sebagian besar merupakan pebisnis, pekerja, ataupun seseorang yang sedang mencari berita terkini. Dalam program Kick Andy sendiri mengutamakan kekuatan konten isu yang sangat perlu dirasa untuk disuarakan dan harus dibahas pada program tersebut. Isu tersebut juga bersumber dari masyarakat yang lagi hangat di perbincangkan. Contohnya adalah pengangkatan isu Guterres. Pada saat itu, isu ini dianggap menarik perhatian publik karena adanya pro kontra dalam pemberian penghargaan oleh Presiden Jokowi. Andy F. Noya merasa tertarik dan untuk mengetahui apa yang sebenarnya dialami oleh Guterres. Dalam level ekstra media kontrol pemerintah juga berpengaruh dan harus di perhatikan apalagi dalam isu Guterres ini ada pemerintah langsung yang berperan sehingga hal ini menjadi perbincangan pro dan kontra bagi masyarakat. Pengangkatan isu Guterres ini bisa jadi untuk membentuk persepsi publik bahwa keputusan Presiden Jokowi sudah tepat dengan memberikan penghargaan kepada Guterres.

Level terakhir dalam Teori Hirarki Pengaruh Media adalah Ideologi. Ideologi merupakan kerangka berpikir yang digunakan oleh individu untuk meninjau realitas dan cara menghadapinya (Krisdinanto, 2014). Level ideologi ini bersifat abstrak dimana berkaitan dengan konsep atau posisi individu dalam menafsirkan realitas dalam media. Disini Andy F. Noya dan tim redaksi memiliki ideologi tertentu sehingga program Kick Andy mengangkat isu terkait Guterres. Meski ada yang mendukung bahwa Guterres memang layak mendapatkan penghargaan dari Presiden Jokowi, namun tidak sedikit yang tidak setuju bahkan meminta penghargaan untuk Guterres dicabut. Menurut narasumber, Andy F. Noya beserta tim redaksi percaya bahwa Guterres berdiri dibawah bendera Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), sehingga meyakinkan untuk menjadikan Guterres sebagai narasumber dengan salah satu tujuannya adalah meluruskan anggapan yang ada di masyarakat. Pada episode Guterres bisa terlihat ideologi yang dianut Metro TV tercermin dari isi konten berita yang disajikan. Penentuan kebijakan redaksional dalam sebuah stasiun televisi menentukan jati dirinya, sebab kebijakan redaksional merupakan pembeda antara

media satu dengan media yang lain. Ketika kebijakan itu dibuat, sebuah media pasti memiliki dasar pertimbangannya sendiri.

SIMPULAN

Secara implisit, Shoemaker dan Reese melihat jurnalisme selaku proses yang selalu diwarnai oleh kegiatan konstruksi lewat masing-masing level. Adanya lima level yang telah dijabarkan pada bab sebelumnya, Teori Hirarki Pengaruh Media secara tajam membeberkan konstruksi-konstruksi yang membentuk isi media. Cara Shoemaker dan Reese mengasumsikan fakta, berita, posisi jurnalis, sampai dengan media sangat jelas terlihat mengikuti paradigma konstruktivis. Teori ini menggambarkan bahwa isi media tak bisa merefleksikan suatu realitas objektif namun media dibentuk oleh berbagai faktor yang menghasilkan bermacam versi yang berbeda terkait realitasnya. Dari orientasi personal dari para pekerja media, profesionalisme, kebijakan perusahaan, pola kepemilikan perusahaan, lingkungan ekonomi, pengiklan sampai dengan pengaruh- pengaruh ideologi. Jadi dari kelima faktor-faktor yang sudah dijelaskan sebelumnya sangat berpengaruh terhadap isi media yang disampaikan.

Pada studi kasus yang dilakukan di Metro TV, sangat mencerminkan adanya hirarki pengaruh pada isi media yang sebelumnya telah dibahas. Bagaimana mekanisme kebijakan yang diterapkan dari pimpinan redaksi sampai dengan berita tersebut ditayangkan sangat memenuhi unsur-unsur yang disampaikan dalam teori ini, dari mulai dari lingkaran terkecil pada level individu pelaku media, praktik rutinitas, organisasi media, extramedia, sampai dengan level ideologi. Menggunakan teori hirarki ini dalam penelitian suatu dimedia sangat berpengaruh karena adanya level analisis, sehingga aktivitas penelitian tersusun untuk mempengaruhi individu seseorang serta menguji struktur sosial di balik kontrol seseorang.

Dari level terendah, Andy F. Noya sebagai individu pelaku media sudah banyak mempengaruhi isi dari konten program Kick Andy Double Check yang ditayangkan Metro TV. Selain itu dari level rutinitas yang menerapkan mekanisme sistematis berdasarkan prosedur yang ada. Level organisasi media yang berhubungan dengan struktur manajemen organisasi, kebijakan dan tujuan media. Inilah yang membedakan dengan stasiun televisi lain yang mengutamakan general entertainment. Pada penelitian ini didapati adanya pengaruh pada level pimpinan perusahaan dalam mengemas suatu program atau isu yang akan diangkat kepada publik. Meskipun tidak secara menyeluruh, namun terdapat beberapa isu yang mengharuskan penyajian dengan sudut pandang tertentu.

Maka pengaruh kepemilikan sebuah media terhadap konten media sangat berpengaruh sama halnya dengan studi kasus program Kick Andy di Metro TV. Sudah jelas bagaimana level-level faktor menggambarkan bagaimana hirarki pengaruh hirarki dalam membuat kebijakan redaksi pada stasiun televisi Metro TV.

DAFTAR PUSTAKA

Aufriandra, F., Adelya, B., & Ulfah, S. (2017). Komunikasi Mempengaruhi Tingkah Laku Individu. *JPGI (Jurnal Penelitian Guru Indonesia)*, 2(2), 9-15. <https://doi.org/10.29210/02219jpgi0005>

Cresswell, J. (2016). *Research Design Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Arif Rasyidi, Sri Suparni, Hendra Eka Syahputra:

Hirarki Pengaruh Pada Talkshow “Kick Andy Double Check” Metro TV Program Guiteeres Pahlawan/Pelanggar HAM

- Drianus, O. (2018). Manusia di Era Kebudayaan Digital. *MAWA'IZH: JURNAL DAKWAH DAN PENGEMBANGAN SOSIAL KEMANUSIAAN*, 9(2), 178–199. <https://doi.org/10.32923/maw.v9i2.784>
- Gani, R. (2005). Media Massa dalam Masyarakat Madani. *Mediator: Jurnal Komunikasi*, 6(1), 35–42. <https://doi.org/10.29313/mediator.v6i1.1174>
- Hajad, V. (2018). Media dan Politik (Mencari Independensi Media Dalam Pemberitaan Politik). *SOURCE : Jurnal Ilmu Komunikasi*, 2(2). <https://doi.org/10.35308/source.v2i2.295>
- Khoirun Nida, F. (2015). PERSUASI DALAM MEDIA KOMUNIKASI MASSA. *AT-TABSYIR: Jurnal Komunikasi Penyiaran Islam*, 2(2). <http://dx.doi.org/10.21043/at-tabsyir.v2i2.502>
- Krisdinanto, N. (2014). Anomali dan Teori Hirarki Pengaruh terhadap Isi Media. *KOMUNIKATIF*, 3(1), 1-18. <https://doi.org/10.33508/jk.v3i1.1243>
- Laksono, P. (2020). Komunikasi Massa dan Demokrasi dalam Arus Sistem Politik. *MEDIAKITA*, 4(1). <https://doi.org/10.30762/mediakita.v4i1.2448>
- Lesmana, T. (2013). Kebebasan Pers Dilihat dari Perspektif Konflik, antara Kebebasan dan Tertib Sosial. *Jurnal ILMU KOMUNIKASI*, 2(1). <https://doi.org/10.24002/jik.v2i1.249>
- Nugroho, H. (2015). Demokrasi dan Demokratisasi: Sebuah Kerangka Konseptual Untuk Memahami Dinamika Sosial-Politik di Indonesia. *Jurnal Pemikiran Sosiologi*, 1(1), 1. <https://doi.org/10.22146/jps.v1i1.23419>
- Poti, J. (2018). Demokratisasi Media Massa, Relasi Kuasa Negara Masyarakat dan Pemilik Media (Kajian Terhadap Peran Komisi Penyiaran Indonesia). *KEMUDI : Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 1(1), 78-120. Retrieved from <https://ojs.umrah.ac.id/index.php/kemudi/article/view/734>
- Reese, S. D., & Shoemaker, P. J. (2016). A Media Sociology for the Networked Public Sphere: The Hierarchy of Influences Model. *Mass Communication and Society*, 19(4), 389–410. <https://doi.org/10.1080/15205436.2016.1174268>
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.



Politik Air Bersih di Desa Sukaringin

Restu Rahmawati¹, Firman Firman²

¹ Jurusan Ilmu Politik, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, 12450, Jakarta-Indonesia

² Jurusan Administrasi Publik, Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta, 14350, Jakarta-Indonesia

Info Artikel

Dikirim: Jun 26, 2022

Diterima: Jul 14, 2022

Dipublikasi: Jul 31, 2022

Kata Kunci:

Kedungringin; Politik Air;
Pengelolaan Air Bersih:

Koresponden:

Restu Rahmawati

Jurusan Ilmu Politik,
Universitas Pembangunan
Nasional Veteran Jakarta

Email:

restu.rahmawati@upnvj.ac.id

Sitasi Cantuman:

Rahmawati, R., & Firman, F. (2022). Politik Air Bersih di Desa Sukaringin *Journal of Political Issues*. 4(1); 10-18. <https://doi.org/10.33019/jpi.v4i1.80>



DOI:

<https://doi.org/10.33019/jpi.v4i1.80>

Lisensi:



Attribution-NonCommercial-
ShareAlike 4.0 International
(CC- BY-NC-SA 4.0)



ABSTRAK

Abstract This paper will examine the politics of clean water management, an overview of the scarcity of clean water quality in Kedungringin Village, Sukawangi District, Bekasi Regency. The reason this research was conducted was because there was a problem in Kedungringin Village, namely the lack of access to clean water both in quality and quantity. Various efforts have been made by the people of Kampung Kedungringin, such as constructing boreholes with the help of benefactors. However, this is not enough to meet the needs of clean water for all residents. The role of PDAM Tirta Bhasasi in this case has not been able to reach the Kedungringin Village area because the Clean Water Pipeline is far from the location of Kedungringin Village. With these problems, this research will examine how the efforts made by PDAM Tirta Bhasasi and the Sukaringin Village Government in meeting access to clean water needs in Kedungringin Village. The research method used in this research is a descriptive qualitative research method with a case study approach. The results of this study indicate that the efforts made by PDAM Tirta Bhasasi in meeting the need for clean water for the people of Kampung Kedungringin have not been realized. This is because PDAM Tirta Bhasasi is in the construction of a new clean water pipeline to the housing/cluster area in Sukaringin Village. Clean water has not been able to flow to Kedungringin Village because PDAM Tirta Bhasasi prioritizes cluster housing areas in collaboration with developers. This means that groups of people who have money will be prioritized over groups of people who do not have money.

Abstrak Tulisan ini akan mengkaji tentang politik pengelolaan air bersih sebuah tinjauan atas langkanya kualitas air bersih di Kampung Kedungringin Kecamatan Sukawangi Kabupaten Bekasi. Alasan penelitian ini dilakukan adalah karena terjadi persoalan di Kampung Kedungringin yakni tidak adanya akses terhadap air bersih baik secara kualitas maupun kuantitas. Berbagai upaya telah dilakukan oleh masyarakat Kampung Kedungringin seperti membangun sumur bor dengan bantuan dari para dermawan. Namun hal ini belum cukup untuk memenuhi kebutuhan air bersih bagi seluruh warga. Peran PDAM Tirta Bhasasi pun dalam hal ini belum mampu menjangkau wilayah Kampung Kedungringin karena Saluran Pipa Air Bersih jauh dari lokasi Kampung Kedungringin. Dengan permasalahan tersebut, maka penelitian ini akan mengkaji terkait bagaimana upaya yang dilakukan PDAM Tirta Bhasasi dan Pemerintah Desa Sukaringin dalam memenuhi akses kebutuhan air bersih di Kampung kedungringin. Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa upaya yang dilakukan PDAM Tirta Bhasasi dalam memenuhi kebutuhan air bersih bagi masyarakat Kampung Kedungringin belum terealisasi. Hal ini dikarenakan PDAM Tirta Bhasasi dalam pembangunan saluran pipa air bersih baru sampai ke wilayah perumahan/cluster di Desa Sukaringin. Air bersih belum bisa mengalir ke Kampung Kedungringin karena PDAM Tirta Bhasasi lebih memprioritaskan Kawasan perumahan cluster bekerjasama dengan pengembang. Itu artinya kelompok masyarakat yang mempunyai uang akan lebih diprioritaskan daripada kelompok masyarakat yang tidak mempunyai uang.

Tentang:

Restu Rahmawati menyelesaikan Studi Magister di Departemen Politik dan Pemerintahan Universitas Gadjah Mada pada tahun 2012. Saat ini penulis adalah dosen di Jurusan Ilmu Politik, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.

Firman Firman menyelesaikan Studi Magister di Departemen Politik dan Pemerintahan Universitas Gadjah Mada pada tahun 2012. Saat ini penulis adalah dosen di Jurusan Administrasi Publik Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta.

PENDAHULUAN

Air mempunyai peranan yang sangat strategis dan harus tetap tersedia jumlahnya, sehingga dapat mendukung kehidupan manusia dan pelaksanaan pembangunan di masa sekarang maupun di masa yang akan datang. Terpenuhinya kebutuhan air bersih bagi suatu masyarakat tertentu menjadi suatu acuan dalam menentukan apakah masyarakat di suatu lokasi atau desa sudah terpenuhi atau belum. Dalam rantai kehidupan, air merupakan hal yang sangat penting. Kebutuhan akan air tentunya terus meningkat dari waktu ke waktu, hal ini bukan hanya disebabkan oleh meningkatnya jumlah penduduk melainkan juga digunakan dalam kegiatan industri, pertanian dan perikanan. Laporan Perserikatan Bangsa-Bangsa menyebutkan bahwa pada tahun 2002, terdapat satu miliar lebih orang yang tidak memiliki akses terhadap air bersih. Hal ini menunjukkan bahwa krisis air bersih menjadi isu yang serius karena air tidak terdistribusi dengan merata di dunia (Endaryanta, 2007). Dalam rangka melayani kebutuhan air minum, pemerintah mendirikan Badan Peningkatan penyelenggaraan SPAM yang diselenggarakan badan usaha milik daerah (BUMN/BUMD) berupa Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) sebagai penyelenggara SPAM (Sihotang, 2018).

PDAM harus memberikan pelayanan yang maksimal baik secara kuantitas dan kualitas bagi masyarakat khususnya pelanggan baik dalam menyediakan air untuk kebutuhan masyarakat maupun memastikan kualitas air juga sesuai dengan baku mutu air. Hal ini dikarenakan masyarakat mempunyai hak untuk menikmati air bersih dan sehat untuk memenuhi kehidupan mereka sehari-hari. Kelangkaan air di beberapa daerah merupakan sumber utama ketidakstabilan ekonomi dan politik (Mercer, 2018).

Fenomena adanya gejala krisis air bersih ini bisa menjadi ancaman yang serius terhadap umat manusia khususnya keamanan lingkungan. Berbagai faktor dan aspek yang masuk ke dalam ruang lingkup keamanan dan kebutuhan lingkungan meliputi penurunan dan degradasi lingkungan, berkurangnya sumber daya alam, bencana alam, dan polusi (United Nations Trust Fund for Human Security, 2009). Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah mengakui hak asasi manusia (HAM) terhadap air dan sanitasi serta peran penting air dan sanitasi untuk mewujudkan hak asasi manusia melalui Resolusi PBB Nomor 64/292 Tahun 2010. Melalui UN Water, PBB juga mempromosikan pentingnya upaya bersama agar tercapai *water security* sebagai keamanan yang bersifat multi dimensi dan multisectoral.

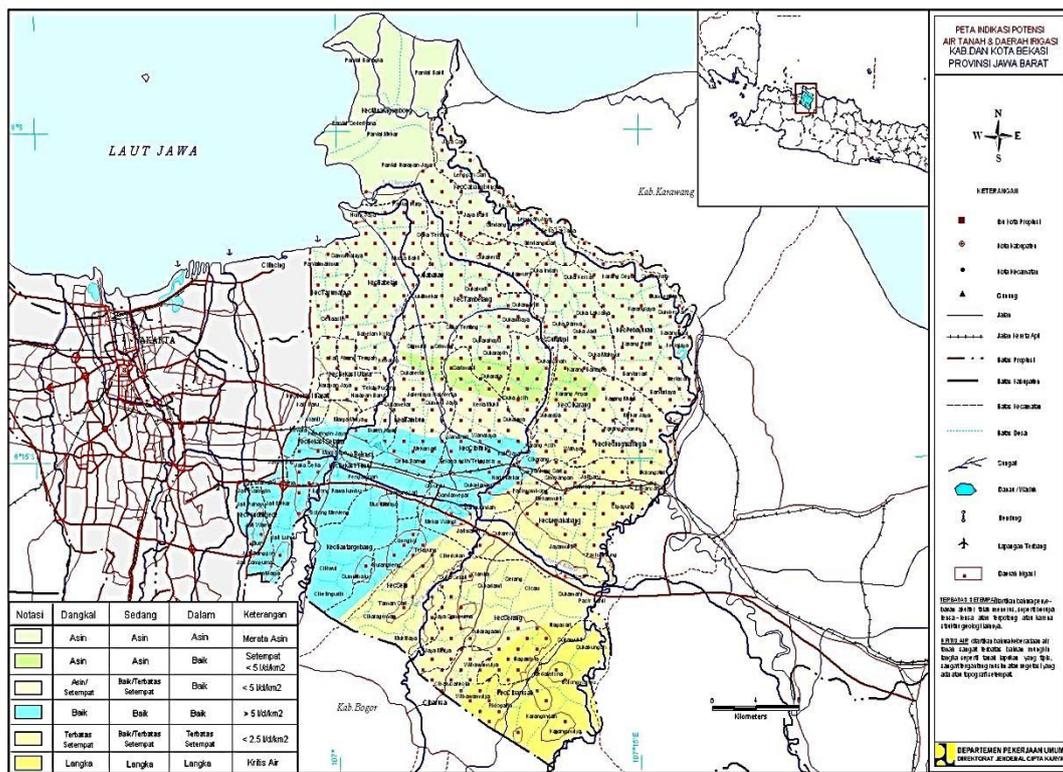
Air disebut sebagai penghubung yang penting antar berbagai aspek keamanan. Ketersediaan air menjadi tantangan yang begitu kompleks dan saling berhubungan pada berbagai level, baik level lokal hingga level internasional untuk mencapai sense of security, ketahanan, pembangunan, dan human *well-being* (United Nations Water 2013). Pentingnya hal tersebut, dibutuhkan suatu kolaborasi aktor-aktor yang bersifat interdisipliner dari berbagai sektor, komunitas dan lembaga politik sehingga kemungkinan terjadinya kompetisi dan konflik antarkonsumen air serta dampak jangka panjang dapat dihindarkan (United Nations Water 2013).

Kondisi memburuknya permasalahan lingkungan telah menjadi sumber masalah air dan berbagai risikonya. Stern (2014) dan McCarl dan Reilly (1999) mengatakan bahwa faktor penyebab krisis air dari kualitas, sisi kuantitas, maupun kontinuitas didalamnya mengenai perubahan iklim global dalam jangka panjang, intensitas, dan pola sebaran spasial, maupun curah hujan yang tidak menentu serta temporal. Permasalahan yang bisa muncul adalah banjir serta kekeringan yang semakin sering terjadi. Keduanya berisiko besar dalam sektor pertanian. Selain itu, persoalan ekologi daerah aliran sungai (DAS) yang terus memburuk memperparah degradasi sumber-sumber air. Begitupun halnya dengan adanya eksploitasi berlebihan tanpa menerapkan upaya keberlanjutan lingkungan mengakibatkan pihak hilir menerima risiko kekurangan pasokan air untuk keperluan kebutuhan hidup dan kegiatan ekonominya. Ini bisa menjadi ancaman yang serius terhadap pelaksanaan kegiatan usaha tani

merupakan ancaman bagi seluruh kehidupan petani yang menyandarkan hidup pada penghasilan dari aspek pertanian.

Hingga kini, air bersih disediakan untuk masyarakat di Indonesia masih dihadapkan pada beberapa persoalan dan permasalahan yang begitu kompleks dan sampai saat ini juga belum sepenuhnya dapat diatasi. Salah satu masalah yang masih dihadapi oleh pemerintah saat ini yakni masih rendahnya tingkat pelayanan air bersih untuk masyarakat. Tidak hanya di Indonesia, permasalahan air bersih ternyata dialami juga oleh Myanmar dimana akses ke air minum yang aman dan sanitasi sangat buruk. Bahkan kurangnya akses ke air bersih dan sanitasi dasar merupakan krisis diam-diam yang mempengaruhi lebih dari sepertiga populasi dunia. Sekitar 443 juta hari sekolah hilang setiap tahun karena penyakit yang berhubungan dengan air, jutaan perempuan dan anak perempuan menghabiskan waktu hingga 2 jam sehari untuk mengumpulkan air, dan setiap hari di Bangladesh saja 28 juta hingga 35 juta orang mengonsumsi air minum yang mengandung kadar arsenik yang sangat tinggi (Barry, 2008).

Permasalahan air baik dari segi kuantitas maupun kualitas bukan merupakan persoalan baru di kota-kota besar, seperti contohnya di Bekasi yang meliputi Kota Bekasi dan Kabupaten Bekasi. Kabupaten Bekasi terletak di bagian utara Propinsi Jawa Barat dan sebagian wilayah termasuk daerah pesisir memiliki permasalahan dalam penyediaan sumberdaya air bersih. Ketersediaan air di Kabupaten Bekasi berasal dari dua sumber, yaitu air tanah dan air permukaan yang berasal dari sungai. Permasalahan kelangkaan ketersediaan air bersih di wilayah Kabupaten Bekasi terjadi di Kampung Kedung Ringin Sukawangi, Kabupaten Bekasi. Air bersih merupakan barang mewah di daerah tersebut karena krisis air telah berlangsung bertahun-tahun. Selain itu, di beberapa wilayah Kecamatan Babelan juga ketersediaan air bersih sangat kurang karena perumahan warga baik yang berasal dari air PDAM kualitas air masih jauh dari standar mutu air bersih dimana air masih keruh.



Berdasarkan peta air Kabupaten dan Kota Bekasi diatas, dapat dilihat bahwa Kecamatan Sukaringin merupakan wilayah yang termasuk terbatas setempat untuk ketersediaan air yang ditandai dengan warna kuning muda. Hal ini berbeda dengan wilayah lainnya di Bekasi Kota ketersediaan air baik. Penyedia air bersih di Kabupaten Bekasi adalah PDAM Tirta Bhagasasi. Sebagai penyedia jasa air bersih untuk beberapa area industri, seperti area bisnis maupun pemukiman penduduk yang ada di wilayah operasional Tirta Bhagasasi, yang meliputi Kabupaten Bekasi serta sebagian Kota Bekasi. Tirta Bhagasasi dalam hal ini dalam klaimnya senantiasa berupaya memberikan pelayanan terbaik berupa jasa penyedia kebutuhan akan air yang terjamin kualitas dan kuantitasnya. Hal ini adalah bagian langkah kecil Tirta Bhagasasi untuk menyehatkan masyarakat Bangsa Indonesia. Semua usaha ini dilakukan oleh Tirta Bhagasasi untuk memenuhi kepuasan pelanggan.

Langkanya air bersih di Kampung Kedungringin tentunya menjadi pertanyaan besar bagi peneliti karena Kabupaten Bekasi dengan kategori wilayah perkotaan dan mudah akses terhadap berbagai fasilitas publik masih ada wilayah yang kekurangan air bersih. Seharusnya di wilayah perkotaan akses terhadap air bersih akan mudah namun yang terjadi di Kampung Kedungringin justru sebaliknya. Hal ini kemudian yang akan menjadi permasalahan yang akan diangkat dalam penelitian ini yakni bagaimana politik pengelolaan air bersih di Kampung Kedungringin Kabupaten Bekasi.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif, dengan pendekatan studi kasus. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dalam bentuk wawancara mendalam (indepth interview), dan observasi untuk mendapatkan data

Gambar 1 Peta Air Di Kabupaten Bekasi

berjumlah 2 orang yakni Ibu Kiki dari Litbang PDAM Tirta Bhagasasi dan Bapak Hasanuddin selaku Ka. KCP Tambelang. Selain itu, informan penelitian lainnya adalah dari warga Kampung Kedungringin yakni Bapak Roni dan Bapak Adit selaku perwakilan dari tokoh pemuda. Berdasarkan sasaran penelitian diatas, maka lokasi penelitian ini di Kantor PDAM Tirta Bhagasasi Jalan Kalimalang BTB 25 Kp.Tegal Danas Cikarang Pusat Kabupaten Bekasi dan Kampung Kedung Ringin Desa Sukaringin Kecamatan Sukawangi, Kabupaten Bekasi. Data penelitian yang diperoleh dari lapangan diolah dengan menggunakan teknik analisis data dengan tahapan reduksi data yakni menyederhanakan data agar bisa sesuai dengan kebutuhan dan tentunya mudah untuk didapatkan informasi, tahap berikutnya adalah penyajian data yaitu peneliti menyajikan data yang sudah direduksi atau disederhanakan di tahap sebelumnya, dan tahap terakhir adalah menarik kesimpulan (Sugiyono, 2016).

Penelitian ini menggunakan uji validitas yang digunakan adalah teknik triangulasi untuk pengecekan keabsahan data dengan cara mengecek atau membandingkan data yang diperoleh dari sumber atau kriteria lain di luar data, untuk meningkatkan validitas data. Triangulasi yang dilakukan adalah triangulasi sumber, dengan cara membandingkan apa yang dikatakan subjek dengan informan tersebut. Maksudnya agar data yang diperoleh dapat dipercaya karena tidak hanya diperoleh dari satu sumber saja subjek penelitian, tetapi data juga diperoleh dari beberapa sumber lain yang dapat membantu dalam memvalidasi data dan temua, triangulasi metode yaitu dengan cara membandingkan data observasi dengan data wawancara dan data perbandingan hasil observasi data dari wawancara dengan isi dokumen yang relevan. Dalam hal ini peneliti berusaha mencari kembali data yang diperoleh melalui wawancara (Moleong, 2014).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Kampung Kedungringin merupakan salah satu daerah yang sejak 8 tahun yang lalu mengalami kekeringan dan kekurangan air bersih baik dari segi kuantitas maupun kualitasnya. Pada musim kemarau masyarakat bisa mengantri sangat panjang apabila ingin memperoleh air bersih. Sumber air bersih yang dimiliki masyarakat Kampung Kedungringin hanya berasal dari sumur bor dengan bantuan satelit dari hasil sumbangan melalui wakaf tanah dan air bersih.

Kualitas air di Kampung Kedungringin Desa Sukaringin Kecamatan Sukawangi berwarna kuning, berbau, dan bahkan hitam sehingga tidak layak untuk dikonsumsi. Menurut informasi dari informan penelitian bahwa masyarakat telah terbiasa menggunakan air dengan kualitas yang buruk tersebut untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari seperti mandi, dan lainnya. Apabila mereka menggunakan air tersebut untuk mandi, maka kuku tangan dan kaki akan berubah warna menjadi kuning serta badan mereka akan mengalami gatal-gatal.

Terkadang, karena terdesak kebutuhan sebagian masyarakat terpaksa menyaring air berwarna hitam itu menggunakan alat yang sangat sederhana seperti pasir putih, busa dan baju bekas yang diletakkan di dalam ember yang telah dilubangi dan disambungkan dengan pipa. Proses ini harus dilakukan selama tiga kali untuk memperoleh air hingga jernih. Namun meskipun telah melalui proses penyaringan, air tetap bau. Melihat kondisi demikian, masyarakat Kampung Kedungringin juga telah berusaha untuk menggali sumur yang ada di rumah mereka masing-masing namun menurut mereka menggali sumur lebih dalam juga bukan pilihan lantaran kualitas air tetap buruk. Begitu pula air tanah yang dipompa melalui mesin pemompa. Kedalaman 100 meter pun tak membuahkan air dengan kualitas baik. Kedalaman 120 meter baru air bisa bersih (Bekasi, 2020).

Kondisi langkanya air bersih di Kampung Kedungringin, telah menyentuh hati salah seorang dermawan yang berasal dari luar Kabupaten Bekasi. Dermawan tersebut membuatkan dua buah sumur bor untuk masyarakat Kampung Kedungringin khususnya untuk warga RT 03 RW 05. Dua sumur bor yang ada di RT 03 RW 05 tersebut, masing-masing mempunyai satu penampung air (toren) hasil dari wakaf dermawan. Masing-masing sumur bor mengalir 40 rumah, sehingga sampai saat ini yang baru memperoleh akses air bersih baru mencapai 80 rumah atau sekitar 251 warga yang memperoleh akses air bersih dari total 884 warga atau baru mencapai 28% dari total seluruh warga Kampung Kedungringin RT 03 RW 05.

Langkanya air bersih di Kampung Kedungringin dikarenakan sulitnya dalam mengakses air bersih karena jauhnya lokasi dari saluran air bersih. Pipa-pipa saluran air bersih selama ini keberadaannya masih jauh dari Desa Sukaringin dan baru tahun 2021, KCP Tambelang mengajukan permintaan penambahan instalasi pipa air untuk wilayah Sukaringin dengan menginduk kepada saluran pipa yang berasal dari KCP Tambelang. PDAM Tirta Bhagasasi melakukan pengembangan instalasi pipa di wilayah Desa Sukaringin dengan sambungan pipa berasal dari KCP Tambelang sehingga apabila nanti Kampung Kedungringin akan memasang instalasi pipa, aksesnya akan menjadi lebih dekat. Dalam perihal kemudahan dalam menjangkau sarana prasarana untuk penyediaan air bersih di Kampung Kedungringin Desa Sukaringin PDAM Tirta Bhagasasi telah berusaha menghadirkan air bersih, meskipun dalam implementasinya belum semua wilayah di Desa Sukaringin mendapatkan akses air bersih termasuk Kampung Kedungringin. Penyebab kelangkaan air bersih di Kedungringin tentu berbeda dengan yang terjadi di Suriah. Kelangkaan air di Suriah merupakan konsekuensi dari partai Bath yang terus-menerus mempromosikan pertanian intensif air. (Barnes, 2009) Dan di Sao Paulo Brazil, negara bagian menerapkan pengurangan tekanan dalam pipa air sebagai lawan dari penjatahan formal. (Millington, 2018Millington)

Komitmen PDAM Tirta Bhagasasi melalui KCP Tambelang untuk menambah saluran pipa air bersih di Desa Sukaringin, ternyata hanya untuk merespon permintaan konsumen dari pengembang perumahan yang berada di Desa Sukaringin. Pengembang perumahan cluster/kompleks mengajukan permintaan air bersih ke PDAM Tirta Bhagasasi karena tersedianya air bersih di perumahan merupakan salah satu strategi marketing mereka untuk memasarkan perumahannya. Para pengembang dalam hal ini menjadikan ketersediaan air bersih dari PDAM sebagai media promosi bagi perumahan yang akan ditawarkan kepada konsumen. Para pengembang mencantumkan informasi terkait ketersediaan air bersih dari PDAM dalam brosur iklan mereka sehingga ini menjadi daya tarik konsumen untuk membeli rumah yang ditawarkan dalam brosur tersebut. Perumahan kluster/kompleks di Kabupaten Bekasi sebagian besar dalam media promosi mereka mencantumkan ketersediaan air bersih dari PDAM sehingga dalam hal ini PDAM Tirta Bhagasasi lebih memprioritaskan ketersediaan air bersih bagi perumahan kluster/kompleks daripada pemukiman area domestik atau bukan perumahan kluster/kompleks. Guna merespon permintaan pengembang tersebut, maka PDAM Tirta Bhagasasi melalui KCP Tambelang menambah saluran pipa air bersih di Desa Sukaringin. Penambahan Instalasi Pipa Air (IPA) di Sukaringin sampai saat ini masih dalam proses dan itu pun keterjangkauannya masih terbatas pada area perumahan cluster/kompleks. Perumahan cluster diprioritaskan PDAM Tirta Bhagasasi dikarenakan ada permintaan langsung dari pengembang untuk ketersediaan air bersih.

Wilayah Kampung Kedungringin sendiri meskipun termasuk ke wilayah Desa Sukaringin belum bisa mendapatkan akses terhadap air bersih karena Kampung Kedungringin termasuk kriteria area perumahan domestik, sehingga belum bisa mendapatkan air bersih dari PDAM Tirta Bhagasasi. Diperlukan pengajuan secara kolektif bisa melalui pemerintah desa kepada PDAM Tirta Bhagasasi. Namun, dukungan pemerintah desa setempat pun belum terlihat karena sejauh ini belum ada pengajuan dari Pemerintah Desa Sukaringin untuk mengalirkan air bersih dari PDAM ke Desa Sukaringin khususnya ke perumahan domestik. Hal ini sesuai dengan prosedur dari PDAM Bhagasasi bahwa air PDAM akan mengalir ke Kampung Kedungringin apabila ada permintaan dari pemerintah desa setempat. Hal ini dikarenakan Kampung Kedungringin bukan merupakan area perumahan cluster, jadi termasuk kriteria wilayah domestik sehingga permintaan air bersih ke PDAM Tirta Bhagasasi harus ada pengajuan terlebih dahulu dari pemerintah desa setempat secara kolektif. Namun sampai saat ini, kebutuhan air bersih untuk Kampung Kedungringin belum diajukan ke PDAM Tirta Bhagasasi. Inilah kemudian yang menjadi faktor lainnya ketersediaan air bersih di Kampung Kedungringin masih langka dan PDAM belum masuk ke wilayah Kedungringin.

Melihat sumber daya yang ada dan dana yang masuk di desa, maka seharusnya pemerintah desa dapat memaksimalkan sebagian dana desa untuk memberikan perhatian dalam mengelola sumber mata air yang ada karena pemerintah desa juga memiliki kewenangan yang otonom dalam mengelola dana desa tersebut. Oleh sebab itu pemerintah desa harus memperhatikan tuntutan dari masyarakat sehingga masyarakat tidak perlu bersusah payah untuk mengeluarkan anggaran yang begitu besar dan meminta sumbangan kepada donatur dalam memperoleh air bersih. Disamping itu masyarakat tidak perlu jauh-jauh untuk mendapatkan air bersih apabila pemerintah serius memperhatikan apa yang menjadi tuntutan masyarakat Desa Sukaringin. Karena dengan pemberian kewenangan kepada Desa dalam mengelola dana desa yang diberikan menjadi suatu aktivitas yang memerlukan perhatian lebih agar pelaksanaannya dapat sesuai dengan tujuan dan sasaran yang diharapkan oleh setiap penduduk desa.

Kewajiban pemerintah untuk mengupayakan kesejahteraan umum adalah salah satu sebagai karakteristik negara termasuk dalam memberikan pada kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan masyarakat tidak semata meliputi adanya kebutuhan pangan, sandang dan papan saja. Akan tetapi Masyarakat dapat dikatakan sejahtera jika dapat hidup jauh lebih sehat dengan adanya sumber daya alam yang sudah tersedia dengan baik. Kebedayaan warga

menggunakan sumber daya alam yang ada untuk memberikan kebutuhan hidupnya demi keberlangsungan siklus hidup yang sudah ada. Salah satunya adalah terpenuhinya sumber daya yang sangat penting bagi makhluk hidup manusia dan makhluk hidup lainnya adalah air. Air merupakan salah satu kebutuhan pokok bagi manusia dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya. Begitu pentingnya air, sehingga diperlukannya upaya serta peran dari pemerintah dalam mempertahankan dan mengelola sumber air dengan baik. Keberadaan sumber air bersih menjadi kebutuhan primer bagi masyarakat.

Dengan demikian, politik kebijakan air bersih di Kabupaten Bekasi masih memprioritaskan perumahan cluster dibandingkan ke perumahan domestik. Adapun alasannya disebabkan oleh: 1) Jarak permukiman ke saluran pipa air bersih jauh. Pemukiman di Kampung Kedungingin sampai saat ini belum terjangkau air bersih. Hal ini disebabkan oleh pipa saluran air bersih yang berasal dari PDAM Tirta Bhagasasi lokasinya jauh dari Kampung Kedungingin, dan lokasi terdekat yang ada saluran pipa air bersihnya adalah Tambelang.; 2) Kemampuan untuk membayar layanan air bersih yang masih rendah. Masyarakat Kampung Kedungingin sebagian masih tergolong miskin. Hal ini dapat dilihat dari kemampuan mereka untuk mendapatkan layanan air bersih. Jangankan untuk mengadakan air bersih yang berasal dari PDAM, kemampuan untuk menggali sumur yang mereka miliki supaya lebih dalam sehingga bisa diperoleh air yang jernih pun tidak mampu. Hal ini kemudian yang menyebabkan air bersih belum bisa mengalir ke Kampung Kedungingin. Ditambah lagi PDAM Tirta Bhagasasi yang lebih memprioritaskan pemukiman cluster/kompleks karena kemampuan mereka membayar layanan air bersih lebih tinggi, maka aksesibilitas air bersih ke perumahan domestik masih rendah. Hal ini sesuai dengan yang dijelaskan Herrera bahwa konsumen kelas menengah memiliki lebih banyak keamanan finansial dan daya beli. Mereka lebih terlibat dan membuat tuntutan terorganisir pada pemerintah, Komunitas kelas menengahlah yang lebih mampu membayar sedikit lebih banyak uang dan mendapatkan layanan yang lebih baik (Herrera, 2017). Berdasarkan penjelasan diatas, maka politik pengelolaan air bersih di Kabupaten Bekasi belum adil, seharusnya kebijakan publik mengandung multi tujuan yakni untuk menjadikan kebijakan itu sebagai kebijakan yang adil dan seimbang dalam mendorong kemajuan kehidupan bersama (Rahmawati, 2017).

Persoalan krisis air bersih di berbagai belahan dunia belum mendapatkan perhatian yang besar karena fokus perhatian dunia tertuju pada masalah Kesehatan global yakni penyakit seperti malaria, TBC, dan AIDS, yang membunuh sebagian kecil dari jumlah orang yang meninggal karena penyakit yang berhubungan dengan air. Kemauan politik yang diperlukan belum dikerahkan untuk mengatasi krisis air dan sanitasi, di antara tujuan pembangunan milenium PBB yang paling diabaikan. Analisis biaya manfaat baru-baru ini yang dilaporkan oleh Organisasi Kesehatan Dunia membuat alasan kuat untuk investasi di sektor air bersih. Organisasi Kesehatan Dunia menegaskan kembali komitmennya untuk mengatasi kekhawatiran tentang air. Dukungan politik sangat mendesak diperlukan di semua tingkatan untuk pengembangan dan penerapan rekomendasi berbasis bukti untuk meningkatkan akses air yang aman, dan untuk meningkatkan pengawasan penyakit yang berhubungan dengan air (Barry, 2008).

SIMPULAN

Politik kebijakan air bersih di Kabupaten Bekasi masih memprioritaskan perumahan cluster dibandingkan ke perumahan domestik. Adapun alasannya disebabkan oleh: 1) Jarak permukiman ke saluran pipa air bersih jauh. Pemukiman di Kampung Kedungingin sampai saat ini belum terjangkau air bersih. Hal ini disebabkan oleh pipa saluran air bersih yang

berasal dari PDAM Tirta Bhagasasi lokasinya jauh dari Kampung Kedungringin, dan lokasi terdekat yang ada saluran pipa air bersihnya adalah Tambelang.; 2) Kemampuan untuk membayar layanan air bersih yang masih rendah. Masyarakat Kampung Kedungringin sebagian masih tergolong miskin. Hal ini dapat dilihat dari kemampuan mereka untuk mendapatkan layanan air bersih. Jangankan untuk mengadakan air bersih yang berasal dari PDAM, kemampuan untuk menggali sumur yang mereka miliki supaya lebih dalam sehingga bisa diperoleh air yang jernih pun tidak mampu. Hal ini kemudian yang menyebabkan air bersih belum bisa mengalir ke Kampung Kedungringin. Ditambah lagi PDAM Tirta Bhagasasi yang lebih memprioritaskan pemukiman cluster/kompleks karena kemampuan mereka membayar layanan air bersih lebih tinggi, maka aksesibilitas air bersih ke perumahan domestik masih rendah.

Adapun tantangan yang dihadapi PDAM Tirta Bhagasasi dalam menyediakan air bersih ke Kampung Kedungringin yakni terkait jarak Kedungringin jauh dengan Instalasi Pengolahan Air (IPA), minimnya modal yang dimiliki PDAM Tirta Bhagasasi karena dukungan dana selama ini banyak didukung pihak swasta daripada Pemerintah Daerah Bekasi, sumber air baku untuk pengolahan air PDAM Tirta Bhagasasi masih terbatas karena hanya mengandalkan Kalimalang. Dengan demikian, rendahnya aksesibilitas air bersih ke perumahan domestik di Kampung Kedungringin menunjukkan bahwa air bersih hanya dapat dinikmati oleh kalangan masyarakat yang mempunyai uang. Dengan demikian, diharapkan PDAM Tirta Bhagasasi lebih adil dan menjangkau semua lapisan masyarakat dalam menentukan kebijakan pengelolaan air bersih di Kabupaten Bekasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Barnes, J. (2009). Managing the Waters of Bath Country: The Politics of Water Scarcity in Syria. *Geopolitics*, 14(3), 510–530. <https://doi.org/10.1080/14650040802694117>
- Barry, M., & Hughes, J. M. (2008). Talking Dirty — The Politics of Clean Water and Sanitation. *New England Journal of Medicine*, 359(8), 784–787. <https://doi.org/10.1056/nejmp0804650>
- Bekasi, B. (2020). *Jumlah Penduduk Kecamatan Sukawangi menurut Jenis Kelamin dan Desa/Kelurahan*. . Bekasi: Badan Pusat Statistik.
- Endaryanta, E. (2007). *Politik Air di Indonesia: Penjarahan si Gedhang oleh Korporasi Aqua-Danone*. Yogyakarta: Laboratorium Jurusan Ilmu Pemerintahan.
- Herrera, V. (2017). *Water & Politics*. Mexico: UCONN.
- McCarl, B. A., & Reilly, J. M. (1999, August). Water and the agricultural climate change assessment: Issues from the standpoint of agricultural economists. In *Proceedings of American water resources association special conference on potential consequences of climate variability and change to water resources*.
- Mercer, K. L. (2018). The Politics in Water. *Journal - American Water Works Association*, 110(3), 2. <https://doi.org/10.1002/awwa.1026>
- Millington, N. (2018). Producing water scarcity in São Paulo, Brazil: The 2014–2015 water crisis and the binding politics of infrastructure. *Political Geography*, 65, 26–34. <https://doi.org/10.1016/j.polgeo.2018.04.007>

- Moleong, L. J. (2014). *Metodologi Penelitian Kualitatif [Edisi Revisi]*. Jakarta: Remaja Rosdakarya E.
- Rahmawati, R., & Firman, F. (2017). Analisis Impelementasi Kebijakan Aplikasi Qlue Di Wilayah Jakarta Utara. *ARISTO*, 5(2), 386 - 404. doi: <https://doi.org/10.24269/ars.v5i2.542>
- Sihotang, J. (2018). *Penuhi Cakupan Air Bersih, PDAM Lakukan Kerjasama Pihak Ketiga* . Retrieved from tirtabhagasasi.co.id: <https://tirtabhagasasi.co.id/penuhi-cakupan-air-bersih-pdam-lakukan-kerjasama-pihak-ketiga/>
- Stern, N. (2014). *The Economics of Climate Change: The Stern Review*. Cambridge University Press.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- United Nations Trust Fund for Human Security. (2009). *Human Security in Theory and Practice: An Overview of Human Security Concept and the United Nations Trust Fund for Human Security*. diakses pada 19 Januari 2017 http://www.un.org/humansecurity/sites/www.un.org.humansecurity/files/humansecurity_in_theory_and_practice_english.pdf
- United Nations Water. 2013. *Water Security & the Global Water Agenda: A UN-Water Analytical Brief*. diakses pada 16 Februari 2017 http://www.unwater.org/downloads/watersecurity_analyticalbrief.pdf



Kekuatan Dinasti Politik Aang Hamid Suganda Di Kabupaten Kuningan

Dina Fadiyah¹, Rahmi Kania Dewi²; Ayi Karyana¹

¹ Jurusan Ilmu Pemerintahan, Universitas Terbuka Jakarta, 15418, Jakarta-Indonesia

² Jurusan Ilmu Politik, Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta, 14350, Jakarta-Indonesia

Info Artikel

Dikirim: Mai 05, 2022

Diterima: Jul 15, 2022

Dipublikasi: Jul 31, 2022

Kata Kunci:

Dinasti Politik; Demokrasi; Pemilu;

Koresponden:

Dina Fadiyah

Jurusan Ilmu Pemerintahan,
Universitas Terbuka Jakarta

Email:

dinafadiyah@ecampus.ut.ac.id

Sitasi Cantuman:

Fadiyah, D., Dewi, R. K., & Karyana, A. (2022). Kekuatan Dinasti Politik Aang Hamid Suganda Di Kabupaten Kuningan. *Journal of Political Issues*, 4(1); 19-28. <https://doi.org/10.33019/jpi.v4i1.77>



DOI:

<https://doi.org/10.33019/jpi.v4i1.77>

Lisensi:



Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC- BY-NC-SA 4.0)



ABSTRAK

Abstract This study discusses the power of Aang Hamid Suganda's Political Dynasty in Kuningan Regency. This research is based on political dynasties that still exist in the era of democracy, even though democracy itself states that political dynasties are a bad system and are contrary to democracy. The purpose of this study is to understand how the formation of dynastic politics carried out by the family of Mr. Aang Hamid Suganda to his son. This research is motivated by his political journey which is so influential on the successor to the leadership taken over by his wife and children, making the success of his tenure as Regent of Kuningan calculated from 2003 to 2013. This study uses qualitative research methods, with a descriptive approach and literacy studies as well as interview results. The theoretical basis used in this research is the theory of democracy and political dynasties. The results of this study indicate that Aang Hamid Suganda has built political influence during his leadership, and earned the nickname "Aang Hotmix". This father of development in Kuningan has succeeded in creating a good image in Kuningan Regency, so that when his term of office ended and was replaced by his wife and then his son. The conclusion is that the political dynasty that occurred in Kuningan was the result of the previous leadership who succeeded in building a good image so that it had an impact on its successors.

Abstrak Penelitian ini membahas tentang Kekuatan Dinasti Politik Aang Hamid Suganda di Kabupaten Kuningan. Penelitian ini didasari oleh dinasti politik yang masih eksis di era demokrasi, padahal demokrasi sendiri menyebutkan bahwa dinasti politik itu sistem yang buruk dan bertolakbelakang dengan demokrasi. Tujuan penelitian ini untuk dapat memahami bagaimana terbentuknya politik dinasti yang dilakukan oleh keluarga Bapak Aang Hamid Suganda hingga anaknya. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh perjalanan politiknya yang begitu berpengaruh terhadap penerus kepemimpinan yang diambil alih oleh istri dan anaknya menjadikan kesuksesan dari masa jabatannya menjadi Bupati Kuningan dihitung dari tahun 2003 hingga 2013. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, dengan pendekatan deskriptif dan studi literasi serta hasil wawancara. Landasan teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori demokrasi dan dinasti politik. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Aang Hamid Suganda telah membangun pengaruh politik pada masa kepemimpinannya, dan mendapat julukan "Aang Hotmix". Bapak pembangunan di Kuningan ini telah sukses menciptakan citra baik di Kabupaten Kuningan, sehingga pada saat ia habis masa jabatannya dan digantikan oleh istri kemudian anaknya. Kesimpulannya adalah dinasti politik yang terjadi di Kuningan adalah hasil dari kepemimpinan sebelumnya yang berhasil membangun citra baik sehingga berdampak kepada penerusnya.

Tentang:

Dina Fadiyah menyelesaikan Studi Magister di Departemen Politik dan Pemerintahan Universitas Gadjah Mada pada tahun 2015. Saat ini penulis adalah dosen di Jurusan Ilmu Pemerintahan, Universitas Terbuka Jakarta.

Rahmi Kania Dewi menyelesaikan Studi Sarjana di Jurusan Ilmu Pemerintahan Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta pada tahun 2020.

Ayi Karyana menyelesaikan Studi Magister di Jurusan Ilmu Pemerintahan Universitas Padjadjaran pada tahun 2005. Saat ini penulis adalah dosen di Jurusan Ilmu Pemerintahan, Universitas Terbuka Jakarta.

PENDAHULUAN

Tulisan ini ingin membahas tentang dinasti politik, yang mana sering sekali diartikan dengan politik keluarga atau politik kekerabatan merupakan praktik politik yang kerap digunakan oleh pemerintahan lokal untuk memperkuat kekuasaannya. Padahal dinasti politik ini masih menunjukkan adanya feodalisme dan tradisi monarki yang mana berarti kekuasaan akan diatur oleh segelintir orang atau hanya para kaum elit saja dan ini menunjukan bahwa jauh dari demokrasi. Indonesia yang menganut sistem demokrasi harusnya menghadang praktik dinasti politik yang terjadi di Indonesia apalagi daerah, karena bisa saja praktik dinasti politik ini digunakan sebagai alat untuk melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme yang akan merugikan bangsa ini (Wasisto, 2013).

Dalam kasus Pemilukada di Indonesia melakukan kedua jenis pembentukan dinasti politik di setiap Daerah/Kotanya. Ada yang melakukan dalam jenis by design dengan penggantian kekuasaan oleh istri atau anaknya, dan by accident mencalonkan kerabatnya agar dapat menggantikannya untuk menjadi pemeimpin selanjutnya dengan tujuan mengekalkan kekuasaan di daerah/kota tersebut. (Wasisto, 2013). Seperti yang terjadi di Banten dengan dinasti politik Ratu Atut Chosiyah dengan sejumlah kerabatnya. Ratu Atut Chosiyah Gubernur Banten periode 2007-2012 misalnya, keluarganya setidaknya memiliki kekuasaan sebagai petinggi di Banten.

Sebetulnya masih banyak lagi kasus serupa mengenai dinasti politik yang ada di Indonesia, akan tetapi penulis akan memfokuskan satu kasus yang akan ditelitinya yaitu Dinasti Politik Aang Hamid Suganda sebagai mantan Bupati Kuningan Periode 2003-2013 yang mana saat masa jabatannya habis istri serta anaknya menggantikannya dibangku pemerintahan Kabupaten Kuningan. Aang Hamid suganda ini adalah Bupati Kuningan yang mulai menjabat tahun 2003 dan berhasil memenangkan lagi pada pemilihan bupati tahun 2008, maka dari itu ia mendapatkan kesempatan menjadi bupati salam 2 periode.

Selanjutnya, setelah Aang Hamid Suganda ini lengser dari jabatannya ia tidak segan membeberkan mengajukan istrinya untuk maju di pilbup, dengan perolehan suara mencapai 44,99 persen dan mengungguli raihan suara maka istri dari mantan Bupati Kuningan ini berhasil menggantikannya dan menduduki bangku bupati. Utje Ch Hamid Suganda nama yang dikenal sebagai pengganti Bupati sebelumnya yang akan menjabat dari tahun 2013-2018 (Tribunnews.com, 2013).

Akan tetapi pada tahun 2016 ibu Utje Ch Hamid Suganda meninggal dunia dan pada akhirnya masa jabatannya digantikan oleh wakilnya yaitu Bapak Acep Purnama. Setelah masa jabatannya habis Bapak Acep Purnama ini mencalonkan diri kembali dengan menggandeng anak terakhir dari mantan bupati Kuningan yaitu M. Ridho Suganda, wajah baru di Kuningan ini ternyata menarik banyak perhatian karena dirinya adalah generasi muda yang muncul untuk membangun Kota Kuningan. Ridho ini juga dikenal karena merupakan anak terakhir dari Bapak Aang yang sebelumnya adalah Bupati Kuningan, akan tetapi ternyata dirinya memiliki karakteristik tersendiri untuk mengambil hati masyarakat Kuningan yaitu dengan gencar bersosialisasi di media sosial dan lebih mendekatkan dirinya terhadap para generasi muda (Pikiranrakyat.com, 2018).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif yang mengumpulkan dan bekerja dengan data non-numerik dan yang berusaha untuk menafsirkan makna dari data ini yang membantu peneliti memahami kehidupan sosial melalui studi populasi atau tempat yang ditargetkan. Penelitian ini akan dilaksanakan melalui wawancara dengan informan peneliti yang sudah ditetapkan. Sumber data yang digunakan ada dua metode yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder (Sugiyono, 2016). Sumber data primer yang digunakan berupa

Dina Fadiyah, Rahmi Kania Dewi, Ayi Karyaana:

Kekuatan Dinasti Politik Aang Hamid Suganda Di Kabupaten Kuningan

wawancara dan pengambilan data sekunder dapat menggunakan dua cara, yaitu secara manual (studi pustaka, buku-buku, koran, majalah, dll) dan secara online (website, berita online, dll). Informan penelitian ini terdiri dari Wakil Bupati Kabupaten Kuningan, Ketua DPRD Kabupaten Kuningan, Wakil Ketua 1 Partai Golkar, Wakil Ketua 1 Partai Demokrat dan Kerabat dekat.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Aang Hamid Suganda

Aang Hamid Suganda adalah Bupati Kuningan Periode 2003-2013 dia menjabat menjadi Bupati sebanyak dua periode yaitu periode pertama pada tahun 2003-2008 dan periode kedua pada tahun 2008-2013. Dengan gaya kepemimpinan yang khas serta merakyat dan visioner semangat membangun pemerintahan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Good Corporate Governance. Gaya seperti itu memang sangat diperlukan untuk mengubah pelayanan pemerintahan yang seharusnya masyarakat terima. Meskipun tanpa publikasi yang gencar tetapi rakyat sangat merasakan perubahan yang besar (Ilmu Pengetahuan Dunia).

Dengan kinerja yang bagus yaitu dalam bidang perekonomian, pertanian, pariwisata dan pendidikan. Maka Bapak Aang ini telah memiliki kepercayaan dari rakyat dan menjadikannya kandidat unggul lalu memenangkan lagi Pemilihan Bupati tahun 2008-2013. Karena kesejahteraan masyarakat dan kepuasan masyarakat pada masa jabatannya, pak Aang ini berhasil memecahkan rekor yang bersejarah, karena selama Kabupaten Kuningan berdiri baru pak Aang saja yang menjabat 2 periode dalam memimpin.

“Sistem politik pada saat itu berubah, pak Aang pertama dan kedua itu berbeda. Karena yang pertama itu kan dia dipilih oleh dewan, dan yang kedua itu dipilih oleh masyarakat. Dan pada saat itu juga kan terjadinya perubahan sistem politik di daerah yang disebut otonomi daerah, selanjutnya karena pak Aang ini orang yang bisa membangun dan masyarakat juga bisa merasakan perubahan itu diiringi dengan sistem politik yang berubah ke pemilihan secara langsung pada saat tahun 2008. Kebetulan juga pak Aang pada saat itu ia dari partai Golkar diajak berkoalisi dengan kami partai Golkar dengan mengusungkan pak Momon Rochman untuk menjadi wakilnya. Ya beliau bisa dua kali ya karena dipilih dengan sistem politik yang berbeda, pertama dipilih oleh dprd dan yang kedua dipilih oleh rakyat. Karena pembangunan pak Aang ini sudah terasa dengan pendelegasian keuangan dari pusat ke daerah dengan otonomi daerah dampaknya terlihat dimana-mana maka masyarakat percaya untuk dia menjabat 2 periode.” (Hasil wawancara dengan Bapak Dani Nuryadi Wakil Ketua 1 Fraksi Golkar)

Gaya kepemimpinan merupakan cara pimpinan untuk mempengaruhi orang lain/bawahannya sedemikian rupa sehingga orang tersebut mau melakukan kehendak pemimpin untuk mencapai tujuan organisasi meskipun secara pribadi hal tersebut mungkin tidak disenangi. Terdapat tiga jenis perilaku kepemimpinan yang saling berbeda diantara para manajer, yaitu: perilaku berorientasi pada tugas (task oriented behavior), perilaku yang berorientasi pada hubungan (relationship oriented behavior), dan kepemimpinan partisipatif ([Ratnamiasih & Warenih, 2014](#)).

Utje Ch Hamid Suganda

Utje Ch Hamid Suganda ini adalah istri dari Bapak Aang yang maju pada Pemilihan Bupati tahun 2013, Pada pemilihan Bupati saat itu Ibu Utje sangat optimis dalam kemenangan pemilu karena ia memiliki visi misi yang berkaitan dan akan membangun masyarakat kecil di Kuningan. Dan ia pun menolak keras adanya Dinasti Politik karena ia adalah istri dari mantan Bupati Kuningan, menurutnya ia mencalonkan diri untuk menjadi Bupati Kuningan karena ada dukungan dari masyarakat bawah untuk meneruskan pembangunan yang dilakukan oleh Aang Hamid Suganda ([Tempo.co, 2013](#)).

“Memang Pak Aang juga sempat mendorong Ibu Utje untuk mencalonkan diri dalam pemilihan Bupati, dengan tujuan menyelesaikan pembangunan Pak Aang yang belum selesai”
(Hasil wawancara dengan Bapak Maman Kirman kerabat dekat Bapak Aang pada Agustus 2021)

Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kuningan nomor urut 3 Hj Utje Ch Hamid Suganda-H Acep Purnama (Utama), ditetapkan melalui rapat pleno Komisi Pemilihan Umum (KPU) kab. Kuningan sebagai pasangan yang memperoleh suara terbanyak dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati (pilbup) Kuningan dengan perolehan suara sebanyak 240.528. Namun, saksi dari tiga pasangan calon lainnya, menyatakan keberatan serta menolak terpilihnya pasangan Utama yang diusung PDIP, PBB, PKPI, PDK, PKPB, PAN, dan PPP tersebut. Melalui rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara pilbup Kuningan yang digelar KPU Kab. Kuningan, pasangan Utama mengungguli perolehan suara saingan terdekatnya, yakni pasangan nomor urut 1 H Momon Rochmana-HT Mamat Robby Suganda (Rochmat) dengan selisih 40.875 suara. Perseteruan ini berlanjut hingga menemukan isu bahwa pasangan calon nomor urut 3 ini melakukan kecurangan yaitu politik uang. Sidang pemeriksaan pendahuluan PPHU Kabupaten Kuningan – Perkara No. 136/PHPU. D-X/2013 - digelar Mahkamah Konstitusi (MK) pada Kamis (3/10) siang. Pemohon adalah Pasangan Calon No. Urut 1 Momon Rochmana dan Mamat Robby Suganda, mengajukan permohonan keberatan terhadap Keputusan KPU Kabupaten Kuningan (Termohon) tentang Penetapan Hasil Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kuningan. Menurut Pemohon, proses pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Kuningan 2013 berlangsung secara tidak jujur dan tidak adil dengan ditandai berbagai bentuk kecurangan yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif, yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Kuningan dan Pasangan Calon No. Urut 3 Utje CH Hamid Suganda dan Acep Purna (Pihak Terkait).

Akan tetapi pada saat sidang pleno ketika rekapitulasi hasil suara, tidak ditemukannya data politik uang tersebut. Sehingga tim lawan memberikan protes dan tidak terima atas keputusan KPU kabupaten Kuningan (Administrator, 2018).

“Pendapat saya, saya juga tidak bisa membenarkan karena isu-isu tersebut harus betul-betul diteliti dan dipahami dan dikaji. Terlepas dari politik uang dan pemanfaatan fasilitas APBD dan memanfaatkan PNS, ini menjadi dilema karena sistem politik kita yang menganut sistem politik pemilihan langsung itu banyak konsekuensinya salah satunya yaitu seperti itu dan sampai saat ini itu terjadi disetiap rezim manapun, karena wajarlah lah beliau kan istri Bupati yang melekat jika Bupati sedang kemana itu bisa jadi sangkaan bahwa bu Utje ini sedang melakukan kampanye, padahal ia hanya menemui suaminya saja. Kalo disebut memanfaatkan itu kan tidak boleh, karena PNS harus netral dan APBD harus digunakan untuk masyarakat, tetapi pada saat beliau melakukan kegiatan dan masyarakat berfikir itu bagus, ya itulah kelebihan incumbent dibandingkan calon yang lain. Dan kita juga tidak bisa menyalahkan bahwa itu salah, karena bagaimanapun ia adalah penggerak ibu-ibu PKK yang didorong oleh dinas dan suaminya maka menurut saya sah-sah saja.

Dan terkait money politik, selama pengawasannya tidak paripurna dan masyarakatnya belum melek tentang bahayanya money politik. Money politik itu akan dilakukan oleh siapa saja, karena itu termasuk instrument untuk memenangkan “kecurangan”, karena didunia demokrasi ini sulit untuk tidak melakukan money politik. Karena apa? Karena ada istilah money politik dan cosh politik, biasanya orang menilai jika tim dikasih ongkos jalan itu dibilang money politik, padahal tidak sebenarnya kan itu hanya pemikiran masyarakat yang masih baru terhadap sistem politik pemilihan langsung, karena Kuningan kan baru 3 kali melakukan pemilihan secara langsung ya masih jauh untuk bisa ideal.” (Hasil wawancara dengan Bapak Dani Nuryadi Wakil Ketua 1 Fraksi Golkar)

Dengan banyaknya konflik dan polemik yang terjadi pada saat pemilihan Bupati kuningan, tetap saja perolehan suara yang sengit antara pasangan calon 1 Momon dan Rahmat dengan pasangan calon 3 Utje dan Acep akhirnya dimenangkan oleh pasangan calon 3. Akan tetapi takdir berkata lain pada masa jabatannya di tahun 2016, ibu Utje Ch Suganda menutup usia karena penyakit. Dan mengharuskan wakilnya yaitu Bapak Acep Purnama menggantikan posisi menjadi Bupati Kuningan.

Mochamad Ridho Suganda

Mochammad Ridho Suganda adalah anak terakhir dari pasangan Aang Hamid Suganda dengan Utje Ch Suganda, sejak ia mencalonkan diri menjadi wakil Bupati periode 2018-2023 ia mulai gencar menjadi perbincangan public. Karena sebelumnya ia tidaklah dikenal oleh masyarakat Kuningan dan hanya sebatas tahu bahwa Ridho ini adalah anak dari mantan Bupati Kuningan.

Ridho ini adalah seorang aktivis di kota kelahirannya yaitu Bogor, dimana ia adalah seorang ketua DPD Komite Pemuda Nasional (KNPI) kota Bogor. Selain itu ia juga menjadi ketua Karang Taruna Kota Bogor periode 2016-2021. Meskipun Ridho ini lebih aktif di Bogor, tetapi ia juga cukup aktif di Kuningan dalam bidang olahraga dan juga meskipun tidak terjun langsung melihat bagaimana kondisi Kuningan ia sering diajak oleh kedua orang tuanya dan mempelajari Kuningan (Pikiranrakyat.com, 2018).

Selain dari bidang olah raga pada saat peneliti mengajak Pak Ridho ini berbincang ia juga mengatakan bahwa:

“Flashback beberapa waktu ke belakang dalam fase perkembangan diri sampai saya diberikan peluang oleh masyarakat Kuningan dalam generasi muda yang memimpin. Karena anak muda memimpin di pemerintahan ini bisa dihitung pakai jari, kesempatannya juga hanya sedikit yang diberikan kepada para pemuda. Generasi muda kini hanya dijadikan alat untuk berpolitik.

Kalo ada politisi yang ingin calon-calon dari generasi muda dan ingin merangkul generasi muda, tanpa melibatkan pemuda itu percuma. Karena bagaimana pun generasi muda bisa diandalkan dan jangan dilihat dari usia untuk melakukan aktifitas perpolitikan, siapa tau generasi muda memang punya strategi dan kemampuan yang lebih bisa membuat daerah maju dan sebagainya.” (Hasil wawancara Bapak Moch. Ridho Suganda wakil Bupati Kuningan pada Februari 2021)

Adapula strategi Pak Ridho dalam kampanye pada saat Pilkada 2018 lalu. Pembahasan mengenai strategi politik yang dilakukan oleh keluarga Aang Hamid Suganda hingga anaknya Moch. Ridho Suganda dilihat dari perjalanan politiknya memang saling berkaitan satu sama lain. Dalam hal ini perlu diketahui terlebih dahulu apa itu strategi? Strategi merupakan suatu hal yang sangat dibutuhkan dalam manajemen politik guna untuk memenangkan pemilu atau pilkada, strategi dapat berupa rencana yang dibuat oleh seorang atau kelompok yang dilakukan melalui tindakan untuk mencapai tujuan dan rencana yang telah disusun ([Putri & Indah, 2017](#)).

“Iya dari proses saya menjadi wakil Bupati pasti semuanya berproses, tidak mungkin tiba-tiba saya terpilih menjadi wakil Bupati seperti sekarang. Prosesnya pertama saya sebelum ke kabupaten Kuningan sangat aktif di organisasi kepemudaan. Saya menjadi ketua KNPI di Kota Bogor, saya menjadi ketua Karang Taruna di Kota Bogor dan sekarang menjabat sebagai Koordinator wilayah tiga di Provinsi Jawa Barat, saya juga aktif di partai dan saya juga adalah pengusaha dan juga saya melakukan kegiatan-kegiatan sosial sebelum saya datang ke Kabupaten Kuningan.

Dan pada prinsipnya saya datang ke Kuningan ingin meneruskan perjalanan yang telah dilakukan oleh pendahulu dan saya ingin meneruskan perjalanan pembangunan yang telah dilakukan dan mengabdikan ke masyarakat.” (Hasil wawancara Bapak Moch. Ridho Suganda Wakil Bupati Kabupaten Kuningan pada Februari 2021)

Penuturan diatas adalah bagaimana awal perjalanan Bapak Ridho sendiri, hingga pada saat itu ia memiliki semangat dan visi untuk membangun Kabupaten Kuningan. Tidak bisa dipungkiri keaktifannya dalam partai membuat dirinya mendapatkan kepercayaan dari partai untuk lanjut ke tahap seleksi untuk menentukan apakah ia layak atau tidak untuk mencalonkan diri di Pemilu Bupati Kabupaten Kuningan tahun 2018.

“Lalu saya juga melakukan seleksi dalam pemilihan Bupati, setelah selesai akhirnya saya memenangkan kedudukan dan dipasangkan dengan Bapak Acep. Lalu saya dengan beliau melakukan sosialisasi terhadap masyarakat selama 4 bulan dan Alhamdulillah masyarakat Kuningan memberi kepercayaan kepada kami untuk memimpin Kabupaten Kuningan dari 2018 hingga 2023 nanti.” (Hasil wawancara Bapak Moch. Ridho Suganda Wakil Bupati Kabupaten Kuningan pada Februari 2021)

Memang keunggulan yang dimiliki Bapak Ridho ini bisa membuatnya menjadi layak untuk maju dalam Pemilu Bupati tahun 2018. Apalagi ia adalah pasangan calonnya pak Acep

yang mana tingkat ketertarikan dari masyarakat itu masih tinggi, dan dianggap beliau membawa perubahan dari segi ekonomi. Karena jiwa mudanya dan semangat untuk membangunnnya ini yang menjadi ciri khas dari seorang Bapak Ridho, selain itu keaktifannya dalam kepemudaan ia bawa sebagai strategi politik pendekatan kepada masyarakat Kabupaten Kuningan. Selain melalui bidang olahraga ia juga sering mengajak generasi muda untuk terus berkembang melalui media sosialnya.

“Strategi yang saya lakukan untuk mengambil kepercayaan masyarakat, yaitu saya menjadikan generasi muda sebagai patokan untuk saya kembangkan. Dengan menjadikan generasi muda lebih kreatif dan inovatif agar generasi muda bisa berkembang di daerahnya sendiri tidak melulu merantau.” (Hasil wawancara Bapak Moch. Ridho Suganda Wakil Bupati Kuningan pada Februari 2021)

Selanjutnya, mengenai majunya Bapak Ridho pada Pemilihan Bupati pada saat itu ada beberapa faktor lainnya yang membuat ia masuk kedalam kandidat Bakal Calon Pemimpin antara lain adalah partai PDI-P dan pihak mereka mengatakan bahwa memang mereka mengusung Bapak Ridho ini masih ada kaitannya bahwa beliau adalah anak dari mantan Bupati yaitu Bapak Aang dan Ibu Utje. Terlebih dari keunggulan yang Bapak Ridho miliki yaitu jiwa muda dan semangat tinggi untuk menjadi seorang pemimpin, partai mengakui bahwa Pak Ridho ini memang cocok untuk dijadikan calon dalam pemilihan umum Bupati Kabupaten Kuningan tahun 2018.

“Persoalan dari diusungnya Pak Ridho dilihat dari anak Pak Aang dan Bu Utje iya. Tapi saya menolak jika disebutkan itu dinasti politik. Karena kemampuan orang itu bukan dari keturunan, meskipun memang disatu sisi jika satu rumpun keluarga berkuasa didaerah itu adalah dinasti politik. Tapi dalam hal Pak Ridho ini partai mengusungkan beliau sebagai wakil bupati dengan pasangan Pak Aceh, karena Pak Ridho ini adalah generasi muda yang mempunyai semangat yang tinggi”. (Hasil wawancara dengan Bapak Nuzul Rachdy Ketua DPRD Kabupaten Kuningan dari fraksi PDI-P pada Agustus 2021)

Dalam tulisannya Ikrar Nusa Bakti mengemukakan analisisnya tentang faktor-faktor penyebab munculnya fenomena adanya keluarga bupati yang maju untuk memperebutkan jabatan publik di daerah. Pertama, para bupati yang masih menjabat dianggap berhasil oleh masyarakat setempat, seperti dalam kasus di Kabupaten Kuningan, namun bupati tersebut tidak dapat ikut pilkada karena masa jabatannya sudah dua kali. Oleh karena itu, masyarakat menginginkan agar istri bupati maju dalam pilkada dengan asumsi bila keluarga mantan bupati menang, berarti mantan bupati akan berada di belakang keluarganya sebagai “sang penuntun” (Susanti, 2017).

Tetapi dalam konteks dinasti politik Aang Hamid Suganda hingga anaknya, menurut penuturan warga itu tidak berdampak negative terhadap pelayanan masyarakatnya. Tapi jika dilihat dari kekuasaannya mereka menempatkan orang yang pro terhadap mereka ditempat yang enak, seperti di pemda hingga di DPRD. Setelah dicari tahu lebih lanjut ternyata memang keluarga ini sudah memiliki jejaring kekerabatan dari kekuasaan atasnya yaitu di Provinsi Jawa Barat. Dilansir dari artikel ini menyebutkan bahwa Klan Effendi dimulai oleh Yusuf Effendi yang menikahi Djuhriah. Pasangan itu dikaruniai beberapa anak yang di antaranya menguasai politik Kota Bogor, Kabupaten Bogor, dan Kabupaten Kuningan sejak tahun 1998. Anak-anaknya itu antara lain Rahayu Effendi, Agus Utara Effendi, dan Utje Choeriah Hamid Effendi.

Rahayu Effendi adalah artis senior yang menikahi Tammy Effendi, anak dari Roestam Effendi-sastrawan dan tokoh pergerakan kemerdekaan Indonesia. Pasangan ini dikaruniai anak bernama Dede Yusuf Macan Effendi. Dede Yusuf menjabat wakil gubernur Jawa Barat 2008-2013. Agus Utara Effendi adalah Bupati Bogor selama dua periode dari 1998-2008. Ia

menikahi Sri Indratini. Pasangan ini dikaruniai anak bernama Fitri Putra Nugraha. Nungki, panggilan akrab Fitri, adalah calon bupati Kabupaten Bogor pada Pilkada 2018 ini.

Sementara Utje Choeriah Effendi (mengganti nama menjadi Utje Choeriah Hamid Suganda) membangun dinasti di Kabupaten Kuningan. Utje adalah Bupati Kuningan dari 2013 hingga kematiannya pada 2016. Sebelum Utje, Bupati Kuningan dijabat oleh suaminya Aang Hamid Suganda. Aang menjabat Bupati selama dua periode dari 2003-2013. Pasangan Utje dan Aang mempunyai anak bernama Moch. Ridho Suganda calon wakil bupati kabupaten Kuningan pada Pilkada 2018.

Anaknya yang lain, Erik Irawan Suganda, juga aktif di perpolitikan Bogor. Erik menjadi calon walikota Bogor 2008-2013. Ia juga masuk dalam bursa bakal calon walikota Bogor di PDIP pada Pilkada 2018. Pendek kata, calon di Pilkada Bogor (Nungki), Kuningan (Ridho), serta wakil gubernur Jawa Barat 2008-2013 (Dede Yusuf) mempunyai hubungan darah sepupu (Rumahpemilu.org, 2018).

“Menurut saya jika niat dan tujuannya baik tidak masalah ya meskipun itu dinasti politik. Karena menurut saya ujung-ujungnya untuk mensejahterakan masyarakat dan tidak adanya niat pemberhentian regenerasi politik.

Yang penting kita berpolitik itu niatnya apa, jika memang niatnya untuk kepentingan pribadi itukan memang kesalahan besar ya. tetapi dari awal sampai saat ini visi misi, perjalanan, pembangunannya juga baik. Meskipun tidak 100% tercapai tetapi ada wujud nyata.” (Hasil Wawancara dengan Bapak Jajang Wakil Ketua 1 Fraksi Demokrat)

Berkaca dari tulisan diatas bagaimana pun ini sudah menyalahi demokrasi yang ada di Indonesia, antara lain karena kontrol terhadap pemerintah yang diperlukan dalam demokrasi, misalnya checks and balances, menjadi lemah. Dinasti politik dalam dunia politik modern dikenal sebagai elit politik yang berbasiskan pertalian darah atau perkawinan sehingga sebageian pengamat politik menyebutnya sebagai oligarki politik. Dalam konteks Indonesia, kelompok elit adalah kelompok yang memiliki kemampuan untuk mempengaruhi proses pembuatan keputusan politik. Sehingga mereka relatif mudah menjangkau kekuasaan atau bertarung memperebutkan kekuasaan. Menguatnya jaringan politik yang dibangun oleh dinasti politik berdasarkan kedekatan politik keluarga menyebabkan tertutupnya rekrutmen politik bagi orang-orang di luar dinasti ([Haris, 2015](#)). Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Turner, bahwa suatu jaringan mempunyai pengaruh penting terhadap dinamika transisi kekuasaan politik yang bisa berdampak terhadap tertutupnya rekrutmen politik ([Susanti, 2017](#)).

Partai Menjadi Media Dinasti Politik

Partai politik mempunyai posisi (status) dan peranan (role) yang sangat penting dalam setiap sistem demokrasi. Partai politik memainkan peran penghubung yang sangat strategis antara proses-proses pemerintahan dengan warga negara. Bahkan banyak yang berpendapat bahwa partai politiklah yang sebetulnya menentukan warna demokrasi di suatu negara, seperti yang dikatakan schattscheider, *“political parties created democracy”*. Arti penting partai politik dalam penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis adalah bahwa kedaulatan rakyat hanya mungkin diwujudkan dengan perantara partai politik. Akan tetapi dibalik itu semua partai politik yang seharusnya dapat memainkan peran penting bagi kaderisasi pemimpin. Karena salah satu fungsi partai politik adalah melakukan rekrutmen calon pemimpin untuk seluruh tingkatan, mulai dari tingkat desa, bupati dan wali kota, gubernur, hingga presiden. Kepemimpinan bangsa ini membutuhkan sosok yang memiliki integritas dalam membangun negeri, bukan mereka yang menjadikan kekuasaan sebagai tujuan. Kepemimpinan adalah isu abadi manusia dan kemanusiaan, karena pemimpinlah yang pada akhirnya akan menentukan apakah sebuah bangsa menjadi besar atau kerdil. Bahkan dalam pemahaman umum, faktor kepemimpinan juga merupakan faktor penentu utama kesejahteraan dan kemakmuran rakyat suatu negara. Setiap partai politik tidak dapat mengusung calon kepala daerah dari kader partainya masing-masing sehingga partai politik harus melakukan koalisi dengan harapan

dapat memenangkan pasangan calon yang diusung. Dengan pertimbangan kesamaan landasan, visi-misi, platform, dan program kerja, supaya mencapai tujuan bersama untuk kepentingan pemenangan pemilihan umum legislatif dan eksekutif. Dengan begitu harus adanya reformasi internal dalam tubuh partai politik agar tidak memberikan celah apapun bagi masuknya perilaku pragmatis berkaitan dengan fungsi kader sebagai calon kepala daerah, dengan upaya menghasilkan pemimpin yang secara kompetensi dan integritas dapat dipertanggungjawabkan, maka partai politik harus mengedepankan proses uji kelayakan dan kepatutan berbasis visi, program, etika dan data. Guna terjaminnya pemimpin yang berkualitas dan bebas korupsi.

Namun, setelah berjalannya Pilkada di Indonesia tetap saja pemerintahan aras lokal masih banyak dikuasai oleh segelintir elit politik dan membuat tujuan pemerintahan ideal sulit untuk tercapai. Karena pertama, partisipasi masyarakat masih terkalahkan oleh elit politik. Hal ini dapat diperhatikan dari fakta-fakta bahwa calon ini adalah pilihan partai politik. Seperti halnya Pilkada Bupati di Kuningan pada tahun 2018, partai politik mengusung anak dari mantan Bupati untuk menjadi Wakil Bupati.

“Pilkada itu kan merupakan dwi tunggal, jadi tidak bisa masing-masing. Nah di usungnya Pak Acep Purnama dan Pak Ridho ini adalah hasil penjarangan dan penyaringan atau Bahasa lainnya adalah seleksi dari partai. Dari sekian banyak calon muncullah nama Pak Ridho. Pertama kenapa partai memilih Pak Acep, karena ia adalah seorang yang incumbent, kemudian dipasangkan dengan Pak Ridho. Kenapa partai memilih Pak Ridho, karena Pak Ridho ini adalah generasi muda, generasi millennial. Karena kita ingin mengkolaborasikan kader yang senior dengan yang junior.

Sekali lagi kenapa partai memilih Pak Ridho sebagai pasangan pak acep, ya karena dia adalah generasi muda, punya jiwa muda dan punya visi baik untuk kedepannya. Lagipula ia adalah anak dari mantan Bupati kita yaitu Bapak Aang dan Ibu Utje”.

(Hasil wawancara dengan Bapak Nuzul Rachdy ketua DPRD Kabupaten Kuningan pada Agustus 2021)

Meskipun menurut Bapak Nuzul ini dipilihnya atau diusungnya Bapak Ridho dalam pencalonan Bupati dan Wakil Bupati itu atas keputusan partai, dengan menyisipkan kata-kata karena beliau adalah anak dari mantan Bupati, menjadikan kesan yang mencerminkan bahwa kekuasaan Bapak Aang di Kuningan ini sangat berpengaruh. Apalagi tahu bahwa Bapak Ridho ini adalah orang baru yang belum mengerti perpolitikan di Kuningan, harusnya partai lebih kompeten dalam perekrutan, karena bagaimanapun jika seorang pemimpin belum tahu seluk beluknya suatu daerah itu akan membuat banyak konflik, contohnya saja seperti perbedaan pendapat.

“Sebenarnya apapun partainya pasti mementingkan kemampuan yang lebih matang untuk diusungkan. Dalam bahasan ini memang ada kecenderungan partai dalam mengusungkan calon, karena memang pada masa jabatannya pak Aang inikan bisa dibilang berhasil maka dari itu partai juga ikut berdampak.”

(Hasil Wawancara dengan Bapak Jajang Wakil Ketua 1 Fraksi Demokrat)

Tampaknya potensial dapat membahayakan penyelenggaraan governance pemerintahan daerah. Hal ini disebabkan oleh banyaknya keburukan dan kelemahan tatanan politik yang diisi oleh kekerabatan maupun dinasti politik tertentu. Pertama, karena sulitnya kritik, pengawasan, maupun mekanisme checks and balances untuk dapat berjalan. Fakta empiris menunjukkan bahwa dinasti politik hanya mengutamakan kekerabatan, dan cenderung mengambil kebijakan yang menguntungkan pihak dinasti keluarganya. Kedua, dengan bertumbuhnya politik kekerabatan, maka playing field juga akan semakin timpang karena politik kekerabatan sudah dapat mengakumulasi pengaruh, kekayaan, penguasaan terhadap wilayah, maupun kontrol ekonomi tertentu akan lebih mungkin memenangkan kontestasi politik, dibandingkan calon lain yang sumber dayanya masih terbatas dan hanya mengandalkan kekuatan harapan. Ketiga, menguatnya politik kekerabatan merupakan

Dina Fadiyah, Rahmi Kania Dewi, Ayi Karyaana:

Kekuatan Dinasti Politik Aang Hamid Suganda Di Kabupaten Kuningan

indikasi dari memburuknya institusionalisasi kepartaian pada umumnya, dan melemahnya kemampuan rekrutmen dan kaderisasi partai politik pada khususnya. Keempat, di tengah sistem kontestasi yang semakin individualistis, maka peran parpol menjadi semakin berkurang, dan kekuatan individu para kandidat menjadi salah satu determinan kemenangan dalam perebutan jabatan-jabatan politik. Politik kekerabatan menjadi pilihan yang menarik bagi parpol untuk memenangkan posisi-posisi politik di daerah karena adanya keunggulan-keunggulan elektoral yang nyata dari mereka ini, seperti popularitas, kekuatan sumber daya finansial, serta kemampuan mobilisasi massa melalui pengaruh tokoh kekerabatan politik yang sedang menjabat. Partai politik tampaknya lebih mementingkan kemenangan, dan kurang memikirkan efektivitas kekuasaan dalam jangka menengah-panjang, sehingga ketidakwajaran maupun absurditas dukungan politik pun seringkali diambil oleh partai politik-partai politik besar demi terjaminnya kemenangan dalam pemilihan kepala daerah.

Lebih lanjut, politik kekerabatan juga akan mempengaruhi pola rekrutmen partai politik di Indonesia yang lebih mengutamakan kandidat politik yang memiliki sumber daya ekonomi. Tidak hanya sebatas karismatik semata, tetapi kemampuan keuangan menjadi pertimbangan utama para partai politik. Sehingga praktik ini akan membuat seorang kandidat politik harus mampu memberikan sumbangan pendanaan kepada partai agar bisa direkrut menjadi figur dalam setiap kontestasi. Indikasi inilah bisa melahirkan fenomena mahar politik yang mana kandidat politik dalam proses rekrutmen tidak lagi berdasarkan rekam jejak tetapi berdasarkan besaran sumbangan mahar politik. Bahkan, kader partai yang menghidupkan partai melalui politik gagasan dengan rekam jejak yang baik, dinilai bukan pemilik partai. Lebih ironisnya para kader partai yang selalu mengedepankan politik gagasan dinilai sebagai kader pelengkap tanpa bisa mempengaruhi dalam proses kandidasi. Bahkan, para kader partai ini tidak memiliki hak dan kewajiban untuk memiliki partai politik secara bersama-sama. Akibatnya, praktik mahar politik seringkali membuat kader organik secara tidak langsung akan tersingkir (Sudaryana, 2017).

SIMPULAN

Dinasti politik di Indonesia sudah berjalan pada saat kemerdekaan dan sudah menjadi buah bibir dikhalayak banyak orang karena melenceng dari demokrasi yang seharusnya menjadi landasan perpolitikan di Indonesia. Namun bagaimana pun dinasti politik itu selalu dianggap sebagai system politik yang buruk, karena didalam pemerintahan dan yang menduduki bangku kekuasaan hanya segelintir elit yang masih mempunyai hubungan kekerabatan. Ini menjadikan suatu peluang bagi masyarakat untuk mencalonkan diri untuk menjadi pemimpin itu sangat kecil dan bisa disebut tidak adanya regenerasi baru untuk kepemimpinan suatu negara ataupun daerah. Selanjutnya, dinasti politik ini bisa saja dijadikan sebagai alat untuk melakukan suatu tindakan yang merugikan masyarakat, daerah dan negara sekaligus. Karena memberikan banyak peluang bagi para pemimpin yang memang gila akan kekuasaan dan kekayaan, selain akan menimbulkan otoriter dalam pemerintah juga kerap kali timbul masalah Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).

Dalam pembahasan ini ditemukan memang adanya politik kekerabatan atau politik kekeluargaan yang dilakukan oleh Keluarga Suganda di Kabupaten Kuningan, akan tetapi dalam pelaksanaannya tidak adanya dampak negative atau pelanggaran Undang-Undang. Dalam penelitian ini juga menemukan hasil bahwa politik kekeluargaan di Kabupaten Kuningan sengaja dibentuk oleh partainya, karena hasil yang peneliti dapat dari wawancara Bapak Aang berhasil membuat rating partai baik dan ini juga dimanfaatkan oleh partai dan menjadikan Kabupaten Kuningan berbasis partai PDI-P.

DAFTAR PUSTAKA

- Administrator. (2018). Pleno KPU Menetapkan Suara Terbanyak Diperoleh Pasangan Utama. Diambil dari <https://www.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-01158031/pleno-kpu-menetapkan-suara-terbanyak-diperoleh-pasangan-utama>
- Ratnamiasih, I., & Warenih, W. (2014). Pengaruh Kepemimpinan Transformasional dan Transaksional pada Kinerja Pegawai Bappeda Kota Bandung. *TRIKONOMIKA*, 13(2), 119. <https://doi.org/10.23969/trikonomika.v13i2.607>
- Pikiranrakyat.com. 2018. "M.Ridho Suganda Siap Teruskan Jejak Kedua Orangtuanya". 6 Februari. <https://www.pikiran-rakyat.com/jawa-barat/amp/pr-01293102/m-ridho-suganda-siap-teruskan-jejak-kedua-orangtuanya-418961>
- Putri, A., & Indah. (2017). *Strategi Politik Perempuan Caleg Sumatra Barat Dalam Pemilu*. Moral and Civic Education.
- Rumahpemilu.org. 2018. "Sengkarut Politik Keekerabatan pada Pilkada 2018 di daerah Jawa Barat". 13 Maret. <https://rumahpemilu.org/sengkarut-politik-keekerabatan-pada-pilkada-2018-di-daerah-jawa-barat/>
- Sudaryana, B. (2017). *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Grup Penerbitan CV Budi Utama.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Susanti, M. H. (2017). *Dinasti Politik dalam Pilkada di Indonesia*. Universitas Negeri Semarang.
- Tempo.co. (2013). Momon Unggul Sementara di Pilkada Kuningan. Diambil dari <https://nasional.tempo.co/read/513525/momon-unggul-sementara-di-pilkada-kuningan/full&view=ok>.
- Tribunnews.com. 2013. "Istri Bupati Kuningan Gantikan Jabatan Suaminya". 3 Desember. <https://www.tribunnews.com/regional/2013/12/03/istri-bupati-kuningan-gantikan-jabatan-suaminya>
- Wasisto, R. D. (2013). *Revivalisme Kekuatan Familisme : Dinasti Politik di Aras Lokal*. Sosiologi Masyarakat.



Pemilu dan COVID-19 di Indonesia: Partisipasi Pemilih dalam Pilkada Serentak 2020

Samsul Ode¹, Benediktus Dalupe¹, Surya Yudha Regif², Dejehave Al Jannah¹

¹Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta, 14350, Jakarta-Indonesia

²Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Timor, 85613 Timor Tengah Utara-Indonesia

Info Artikel

Dikirim: Apr 09, 2022

Diterima: Jul 15, 2022

Dipublikasi: Jul 31, 2022

Kata Kunci:

COVID-19; Regional Head Election 2020; Voter Participation;

Koresponden:

Samsul Ode

Jurusan Ilmu Pemerintahan,
Universitas 17 Agustus 1945
Jakarta

Email:

samsul.ode@uta45jakarta.ac.id

Sitasi Cantuman:

Ode, S., Dalupe, B., Regif, S. Y., & Jannah, D. A. (2022). Pemilu dan COVID-19 di Indonesia: Partisipasi Pemilih dalam Pilkada Serentak 2020. *Journal of Political Issues*, 4(1); 29-41. <https://doi.org/10.33019/jpi.v4i1.74>



DOI:

<https://doi.org/10.33019/jpi.v4i1.74>

Lisensi:



Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International
(CC-BY-NC-SA 4.0)



ABSTRAK

Abstract The rise of 2020 regional electoral participation in the middle of Covid-19 is a continuation of the participation stability trend in the Indonesia election. This increment is in contrast to the democratic condition in Indonesia, which is deteriorating. The rise of participation is not affected by the actual conditions of COVID-19, it's occurred in areas with a high number of Covid-19 cases. Many electoral organizers and candidates have reportedly been exposed to coronavirus. The public perception improvement of regional electoral implementation and trust to the government achievement to handle pandemics support the rise of participation. But perception is not a single explanation. The reinforcing factors at a local level are a strong explanation for this. the different variant levels of participation in each region are determined by the intensity of competition and local political issues. This is closely related to political mobilization, voter character, and the rise of money politics. This research shows the failure of a thesis that high participation is linear with the level of democracy quality. The models of voting behavior also fail to explain why voter enthusiasm increases when economic conditions worsened due to the pandemic.

Abstrak Peningkatan partisipasi dalam pilkada serentak 2020 di tengah bahaya Covid-19 merupakan kelanjutan dari pada tren partisipasi yang stabil dalam pemilu di Indonesia. Peningkatan ini bertolak belakang dengan kondisi demokrasi di Indonesia yang justru sedang memburuk. Peningkatan ini tidak dipengaruhi oleh kondisi perkembangan Covid-19 yang sesungguhnya. Peningkatan justru terjadi di daerah-daerah dengan jumlah kasus Covid-19 yang tinggi. Banyak penyelenggara pemilu dan kandidat dilaporkan telah terpapar virus. Membaiknya persepsi publik terhadap pelaksanaan pilkada dan kepercayaan pada pemerintah dalam penanganan pandemi mendukung meningkatnya partisipasi. Tetapi persepsi bukanlah penjelasan tunggal. Faktor-faktor yang menguat di tingkat lokal adalah penjelasan yang kuat untuk hal ini. Varian tingkat partisipasi yang berbeda-beda pada tiap daerah ditentukan oleh intensitas kompetisi dan isu politik lokal yang berkembang. Hal ini terkait erat dengan mobilisasi politik, karakter pemilih, dan maraknya politik uang. Riset ini menunjukkan gagalnya tesis linearitas partisipasi yang tinggi dengan tingkat kualitas demokrasi. Model perilaku pemilih juga gagal menjelaskan mengapa di saat kondisi ekonomi memburuk akibat pandemi, antusiasme pemilih justru meningkat.

Tentang:

Samsul Ode, menyelesaikan studi S-2 di Magister Ilmu Politik Universitas Diponegoro pada tahun 2015, saat ini bekerja sebagai Dosen di Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta.

Benediktus Dalupe, menyelesaikan studi S-2 di Magister Ilmu Politik Universitas Indonesia pada tahun 2019, saat ini bekerja sebagai Dosen di Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta.

Surya Yudha Regif, menyelesaikan studi S-2 di Magister Ilmu Politik Universitas Diponegoro pada tahun 2015, saat ini bekerja sebagai Dosen di Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Timor.

Dejehave Al Jannah, menyelesaikan studi S-2 di Magister Ilmu Politik dan Pemerintahan, Universitas Gajah Mada padatahun 2021, saat ini bekerja sebagai Dosen di Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta.

PENDAHULUAN

Artikel ini membahas pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak tahun 2020 di tengah meningkatnya Covid-19 di Indonesia. Partisipasi pemilih yang justru meningkat di tengah bahaya penularan wabah menarik untuk dijelaskan. Penyelenggaraan pemilihan umum di tengah situasi pandemik melahirkan dua hal krusial yang dipertaruhkan negara yaitu kredibilitas dan legitimasi pemilu pada satu sisi, dan keselamatan publik pada sisi yang lain.

Penyebaran virus Covid-19 tidak saja menyediakan ancaman terbesar di bidang kesehatan publik. Kondisi ini juga telah memicu krisis ekonomi. Pemerintah Indonesia menanggung dilema yang besar. Membatasi warganya untuk tinggal di rumah, tetapi tidak sanggup menanggung biaya sosial dan ekonomi yang diakibatkannya. Di tengah upaya pembatasan pemerintah tetap menyelenggarakan Pilkada serentak tahun 2020. Kebijakan ini telah ditentang oleh para ahli wabah dan kalangan masyarakat sipil ([Galih, 2020](#); [Nathaniel & Amali, 2020](#)).

Pemerintah beralasan bahwa tidak ada yang dapat memastikan kapan pandemi akan berakhir meskipun demikian pembatasan (restriction) atau penguncian (lockdown) diterapkan sebagai kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang memiliki implikasi biaya sosial dan ekonomi pilkada harus tetap dilaksanakan demi menjamin hak konstitusional warga ([CNNIndonesia, 2020](#)). Ikatan Dokter Indonesia (IDI) telah mewanti-wanti siklus pilkada yang tengah berlangsung mengingat banyaknya pelanggaran protokol kesehatan.

Pilkada serentak tahun 2020 dilaksanakan di 9 Provinsi, 37 Kota dan 224 Kabupaten. Pemungutan suara akan terjadi di 309 kabupaten/kota dengan jumlah daftar pemilih tetap (DPT) sebanyak 100.359.152 juta. Ancaman penularan virus Covid-19 terkait pilkada tidak saja telah menysar pemilih, tetapi juga penyelenggara dan kandidat. Meskipun demikian partisipasi pemilih pada pilkada 9 Desember 2020 sebesar 76,13 persen. Angka ini hampir mencapai target KPU sebesar 77,5 persen. partisipasi ini meningkat sekitar 7 persen dibanding pilkada serentak pada 2015 sebesar 69,02 persen ([Meiliana, 2020](#)).

Peningkatan ini menarik untuk dianalisis di tengah situasi darurat kesehatan publik. Bila tidak ada pandemi, peningkatan partisipasi pemilih dalam pemilu di Indonesia bukanlah hal yang luar biasa. Sejak pilkada serentak tahun 2015, partisipasi pemilih cenderung meningkat. Apalagi bila dibandingkan dengan pemilu nasional secara umum dalam 15 tahun terakhir. Pada Pilkada serentak 2015 tingkat partisipasi pemilih hamper mencapai 70 persen. Angka itu naik pada Pilkada serentak 2017 yakni 74,2 persen, meski kemudian turun sedikit pada 2018, yakni 73,24 persen. Kecenderungan meningkatnya partisipasi pemilih juga terjadi dalam pemilu legislatif dan presiden. Partisipasi pada pemilu 2009 yaitu pileg 70,7 % dan pilres 71,7 %. Pada pemilu 2014 pileg 75,2 % dan pilres 70,9 % dan pada pemilu 2019 ketika pileg dan pilpres disatukan, partisipasi meningkat menjadi 81%.

Data IDEA Internasional menunjukkan sampai 11 November 2020 mencatat pemilu nasional terjadi di 56 negara pada masa pandemi Covid-19. Dari 56 negara tersebut hanya 19 negara mengalami kenaikan partisipasi pemilih. Selain itu terdapat 22 negara yang menysarakan pemilu sub-nasional (lokal). Hanya lima negara diantaranya mengalami peningkatan partisipasi ([idea.int, 2020](#)). Meningkatnya partisipasi pemilih dalam pemilu sering dikaitkan dengan membaiknya demokrasi dan meningkatnya kepercayaan pemilih para institusi politik.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian penggabungan kuantitatif dan kualitatif. Dengan menggabungkan data kualitatif dan kuantitatif, penelitian ini berupaya mencari penjelasan yang memadai tentang meningkatnya partisipasi dalam pilkada serentak 2020 di tengah bahaya COVID-19. Dengan pendekatan komparatif dan eksploratif, riset ini akan

Samsul Ode, Benediktus Dalupe, Surya Yudha Regif, Dejhawe Al Jannah:

Pemilu dan COVID-19 di Indonesia: Partisipasi Pemilih dalam Pilkada Serentak 2020

menjelaskan pengaruh dari pada faktor-faktor yang selama ini diyakini mempengaruhi partisipasi pemilih . Kemudian Beragam studi literatur dalam perspektif komparatif dan studi politik lokal di atas akan sangat membantu menerangkan kasus ini. Sejauh mana faktor-faktor yang dijelaskan di atas telah turut memengaruhi tingkat partisipasi yang terjadi dalam pilkada serentak 2020 di masa pandemik Covid-19.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pemilu di Tengah Pandemi: Gambaran Beberapa Negara

Di Eropa Barat, efek penguncian (lockdown) menguntungkan petahana dimana meningkatnya kepercayaan pada pemerintah dan dukungan pemilih untuk mereka (petahana) yang disertai adanya kepuasan terhadap demokrasi (Bol et al., 2020). Dalam kasus di pemilu Bavaria-Jerman, krisis kesehatan secara kuat dan konsisten menguntungkan petahana (Leininger & Schaub, 2020). Intensitas penguncian (lockdown) juga secara signifikan memengaruhi hasil pemilu dan perilaku pemungutan suara (Giommoni & Loumeau, 2020). Para petahana juga berpotensi menggunakan paket bantuan sosial di masa pandemi untuk kepentingan elektoral mereka. Kasus semacam ini juga terjadi di Indonesia dalam pilkada serentak 2020 (Liputan6.com, 2021).

Situasi pandemi Covid-19 juga makin memperberat situasi pemilu di negara-negara yang rentan kekerasan. Di Nigeria misalnya pemilu di tengah pandemi semakin membawa ketidakpastian. Upaya penyelenggara untuk memastikan pemilu yang aman dan kredibel dalam konteks aturan Covid-19 dapat semakin memperumit partisipasi demokratis. Penggunaan masker wajah dalam pemilu misalnya menyulitkan identifikasi identitas orang yang terlibat dalam pengisian kotak suara dan pemalsuan hasil pemilu. Di Mali, dilema penyelenggaraan pemilu dalam kondisi pandemi lebih rumit daripada risiko kesehatan masyarakat itu sendiri. Faktor keamanan dan kerawanan pemilu berdampak pada partisipasi pemilih yang umumnya rendah, bahkan sejak pemilu sebelumnya pada 2013. Upaya untuk menghadirkan pemilu yang damai dan kredibel tidak saja ditentukan oleh persoalan teknis dan manajemen pemilu, tetapi juga konsensus elite pada proses pemilu (Gerenge 2020). Negara-negara yang tetap menyelenggarakan pemilu diharuskan mendesain tata pemilu agar tetap menjamin kesehatan publik, pada saat yang sama menjamin kredibilitas pemilu. Upaya-upaya terkait hal ini bukan tidak menyisahkan persoalan. Sejumlah negara mengalami kesulitan dalam menerapkan aturan pemilu di tengah pandemi. Dalam kasus Polandia, kompromi elite diseperti proses pemilu menjadi penting untuk secara efektif menyelesaikan tantangan politik, hukum dan administratif dalam penyelenggaraan pemilu (Vashchanka 2020).

Rekomendasi para ahli pemilu untuk mendesain pemilu di masa pandemi dengan metode memilih dari rumah dan pemilihan suara elektronik dari telepon seluler sangat tergantung pada kredibilitas penyelenggara. Di Rusia, pemungutan suara dari rumah telah dikritik, mengingat rentannya perbedaan hasil pemungutan suara. Hal ini sering dikaitkan dengan praktik kecurangan pemilu. Pemungutan suara lewat seluler rentan pada pemungutan suara ganda. Demikian juga lewat internet yang rentan pada kebocoran data pribadi pemilih (Krivonosova 2020).

Berbagai upaya telah dilakukan berbagai negara yang tetap melangsungkan pemilu untuk meminimalkan resiko penularan Covid-19. Di Selandia Baru, penyelenggara pemilu memperluas pemungutan suara alternatif. Pemungutan suara alternatif diperuntukkan bagi yang tidak dapat menghadiri tempat pemungutan suara. Penyelenggara pemilu memperluas layanan online untuk pemungutan suara, memperluas penggunaan telpon untuk pemilih disabilitas, pemungutan suara lewat pos, dan penggunaan kotak suara seluler. Di Ghana, pandemi Covid-19 telah memicu inovasi dari pada penyelenggara pemilu dan partai politik di dalam usaha memobilisasi pemilih. Di Bavaria, Jerman pemerintah mengubah metode pemungutan suara dalam pemilu yang berlangsung dua putaran dari awalnya konvensional

menjadi sepenuhnya melalui pos setelah terjadi peningkatan penularan Covid-19. Tetapi hal tersebut tidak mengurangi partisipasi pemilih yang justru meningkat dalam dua putaran (Wagner 2020).

Korea Selatan adalah contoh yang baik dari pemilu yang berhasil di tengah pandemi. Pemilu di negara itu tetap dapat meminimalkan potensi penularan tetapi berhasil meningkatkan partisipasi pemilih yang signifikan (dari 58 % menjadi 66 %). Penyelenggara pemilu menyediakan prosedur untuk pemungutan suara lebih awal. Selain itu berbagai tindakan pencegahan yang ketat diatur sebagai kode etik pemilih. Perlindungan kesehatan dan tindakan pencegahan yang ketat oleh penyelenggara telah berhasil meyakinkan para pemilih (Spinelli, 2020).

Pilkada Serentak dan Covid-19 di Indonesia

Indonesia telah menyelenggarakan pilkada serentak pada 9 Desember 2020. Melihat hasil pilkada dengan partisipasi pemilih yang meningkat, pemerintah dan penyelenggara mengklaim bahwa pilkada ini telah sukses dilakukan meskipun di tengah pandemi. Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah membuat aturan yang mengatur prosedur kampanye hingga tata cara pemungutan suara dengan protokol kesehatan. Melalui peraturan KPU (PKPU) Nomor 13 Tahun 2020, penyelenggara melarang sejumlah metode kampanye yang berpotensi menimbulkan kerumunan. Penyelenggara hanya membolehkan pertemuan terbatas dan melarang rapat umum, atau bentuk kampanye apapun yang memicu kerumunan massa. Dalam metode pemungutan suara, penyelenggara tidak menyediakan opsi tambahan seperti pemilihan pendahuluan, pemungutan suara lewat pos dan e-voting sebagaimana digunakan di negara lain. Pemilih hanya dapat memberikan suaranya di tempat pemungutan suara (TPS). Pengecualian bagi pasien Covid-19 dan petugas kesehatan petugas pemilihan tetap memfasilitas tersalurnya hak pilih dengan mendatangi lokasi pasien.

Meski telah ada aturan, kampanye yang berlangsung selama 71 hari dari 26 September hingga 5 Desember 2020 tetap sarat dengan pelanggaran protokol kesehatan. Data dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu RI) hingga 4 Desember 2020 ditemukan sebanyak 2.126 pelanggaran protokol kesehatan sepanjang masa kampanye (CNNIndonesia, 2020). Menjelang pelaksanaan pemungutan suara perkembangan Covid-19 di Indonesia cukup mengkhawatirkan. Data yang diperbarui hingga 9 Desember 2020 terdapat 22 kabupaten kota digolongkan zona merah (Nugroho, 2020). Sedangkan berdasar pada data dari Relawan Koalisi Warga untuk LaporCovid 19, hingga 4 Desember 2020 sebanyak 270 kabupaten/kota yang melangsungkan pilkada masih memiliki kasus positif aktif Covid-19 yang tinggi dengan jumlah total kasus aktif sebanyak 43.377 orang dengan cakupan tes rendah. Dari data itu terdapat 21 wilayah yang memiliki lebih dari 500 kasus positif aktif, dan 65 kota/kabupaten memiliki lebih dari 100 kasus positif aktif. Kemudian sebanyak empat wilayah memiliki lebih dari 1.000 kasus positif aktif. Empat wilayah tersebut yaitu Kota Depok dengan 2.407 kasus, Solo dengan 1.041 kasus, Wonosobo 1.439 kasus, dan Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah 1.270 kasus (LaporCovid19.org, 2020). Disadur dari data Survei Charta Politika pada 6-12 Juli 2020 kepada 2.000 responden menemukan sebesar 40,9 % publik tidak percaya pada data kasus Covid-19 yang disajikan pemerintah (CNNIndonesia, 2020). Hasil data yang diperoleh dalam artikel ini menunjukkan perkembangan kasus Covid-19 dalam sepuluh hari menjelang pilkada dengan pertambahan rata-rata dalam 10 hari terakhir tersebut adalah 5.884 kasus per hari dan kematian rata-rata kematian 135 orang per hari berikut disajikan dalam table dibawah ini:

Tabel 1 Data Perkembangan COVID-19 di Indonesia 29 November-8 Desember 2020

Tanggal	Akumulasi Kasus	Bertambah	Kasus Aktif	Suspek	Akumulasi Sembuh	Akumulasi Meninggal
29 November	534.266	6.267	71.658	70.792	445.793	18.815
30 November	538.883	4.617	71.420	72.786	450.518	16.945
1 Desember	543.975	5.092	72.015	71.286	454.879	17.081
2 Desember	549.508	5.533	73.429	71.074	458.880	17.199
3 Desember	557.887	8.369	77.969	69.027	462.553	17.355
4 Desember	563.680	5.803	80.023	69.016	466.178	17.479
5 Desember	569.707	6.027	81.669	69.926	470.449	17.589
6 Desember	575.796	6.089	83.285	70.019	474.771	17.740
7 Desember	581.550	5.754	84.481	72.986	479.202	17.867
8 Desember	586.842	5.292	85.345	70.450	483.497	18.000

Sumber: Satgas Nasional COVID-19

Perkembangan Covid-19 yang mengkhawatirkan tersebut maka pemungutan suara pada 9 Desember 2020 tak lepas dari persoalan protokol kesehatan. Bawaslu mendapatkan laporan sebanyak 1.454 TPS tak menyediakan fasilitas cuci tangan. Selain itu, sejumlah TPS dilaporkan tidak menyediakan bilik khusus bagi pemilih dengan suhu tubuh 37 derajat celcius. Bahkan menurut laporan Bawaslu sebanyak 1.172 petugas kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) dengan positif Covid-19 tetap bertugas (Tirto, 2020). KPU sendiri menyatakan sebanyak 79.241 Petugas KPPS Pilkada 2020 reaktif Covid-19. Bawaslu menyebutkan banyak dari petugas KPPS Positif Covid-19 yang masih datang ke TPS (Raharjo, 2020). Fakta ini menunjukkan bahwa pilkada dilaksanakan dalam tingkat kewaspadaan yang rendah.

Perkembangan Covid-19 menjelang pencoblosan yang cukup mengkhawatirkan didapat dengan melihat perkembangan Covid-19 di daerah-daerah yang menyelenggarakan pilkada. Di Provinsi Jawa Tengah sehari menjelang pilkada sebanyak 968 petugas KPPS terpapar COVID-19 usai menjalani tes swab. Di Sumatera Barat KPU melaporkan sebanyak 137 petugas KPPS positif Covid-19. Sementara di Provinsi Jambi, ratusan Petugas KPPS Positif Covid-19 tidak diganti (Tempo, 2020).

Berikut sampel 20 daerah kota dan kabupaten yang diambil sesuai dengan episentrum penyebaran virus untuk melihat perkembangan Covid-19 dan seberapa tingkat partisipasi pemilih yang terjadi pada 9 Desember 2020. Pemilihan sampel ini mempertimbangkan beberapa hal: (1). Daerah yang sudah terpapar Covid-19. (2) daerah ibukota dengan tingkat kepadatan dan keramaian yang memungkinkan intensitas penularan lebih tinggi. (3) wilayah Jawa dan luar Jawa. (4) representasi hampir dari setiap provinsi.

Tabel 2 Angka partisipasi beberapa kota dan kabupaten pada pilkada 2015 dan 2020

PEMILU	ANGKA PARTISIPASI	
	2015	2020
Kota Surabaya	52,17 %	52,4 %
Kab Jember	52,19 %	58,53 %
Kota Semarang	66,46 %	68,62 %
Solo	73,6 %	70,52 %
Kab.Sleman	72,8%	75,82 %
Kota Depok	56,84 %	62,79 %
Kab. Bandung	63,00 %	72,18 %
Kab. Karawang	67,60 %	70,02 %
Kota Denpasar	57,64 %	53,6 %
Kota Medan	26,88 %	45,97 %
Kota Dumai	68,13 %	65,08 %
Kota Bukittinggi	59,87 %	72,4 %

Kota Bandar Lampung	66,28 %	69,17 %
Kota Batam	48,14 %	64 %
Kota Tangerang Selatan	57,98 %	60,28 %
Kota Mataram	55,74 %	67,2 %
Kota Banjarmasin	65,01 %	56,13 %
Kota Samarinda	50,37 %	52,26 %
Kota Manado	52,79 %	74,35 %
Kota Palu	63,79 %	65,5 %
Kota Ternate	58,93 %	76,69 %

Sumber : * <https://pilkada2015.kpu.go.id/>

Kenaikan yang cukup tinggi ini menarik dilihat misalnya terjadi di daerah dalam provinsi episentrum seperti Depok, Kabupaten Bandung dan Jember. Kondisi Covid-19 di daerah-daerah tersebut cukup mengkhawatirkan. Sementara itu kota Surabaya yang sempat digolongkan zona hitam pada Juni 2020, boleh dikatakan stagnan dalam partisipasi pemilih. Ini meneruskan angka partisipasi yang rendah pada pilkada sebelumnya. Bila melihat data secara umum, peningkatan partisipasi yang cukup tinggi (di atas 5 %) terjadi di daerah kabupaten dalam pemilihan bupati/wakil bupati. Baru kemudian peningkatan di bawah 5 % pada pemilihan walikota dan pemilihan gubernur. Peneliti dari lembaga survei SMRC, Saidiman Ahmad menilai meningkatnya partisipasi di tengah pandemi karena suksesnya mobilisasi pemilih untuk datang ke tempat pemungutan suara. Mobilisasi inilazimnya pada pemilih pedesaan dan kurang terpelajar.

Tabel 3 Partisipasi rata-rata Pilkada Kabupaten, Kota dan Provinsi

Pilkada	Jumlah Daerah		Partisipasi rata-rata	
	2015	2020	2015	2020
Pilbub	224	224	70,36 %	77,52 %
Pilwakot	36	37	65,07 %	69,04 %
Pilgub	9	9	67,34 %	69,67 %

Sumber : KPU/ www.medcom.id

Bila melihat opini publik dua bulan sebelumnya, partisipasi pemilih dikhawatirkan benar-benar menurun akibat pandemi Covid-19. Hal itu dikonfirmasi oleh survei SMRC pada akhir September yang menunjukkan dukungan terhadap pilkada dilaksanakan di tengah pandemi hanya 51 persen. Selain itu dua organisasi agama terbesar di Indonesia yang mewakili mayoritas populasi yakni NU dan Muhammadiyah telah mendesak pemerintah agar pelaksanaan pilkada ditunda sampai pandemi berakhir. Sementara itu kebijakan sosial berskala besar yang diterapkan di sejumlah daerah akibat penularan virus yang terus meningkat juga berpotensi menurunkan partisipasi pemilih. Lembaga Survei Indonesia (LSI) pada September memprediksi potensi penurunan partisipasi pemilih berkisar 20 sampai 60 persen. Survei Indikator Politik, pada 24-30 September 2020 kepada 1.200 responden (margin error 2.9%) menemukan sebanyak 50,2 % menilai pilkada harus ditunda dan 47,1 % mengaku ragu datang ke TPS. Hanya 40,7 % yang menyatakan akan datang ke TPS pada hari pemungutan suara (Imam, 2020).

Di kabupaten Sleman, Provinsi DIY beberapa hari menjelang pilkada seluruh kecamatan dilaporkan berwarna merah atau berisiko tinggi. Sementara itu di Kabupaten Bandung, 199 petugas KPPS Kabupaten Bandung Positif Covid-19 menjelang hari pencoblosan. Selain itu jumlah kasus positif di Kabupaten tersebut jelang pilkada telah melampaui 2.000 kasus. Peningkatan kasus menjelang pilkada juga terjadi di kabupaten

Karawang. Gubernur Jawa Barat telah menghimbau agar aktivitas pilkada dikurangi ([Kompas.com](https://www.kompas.com), 2020).

Peningkatan kasus positif menjelang pilkada juga terjadi di kota Palu, Sulawesi Tengah. Pemerintah kemudian memberlakukan buka tutup akses ke kota tersebut. Kabupaten Jember dan tiga daerah lainnya di Provinsi Jawa Timur mengalami peningkatan kasus Covid-19 yang signifikan beberapa hari menjelang Pilkada. Di Kota Manado sebanyak 1.038 petugas KPPS dilaporkan reaktif Covid-19. Hasil itu diperoleh setelah KPU melakukan rapid test kepada 7.987 petugas KPPS. Kondisi yang paling kritis ada Depok Jawa Barat dan Solo Jawa Tengah, dua dari 4 daerah dengan kasus aktif lebih dari 1.000 menjelang pilkada. Di Kota Bukittinggi, ketua Bawaslu Bukittinggi dilaporkan positif Covid-19 ([Raharjo](https://www.raharjo.com), 2020).

Dalam masa pilkada tidak hanya masyarakat biasa dan penyelenggara pemilu yang terpapar Covid-19. Sejumlah calon kepala daerah (Cakada) juga dilaporkan terpapar Covid-19. Data hingga 6 Desember 2020 sebanyak 76 cakada telah terpapar Covid-19, sebanyak 4 diantaranya meninggal dunia. Sebanyak 76 cakada yang terpapar Covid-19 itu terdiri dari 44 calon bupati, 19 calon wakil bupati, 10 calon walikota, dua calon wakil walikota, serta satu calon gubernur. Hingga 5 Desember 2020, masih terdapat lima calon kepala daerah yang masih dalam perawatan ([LaporCovid19.org](https://laporcovid19.org), 2020).

Dari sampel kota/kabupaten yang diambil, beberapa kandidat yang dilaporkan terpapar Covid-19 yaitu cakada kota Depok, kota Semarang, kota Dumai, kota Banjarmasin, dan kota Ternate. Di Dumai seorang calon Wali Kota yang terpapar COVID-19 akhirnya meninggal pada akhir November 2020. Sementara itu di Kota Bukittinggi wakil Wali Kotanya harus diisolasi karena gejala diduga Covid-19. Demikian juga di Banjarmasin, seorang cakada dari jalur perseorangan terkonfirmasi positif Covid-19 ([Maudhody](https://www.maudhody.com), 2020). Hal yang sama juga di Ternate, Maluku seorang calon kepala daerah dilaporkan positif Covid-19.

Data perkembangan Covid-19 di atas menggambarkan maraknya pelanggaran protokol kesehatan pada masa kampanye. Selain itu ada peningkatan kasus menjelang pilkada, banyaknya penyelenggara dan kandidat yang terpapar virus. Data dan perkembangan tersebut, seharusnya cukup memberi efek menakuti pemilih dan berpotensi menurunkan partisipasi sebagaimana diprediksi sebelumnya. Tetapi hal itu tidak terjadi, sebaliknya partisipasi justru meningkat.

Dalam situasi normal (tanpa Covid-19), peningkatan partisipasi pemilih dalam pilkada serentak ini bukanlah hal yang mengejutkan. Partisipasi pemilih di Indonesia memang cenderung stabil setidaknya dalam 15 tahun terakhir. Partisipasi pemilu dalam pemilu legislatif Indonesia sering digambarkan sebagai tinggi dari perspektif komparatif, dan tingkat partisipasi secara teratur melebihi negara-negara Asia Tenggara lainnya. Data menunjukkan partisipasi dalam pemilu legislatif di Indonesia setelah pemilu 1999 cenderung stabil dikisaran angka 70 hingga 80-an persen.

Sejak undang-undang Pilkada menetapkan pilkada serentak yang dimulai pada 2015, angka partisipasi pemilih cenderung meningkat, meski sempat ada penurunan sedikit pada pilkada serentak 2018. Chaniago (2016) menilai ada hubungan antara sistem pemilu serentak dengan partisipasi pemilih yang meningkat. Dengan penyelenggaraan serentak, pilkada yang levelnya sebagai pemilu lokal dapat dikategorikan sebagai pemilu setingkat nasional. Menurut yang diatur undang-undang Pilkada, seluruh daerah di Indonesia akan menyelenggarakan pilkada serentak pada 2020.

Tabel 4 Angka Partisipasi Pilkada Serentak 2015-2020

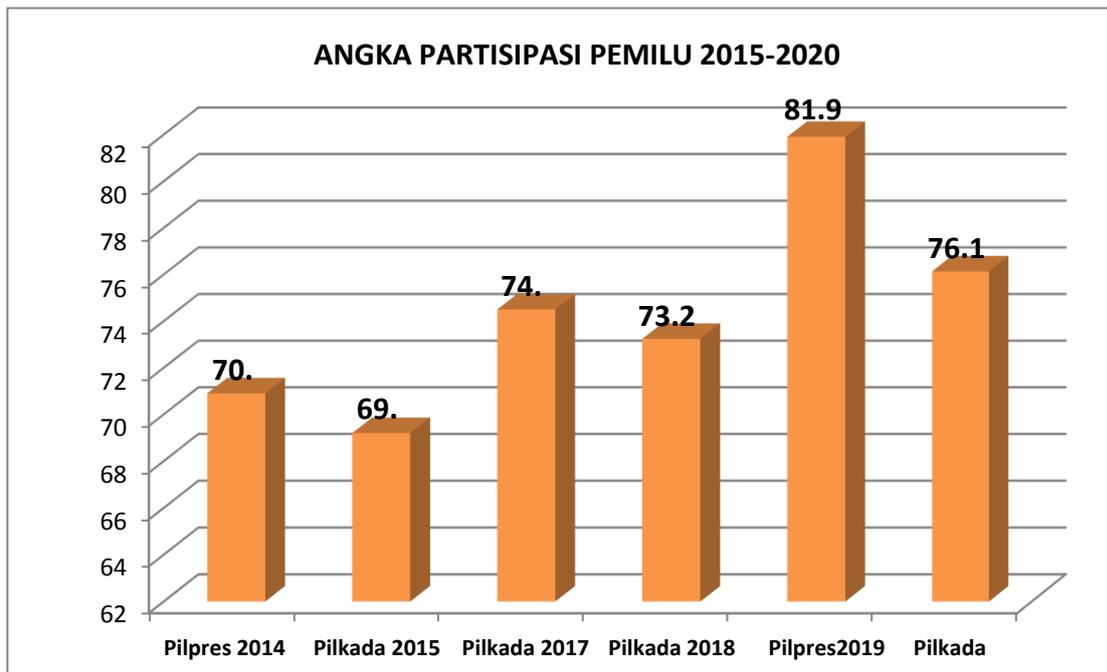
PILKADA SERENTAK	JUMLAH DAERAH			JUMLAH PEMILIH (DPT)	ANGKA PARTISIPASI
	Prov.	Kab.	Kota		
2015	9	224	36	96.869.739	69,20 %
2017	7	76	18	41.199.607	74,5 %

2018	17	115	39	152.057.054	73,24 %
2020	9	224	37	100.359.152	76,13 %

Sumber: KPU RI (2020)

Meningkatnya partisipasi pemilih pada pilkada serentak 2020 mengikuti tren peningkatan pada pemilu sebelumnya. Tidak berlebihan bila Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menargetkan angka partisipasi pemilih sebesar 77,5% pada pilkada serentak 2020, meskipun hasilnya sebesar 76,13 persen.

Partisipasi pemilih yang meningkat pada pilpres-pileg 2019 tak lepas dari masifnya mobilisasi pemilih menjelang pemilihan (Aspinall & Mietzner, 2019). Selain itu tingkat persaingan pemilihan presiden yang tinggi ketimbang pileg pada 2019 menjadi faktor yang meningkatkan partisipasi pemilih (Sardini & Erowati, 2020). Hal tersebut tergambar pada diagram dibawah ini:



Gambar 1 Angka Partisipasi Pilpres dan Pilkada 2014-2021

Penting untuk diamati perkembangan dari persepsi publik terhadap beberapa hal yakni: (1) persepsi publik terhadap pelaksanaan pilkada itu sendiri di tengah pandemi.(2) kepercayaan publik terhadap kepemimpinan nasional dalam mengatasi krisis.(3) kepuasan publik terhadap penanganan wabah. (4) kepuasan publik secara umum kepada pemerintah atau kepemimpinan nasional saat ini. Kondisi persepsi publik ini penting dilihat, mengingat pilkada serentak (2020) itu sendiri tak ubahnya event politik nasional dengan jumlah pemilih hampir separuh dari populasi pemilih secara keseluruhan.

Bila melihat persepsi publik terhadap pelaksanaan pilkada dalam Survei Indikator Politik pada 24-30 September 2020 kepada 1.200 responden, separuh publik (50,2 %) menilai pilkada harus ditunda. Bila pilkada tetap digelar, 47,1 persen responden mengaku ragu datang ke TPS dan hanya 40,7 % yang menyatakan akan datang. Sebanyak 68,7% setuju bahwa penyelenggaraan pilkada serentak tersebut sangat rawan penyebaran virus corona (Imam, 2020). Tetapi persepsi ini berubah pada November terlihat dalam survei nasional SMRC. SMRC menyurvei 1201 responden pada 18-21 November. Mayoritas warga sebesar 77 % merasa khawatir bila pilkada tetap dilaksanakan pada 9 Desember 2020. Tetapi ketika

dihadapkan pada dua pilihan, mayoritas warga sebesar 64 % ingin pilkada tetap dilaksanakan dengan protokol kesehatan. Hanya 28 persen yang menghendaki pilkada ditunda. Meski mayoritas merasa khawatir dengan Covid-19, mereka tetap menginginkan pilkada dilaksanakan.

Masih dari data survei SMRC 18-21 November ditemukan sebanyak 83 % warga yang berada di daerah pilkada mengaku akan ikut memilih pada 9 Desember 2020. Meski ditemukan dukungan pilkada dan pengakuan akan ikut memilih yang tinggi, ditemukan juga warga kurang peduli pada protokol kesehatan. Pada survei SMRC pada 4-7 November 2020 kepada 1200 responden, hanya sekitar 47 % warga yang menyatakan selalu menggunakan masker ketika keluar rumah, selalu menjaga jarak, dan selalu mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Persepsi publik berupa dukungan terhadap pilkada sesuai jadwal pada November dalam survei SMRC berbuah partisipasi yang meningkat pada pilkada 9 Desember. SMRC mengonfirmasi hal ini dalam survei mereka pada 9-12 Desember 2020 dimana peningkatan partisipasi pemilih terjadi. Sebesar 76 % warga yang tinggal di daerah pilkada ikut memilih pada 9 Desember 2020. Menariknya, dari 24 % yang tidak ikut memilih, sebanyak 47 % (11 % dari populasi pemilih) beralasan sedang di luar kota. Sementara itu hanya sebesar 24 % (6% dari populasi pemilih) yang tidak ikut memilih karena takut tertular atau menularkan virus corona. Artinya banyak warga yang tidak ikut memilih pada 9 Desember justru bukan karena berdiam di rumah karena takut tertular virus melainkan karena sedang bepergian ke luar kota. Hari libur pilkada justru dimanfaatkan untuk bepergian, kegiatan yang sebenarnya dilarang dalam masa pembatasan sosial.

Terkait dengan protokol kesehatan SMRC menemukan hampir semua pemilih memakai masker (95 %) dan menjaga jarak (97 %) saat berada di TPS. Mayoritas warga pemilih (72 %) merasa khawatir tertular Covid-19. Meski demikian mayoritas warga percaya protokol kesehatan dapat ditegakkan dan menurut SMRC hal itu mendorong tingkat partisipasi pemilih yang tinggi. Sedangkan terkait kualitas pelaksanaan pilkada, masih dalam survei SMRC 9-12 Desember 2020, mayoritas warga menilai pilkada berjalan dengan sangat/cukup jujur dan adil (jurdil). Sebanyak 83 % yang merasa puas dengan pelaksanaan pilkada dan sebanyak 85 % yang merasa yakin bahwa pilkada akan menghasilkan pemimpin yang bisa membawa perubahan di daerah.

Data tersebut menunjukkan bahwa pemilih yang berpartisipasi, mayoritas dari mereka patuh pada protokol kesehatan saat di TPS. Meskipun mayoritas tetap memiliki rasa khawatir tertular virus. Dapat disimpulkan: pertama, dari aspek protokol kesehatan, pemilih menganggap protokol ditegakkan dengan baik. Hal itu menunjukkan tingginya kepercayaan pemilih kepada penyelenggara pemilu dalam penerapan protokol kesehatan di tempat pemungutan suara. Kedua dari aspek kredibilitas pemilu, pemilih menganggap pilkada sudah berjalan dengan jurdil dan dibuktikan dengan angka kepuasan yang tinggi.

Dengan demikian perkembangan Covid-19 secara real-time dan efek menakuti yang seharusnya ditimbulkannya tidak signifikan memengaruhi persepsi publik. Kekhawatiran terhadap bahaya penularan Covid-19 teratasi dengan persepsi publik yang positif dan kepercayaan yang tinggi pada pemerintah dan penyelenggara pemilu. Riset ini tidak memiliki bukti yang cukup kuat bahwa penurunan partisipasi di beberapa daerah dikarenakan oleh kondisi perkembangan Covid-19 yang makin mengkhawatirkan. Sementara itu peningkatan partisipasi pemilih justru terjadi di daerah-daerah dengan kasus positif yang tinggi.

Faktor persepsi publik dan data yang diajukan di atas memang tidak berdiri sendiri dan menjadi penjelasan tunggal. Faktor institusional dan meningkatnya kesadaran politik pemilih merupakan situasi yang mendukung atau meneruskan tren partisipasi pemilih yang stabil atau cenderung meningkat di Indonesia. Stabilitas partisipasi pemilih di angka yang cukup tinggi ini dipengaruhi oleh beragam faktor. Secara nasional, sistem pemilihan adalah salah satu penjelasan yang kuat untuk tren partisipasi pemilih yang stabil tersebut. Sementara

itu varian partisipasi politik yang berbeda-beda di berbagai daerah memerlukan pemeriksaan yang lebih mendalam dan terperinci melalui penelitian politik lokal.

Politik lokal merupakan penjelasan yang paling kuat bila ingin melihat secara spesifik varian tingkat partisipasi yang berbeda-beda di tiap daerah. Riset ini misalnya tidak sampai menjelaskan mengapa partisipasi politik yang amat rendah di kota Medan lima tahun lalu justru meningkat hampir 100 % dalam pilkada kali ini. Demikian juga dengan apa yang terjadi di Depok, dimana partisipasi meningkat signifikan justru di tengah angka positif yang tinggi. Dan beberapa kota dan kabupaten lain dengan fenomena serupa.

Angka partisipasi yang signifikan (di atas 5 %) dan kemudian itu signifikan mempengaruhi angka partisipasi rata-rata secara nasional disumbangkan oleh partisipasi rata-rata dalam pemilihan bupati dan wakil bupati. Penyebab dari hal ini cukup sederhana dijelaskan. Pertama, intensitas penularan virus, jumlah kasus positif dan informasi akan bahayanya di kabupaten- kabupaten terutama di luar provinsi episentrum Covid-19 (terutama luar Jawa) tidak sebesar dan semenakutkan dibanding di daerah episentrum atau daerah ibukota. Kedua, sebagaimana pendapat peneliti SMRC, mobilisasi pemilih yang tinggi paling berpotensi menyasar pemilih kurang berpendidikan dan tinggal di pedesaan.

Untuk itu pendekatan studi politik lokal adalah jalan untuk memeriksa bagaimana intensitas kompetisi dan isu politik lokal yang menguat. Bagaimana hal itu kemudian memengaruhi mobilisasi pemilih, perilaku pemilih, intensitas politik uang hingga kepercayaan pemilih pada institusi pemilihan setempat. Hal-hal tersebut adalah bagian dari faktor-faktor yang telah disebutkan turut memengaruhi partisipasi pemilih di Indonesia.

SIMPULAN

Peningkatan partisipasi dalam pilkada serentak 2020 di tengah bahaya pandemi, adalah kelanjutan dari pada tren partisipasi yang cenderung meningkat dan stabil. Peningkatan itu didorong oleh persepsi publik yang positif terutama terhadap pilkada dan penanganan pandemi dan kepada kinerja pemerintah secara umum. Hal ini mendukung tesis para sarjana bahwa kepercayaan pemilih pada kredibilitas pemilu menentukan tingkat partisipasi. Namun demikian persepsi yang positif tersebut tidak benar-benar merefleksikan kondisi sebenarnya dari perkembangan Covid-19 di Indonesia, dan seberapa baik penanganan yang dilakukan pemerintah. Peneliti menduga hal ini berkaitan dengan meningkatnya kadar partisan dan pembelahan politik yang tinggi di Indonesia. Kondisi ini berkonsekuensi pada pemihakan total pada salah satu kubu politik yang kemudian menjadi basis yang memengaruhi persepsi dan dukungan politik. Dugaan ini menjadi rekomendasi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Penelitian ini tidak menyatakan seberapa besar efek dari pada persepsi positif di atas bagi peningkatan partisipasi. Karena itu, faktor tersebut tidak menjadi penjelasan tunggal. Pemeriksaan lokal secara terperinci dibutuhkan untuk melihat varian partisipasi yang berbeda-beda pada tiap daerah. Karena itu, faktor politik lokal menjadi penjelasan yang kuat, mengapa justru di daerah yang tingkat penularan yang tinggi partisipasi meningkat signifikan. Intensitas kompetisi, mobilisasi pemilih, isu lokal dan karakter pemilih di daerah, politik uang, hingga kredibilitas penyelenggara setempat adalah variabel-variabel yang kuat untuk ini. Peningkatan partisipasi ini membuktikan bahwa faktor kondisi ekonomi sebagaimana ditawarkan dalam pendekatan perilaku pemilih bukan penjelasan yang tepat. Dalam situasi ekonomi memburuk akibat pandemi, justru antusiasme pemilih mewujud dalam partisipasi yang meningkat. Pemilih kurang berpendidikan, miskin, di pedesaan lebih besar angka partisipasinya bila melihat data partisipasi rata-rata pilkada kabupaten.

Meskipun partisipasi pemilih meningkat, hal tersebut tidak serta merta menunjukkan kondisi demokrasi yang secara umum membaik di Indonesia. Indeks demokrasi Indonesia

Samsul Ode, Benediktus Dalupe, Surya Yudha Regif, Dejhawe Al Jannah:

Pemilu dan COVID-19 di Indonesia: Partisipasi Pemilih dalam Pilkada Serentak 2020

tahun 2020 versi The Economist Intelligence Unit berada pada skor terendah dalam 14 terakhir (bdk dw.com 4/2/2021). Data ini terkonfirmasi dalam survei Indikator Politik Indonesia pada 24- 30 September 2020 yang menyimpulkan bahwa Indonesia kurang demokratis. Selain itu praktek pembelian suara atau politik uang di Indonesia salah satu yang tertinggi di dunia. Survei nasional LIPI terkait pemilu 2019 menemukan 40 persen menerima uang dari kandidat pada pemilu 2019. Demikian juga survei dari Sindikasi Pemilu dan Demokrasi (SPD) pada Januari hingga Maret 2020 mendapati 60 % pemilih mau menerima politik uang. Karena itu studi lebih lanjut sangat diharapkan untuk menjawab dugaan, keraguan dan kelemahan di dalam penelitian ini. Survei nasional tidak mampu menjelaskan varian lokal pada tiap daerah yang justru bisa menjadi faktor determinan yang memengaruhi tingkat partisipasi pemilih.

DAFTAR PUSTAKA

- Aspinall, E., & Mietzner, M. (2019). Indonesia's Democratic Paradox: Competitive Elections amidst Rising Illiberalism. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 55(3), 295–317. <https://doi.org/10.1080/00074918.2019.1690412>
- Bol, D., Giani, M., Blais, A., & Loewen, P. J. (2020). The effect of COVID-19 lockdowns on political support: Some good news for democracy? *European Journal of Political Research*, 60(2), 497–505. <https://doi.org/10.1111/1475-6765.12401>
- Chaniago, P. S. (2016). Evaluasi Pilkada Pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2015. *Politik Indonesia: Indonesian Political Science Review*, 1(2), 196. <https://doi.org/10.15294/jpi.v1i2.6585>
- CNNIndonesia. (2020, December 4). Bawaslu Catat 2.126 Pelanggaran Protokol Kesehatan di Pilkada nasional. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20201204162910-32-578105/bawaslu-catat-2126-pelanggaran-protokol-kesehatan-di-pilkada>
- Galih, B. (2020, September 5). Pilkada 2020 di Tengah Pandemi, LSI Ungkap Potensi Penurunan Pemilih Halaman all - Kompas.com. KOMPAS.Com. <https://nasional.kompas.com/read/2020/09/05/14554071/pilkada-2020-di-tengah-pandemi-lsi-ungkap-potensi-penurunan-pemilih?page=all>
- Gerenge, R. 2020. "Managing Elections Under Covid-19 Pandemi Conditions: The Case Of Mali". *International IDEA Case Study 5/2020*. Retrieved from: https://www.idea.int/sites/default/files/managing-elections-under-Covid-19-pandemic-conditions-the-case-of-mali_en.pdf
- Giommoni, T., & Loumeau, G. (2020). Lockdown and Voting Behaviour: A Natural Experiment on Postponed Elections during the COVID-19 Pandemic. *SSRN Electronic Journal*. <https://doi.org/10.2139/ssrn.3659856>
- Idea.int. (2020, December 21). Ikhtisar Global COVID-19: Dampak terhadap Pemilu (Bahasa Indonesia). IDEA. <https://www.idea.int/news-media/multimedia-reports/ikhtisar-global-covid-19-dampak-terhadap-pemilu-bahasa-indonesia>
- Imam, R. (2020, October 26). Sederet Hasil Survei Indikator: Pilkada saat Pandemi hingga 3 Besar Capres 2024. *kumparan*. <https://kumparan.com/kumparannews/sederet-hasil-survei-indikator-pilkada-saat-pandemi-hingga-3-besar-capres-2024-1uShOxY8NdS>

- Kompas.com. (2020, December 8). 968 Petugas KPPS Pilkada Jateng Positif Covid-19, KPU Pastikan Sebagian Besar Sudah Sembuh. <https://regional.kompas.com/read/2020/12/08/21243461/968-petugas-kpps-pilkada-%20jateng-positif-Covid-19-kpu-pastikan-sebagian-besar>
- Krivososova, I. "Electoral events in Russia during the COVID-19 pandemic: remote electronic voting, outdoor voting and other innovations". International IDEA Case Study 6/2020. <https://www.idea.int/sites/default/files/electoral-events-in-russia-during-the-Covid-19-pandemic-remote-electronic-voting-outdoor-voting-and-other-innovations-en.pdf>
- Laporcovid19.org. (2020). Pilkada 2020 Abaikan Keselamatan Rakyat. Laporcovid.org. <https://laporcovid19.org/2020/12/pilkada-2020-abaikan-keselamatan-rakyat/>
- Leininger, A., & Schaub, M. (2020). Voting at the dawn of a global pandemic. SocArXiv Papers. <https://doi.org/10.31235/osf.io/a32r7>
- Liputan6.com. (2021, January 14). Yusril: Putusan Bawaslu Lampung dan KPU Bandar Lampung Sudah Berkekuatan Hukum. <https://www.liputan6.com/pilkada/read/4457649/yusril-putusan-bawaslu-lampung-dan-kpu-bandar-lampung-sudah-berkekuatan-hukum>
- Maudhody, A. (2020, September 8). Pilkada Kalsel 2020, Empat Bakal Calon yang Positif Covid-19 Jalani Karantina Mandiri. Banjarmasinpost.co.id. <https://banjarmasin.tribunnews.com/2020/09/08/pilkada-kalsel-2020-empat-bakal-calon-yang-positif-covid-19-jalani-karantina-mandiri>
- Meiliana, D. (2020, October 27). KPU: Ada 100.359.152 Pemilih Terdaftar di DPT Pilkada 2020 Halaman all - Kompas.com. KOMPAS.Com. <https://nasional.kompas.com/read/2020/10/27/09142741/kpu-ada-100359152-pemilih-terdaftar-di-dpt-pilkada-2020?page=all>
- Nathaniel, F., & Amali, Z. (2020, December 9). 1.172 Petugas KPPS Positif COVID Tetap Bertugas di Pilkada 2020. tirto.id. <https://tirto.id/1172-petugas-kpps-positif-covid-tetap-bertugas-di-pilkada-2020-f7W2>
- Nugroho, R. S. (2020, December 9). Ada 22 Daerah Zona Merah yang Gelar Pilkada Serentak 2020, Mana Saja? Halaman all - Kompas.com. KOMPAS.Com. <https://www.kompas.com/tren/read/2020/12/09/092736065/ada-22-daerah-zona-merah-yang-gelar-pilkada-serentak-2020-mana-saja?page=all>
- Raharjo, D. B. (2020, December 10). Bawaslu Sebut Banyak Petugas KPPS Positif Covid-19 Masih Datang ke TPS. suara.com. <https://www.suara.com/news/2020/12/10/103124/bawaslu-sebut-banyak-petugas-kpps-positif-covid-19-masih-datang-ke-tps>
- Sardini, N., & Erowati, D. (2020). "The Coattail-Effect" in the Concurrent Elections in Indonesia: Study on Increasing Turnouts and Use of Voting Rights in the 2019

Samsul Ode, Benediktus Dalupe, Surya Yudha Regif, Dejhawe Al Jannah:

Pemilu dan COVID-19 di Indonesia: Partisipasi Pemilih dalam Pilkada Serentak 2020

Elections. Proceedings of the Proceedings of the 4th International Conference on Indonesian Social and Political Enquiries, ICISPE 2019, 21–22 October 2019, Semarang, Central Java, Indonesia. <https://doi.org/10.4108/eai.21-10-2019.2294415>

Spinelli, A. (2020). Managing Elections under the COVID-19 Pandemic: The Republic of IDEA. <https://www.idea.int/publications/catalogue/managing-elections-under-covid-19-pandemic-republic-korea-crucial-test>

Tempo. (2020, December 8). Pilkada 2020: KPU Sumbar Catat 137 Petugas KPPS Positif Covid-19. Tempo. <https://nasional.tempo.co/read/1412503/pilkada-2020-kpu-sumbar-catat-137-petugas-kpps-positif-covid-19>

Vashchanka, V. (2020). Political manoeuvres and legal conundrums amid the COVID-19 pandemic: the 2020 presidential election in Poland. *International IDEA Case Study 2/2020*. <https://www.idea.int/sites/default/files/political-manoevres-and-legal-conundrums-2020-presidential-election-poland.pdf>

Wagner, R. (2020). Responding to COVID-19 with 100 per cent postal voting: Local elections in Bavaria, Germany. *International IDEA Case Study 4/2020*. <https://www.idea.int/sites/default/files/responding-to-Covid-19-with-postal-voting-local-elections-in-bavaria.pdf>



Impacts of Covid-19 on Migrants and Refugees

Subhash Kumar Baitha¹, Rinkal Tyagi¹, Souvik Chatterjee¹

¹ Department of Politics and International Relations, Central University of Jharkhand, 835205, Jharkhand-India

Article Info

Dikirim: Apr 09, 2022

Diterima: Jul 15, 2022

Dipublikasi: Jul 31, 2022

Keywords:

COVID-19; Internally Displaced Persons; Migration; New Social Movement; Refugees

Corresponding Author:

Souvik Chatterjee

Department of Politics and International Relations, Central University of Jharkhand

Email:

chatterjeesouvik101@gmail.com

How to Cite:

Baitha, S. K., Tyagi, R., & Chatterjee, S. (2022). Impacts of Covid-19 on Migrants and Refugees. *Journal of Political Issues*, 4(1); 42-49. <https://doi.org/10.33019/jpi.v4i1.76>



DOI:

<https://doi.org/10.33019/jpi.v4i1.76>

Lisensi:



Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC- BY-NC-SA 4.0)



ABSTRACT

Abstract Since the 1970s, in the aftermath of new social movements, the concept of refugees and migration in international politics has dominated both the academic discipline and public debates. According to the United Nations High Commissioner for Refugees, more than 82.4 million people worldwide were forcibly displaced from their homes by the end of 2020, either as internally displaced persons (IDPs) or as refugees, as a result of violent conflict, persecution, famine, or natural disasters. Even in normal times, the lives of refugees and migrants are fraught with difficulties, but in the midst of a pandemic like Covid-19, this problem has taken on new dimensions. The only way to avoid the pandemic is to take precautions and maintain a safe distance from one another. These precautions are extremely difficult for refugees and migrants to take amidst a global pandemic. Keeping in mind the international efforts and the problems faced by refugees and migrants, this paper is an attempt to comprehend the challenges faced by refugees and migrants during Covid-19 and what global efforts have been made to mitigate the pandemic's impact on refugee and migrant life.

About Author:

Subhash Kumar Baitha is currently working as an assistant professor in the Department of Politics and International Relations, Central University of Jharkhand, India. He did his M.Phil. & Ph.D. from School of International Studies, Jawaharlal Nehru University, New Delhi. He has contributed numerous articles and book reviews in renowned national and International Journals. His areas of expertise are Foreign Policy of Mongolia, Central Asian Studies, India's Foreign Policy, Inner Asian Studies.

Rinkal Tyagi Scholar in the Department of International Relations, Central University of Jharkhand, Ranchi, India has completed her graduation and Post Graduation from University of Delhi, India. Her areas of interest are Political Theory, Indian Foreign policy, Theories of International Relations.

Souvik Chatterjee is currently working as a Junior Research Fellow in the Department of Politics and International Relations, Central University of Jharkhand, India. He obtained his Master Degree in Political Science from Kazi Nazrul University, India and stood first class first in 2018. His areas of interest are Foreign Policy of Mongolia, Political sociology, Comparative Politics, Inner Asian Studies.

INTRODUCTION

On a national and global scale, the COVID-19 pandemic has had a significant negative impact on the living and working conditions of refugees and migrants. Because of its diverse and complex nature, policymakers face a difficult task in determining its implications for human security. Furthermore, states all over the world are facing challenges such as physical separation and other infection prevention measures as a result of large-scale evacuation and displacement of people. Migrants who were forced to return home put additional strain on an already precarious health-care system and livelihoods. As a result, there is a pressing need to comprehend the theoretical and practical implications of the Covid-19 pandemic on migration and refugees worldwide.

A common definition for refugees or migrants has not been agreed by the scholars. According to USA for UNHCR (2022) “A refugee is someone who has been forced to flee his or her country because of persecution, war or violence” and who have suffered severe damage to the public system (USA for UNHCR, 2022). Therefore, they need international security and assistance. On the other hand United Nations defined migrants as “ International migrant is someone who changes his or her country of usual residence, irrespective of the reason for migration or legal status” (United Nations, 2022). Migrants and refugees are among the most affected social groups by the COVID-19 crisis, and they bear a disproportionate share of the social and economic consequences. They are at the forefront of the pandemic, providing critical services such as health, cleaning, domestic work, agriculture, and food production, as well as ensuring the continuity of supply chains. The pandemic has also increased the vulnerability of refugees and asylum seekers in urban, rural, and camp settings, while having a negative impact on humanitarian aid (United Nations Economic and Social Commission for Western Asia, 2020).

Due to the periodic conflicts and changes in the world, many people live the life of refugees and migrants every year. Recently, Global pandemic known as Covid-19 has engulfed the entire globe. Every country has attempted to deal with it on their own terms. Keeping in mind of international efforts and the issues confronting refugees and migrants, this study attempted to highlight the following goals First, Problems or difficulties encountered by refugees and migrants during Covid-19 and the Second, Trace International efforts which are being made to limit the pandemic's impact on refugee and migrant life.

RESEARCH METHOD

Using surveys and data from several international organisations, this study attempts to understand the challenges of refugees and migrants during and the post Covid-19 time. Measures to address these challenges and actions to improve the living standards of refugees and migrants are discussed using both primary and secondary sources related to this topic. In this study, an attempt was made to conduct quantitative analysis using available data.

RESULT**Refugees in COVID-19 Pandemic**

The pandemic's impact on refugees is so drastic that it has resulted in a severe crisis worldwide. Many refugees in India, including the Rohingyas and Bangladeshis, are attempting to save themselves from this new disease. At the same time, there is an increase in the number of refugees. Figures from 2020 to the present show that millions of people have been forced to migrate in just one and a half years. The fight between government forces and their opponents, or the conflict between the two groups, was the primary cause of the displacement.

More than 2000 refugees in the Central African Republic, over 1.3 million Somali refugees, approximately 7000 Ethiopian refugees, approximately 1000 Helmand refugee families, more than 17,500 refugees displaced from the West African country of Burkina

Faso, and so on are some of the recent incidents (Siegfried, 2021). All of this displacement occurred in 2021, and according to an old UNHCR report, the list could be even longer. It is not just about the increase in the number of refugees; the main issue is how governments around the world are attempting to deal with the pandemic today. However, the question here is whether governments are also dealing with the problems of these refugees.

Consider some governments that have exacerbated the problems of these refugees even in the midst of this pandemic. Recent events have highlighted the Danish government's decision to revoke the residency permits of some refugees, which has been widely condemned internationally. When Myanmar's army took over on February 1, 2021, many journalists were forced to flee to Thailand. Australia's newly amended migrant law has made life even more difficult for refugees living there (Siegfried, 2021). Such incidents are extremely upsetting because everyone is attempting to resolve a difficult situation in which some governments are exacerbating the problems for refugees.

How safe will this Covid-19 be expected to be by avoiding refugees and migrants? Today, there are nearly 80 million refugees on the global stage, including internally 45.7 millions displaced, 4.2 millions asylum seekers, 26.3 millions refugees and 3.6 millions displaced (UNHCR 2020). According to surveys conducted by international organisations and non-governmental organisations (NGOs), these refugees are suffering from the effects of Covid-19, as well as issues such as sexual violence and human trafficking. However, some governments are paying attention to these as well. According to a recent IRC report, nearly 2000 refugees settled in the United States during the fiscal year, and the President of the United States has announced plans to increase refugee admissions to more than 125 thousand by the next fiscal year (Molina & Forin, 2021). However, it appears that governments are slowing down the work that needs to be done for the benefit of these refugees.

Migration in COVID-19 Pandemic

This pandemic has nearly engulfed the entire globe. Every country has done everything possible to avoid this, including cancelling international flights and declaring a state of emergency. These conditions had the greatest impact on the migrants. Due to unexpected flight cancellations, many migrants were unable to return to their home country. It is surprising that, despite the pandemic, the number of migrants increased from around 271.5 million in 2019 to 280.6 million by mid-2020. International migrants increased by 48 million between 2000 and 2010, with the remaining migrants discovered between 2010 and 2020. (UN DESA, 2020). Despite the fact that the number of migrants has increased almost everywhere in the world, the list of major countries remains unchanged. Although the number of migrants has increased almost everywhere in the world, the following are the major countries with high migrant populations.

Table 1 Countries with the Most Immigrants

Name of Country	No. of Migrants (in million)	Percentage of Total World's Migrant Population
USA	51 million	18%
Germany	13 million	4.8%
Saudi Arabia	13 million	4.7%
Russia	12 million	4.4%
UK	10 million	3.7%

Source: Leimer, R. (2021, June 25).

Subhash Kumar Baitha, Rinkal Tyagi, Souvik Chatterjee:

Impacts of Covid-19 on Migrants and Refugees

With 87 million international migrants, Europe had the highest number of international migrants among the world's major regions in 2020. With nearly 59 million migrants, Northern America hosted the second-highest number of migrants. Northern Africa and Western Asia were close behind, with a combined population of nearly 50 million. Countries have begun to adopt measures to facilitate safe, orderly, and regular migration as a result of the General Assembly's adoption of landmark agreements such as the 2030 Agenda for Sustainable Development, the New York Declaration for Refugees and Migrants, and the Global Compact for Safe, Orderly, and Regular Migration. In a recent survey, 54 percent of the 111 governments that responded said they had such policies ([United Nations Department of Economic and Social Affairs, Population Division, 2020](#)).

DISCUSSION

Unemployment

The importance of the ILO Report 2020, the WHO Survey 2020, and the IFRC Report in understanding the impact of this pandemic cannot be overstated. According to surveys, the pandemic had a significant impact on migrants and refugees (7.5 / 10). Many countries imposed an immediate lockdown, causing millions of people to lose their jobs. According to the ILO report, global unemployment has increased by approximately 25 million during the crisis ([Sheth, 2020](#)). Approximately 22 million people were laid off during the 2008-09 global financial crisis, with the unorganised sector accounting for the majority of job losses. The unemployment rate caused by Covid-19 was higher than in 2009 ([Khanna, 2020](#)). According to statistics, unemployment will peak in the middle of 2020. Between February and April 2020, between 2.2 and 2.8 million people lost their jobs in South Africa, while this figure was estimated to be around 5 million in the Eurozone by mid-2020. In Asia and the Pacific, an estimated 10 to 15 million people were unemployed, with more than 10 million unemployed in the United States.

Table 2 The Unemployment Rate Worldwide

Workers	Employment Loss (in %)
Total	4.3%
Female	5.0%
Male	3.9%
Young	8.7%
Adult	3.7%

Source: International Labour Organization ([2022](#))

According to ILO data, the covid-19 crisis has had the greatest impact on young workers, with 8.7 percent of youth losing their jobs compared to 3.7 percent of adult workers. Female unemployment was 5.0 percent higher than male unemployment ([International Labour Organization, 2021](#)). Furthermore, as a result of the sudden announcement of the lockdown, a large number of migrants began returning to their home country. Because of this sudden migration, the figures of pandemic and unemployment among migrants have been extremely high.

Health Care Barriers

While the health system is being emphasised the most in order to avoid the pandemic, WHO survey shows that many migrants and refugees have been unable to access essential services ([World Health Organization, 2020](#)). Despite the pandemic's symptoms, many migrants and refugees do not seek medical attention. The main reasons are:

1. Lack of financial means

2. No Entitlement
3. Lack of proper health care services
4. Fear of Deportation
5. Don't know where to find a doctor

According to the Apart Together Survey, the majority of migrants and refugees did not demand health services due to financial reasons, due to fear of eviction, a lack of clinic services etc ([World Health Organization, 2020](#)). Countries such as Portugal, the United Kingdom, and Thailand, on the other hand, have taken significant steps to provide health care to refugees and migrants. However, in most cases, governments justified harsh policies toward refugees and migrants by citing the need to halt the spread of Covid-19. The violations of human rights were justified in the name of halting the spread of Covid-19. It has been observed that the health facilities of refugees and migrants living in overcrowded conditions have received little attention. For example, 740,000 Rohingya refugees from Bangladesh, as well as refugees and migrants in the United States, face unsanitary conditions and inadequate health care. Another example can be found in the Maria camp in Greece ([Lupieri, 2021](#)). The main cause of this pandemic is poor hygiene, as migrants and refugees share the same toilets, soap, and water sources ([Litzkow, 2021](#)).

Communication Barriers

Because each country has its own mother tongue, the problem does not end there. As a result, if information is given to migrants and refugees, the language plays a different role. Many other factors contribute to the spread of pandemics among migrants and refugees, including a lack of social support, communication barriers, a poor livelihood system, and so on ([International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies, 2020](#)). Just keep in mind that when these migrants and refugees are given advice on how to avoid the pandemic, it should be done in their native language. The harsh reality is that organisations that work with migrants and refugees do not understand their languages, and vice versa, making communication difficult ([Translators Without Borders & Mixed Migration Platform, 2017](#)). In such a situation, how many migrants and refugees remain unknown is beyond the scope of the necessary information. Language barriers not only prevent access to information, but also prevent access to other forms of assistance. As an example, in the survey, a 61-year-old woman named Filipina stated that when she called her hospice général for assistance, she found it difficult to communicate with him because he was responding in French, and Filipinas did not speak French ([Burton-Jeangros et al., 2020](#)).

Xenophobia

Although xenophobia and racism are already prevalent in our society, their impact was amplified during the pandemic. Whereas xenophobia discriminates against individuals on the basis of their status as outsiders or foreigners, racism discriminates on physical and ideological grounds such as skin colour, language, and so on. On the one hand, while governments attempted to halt the pandemic in 2020, xenophobia and racism were on the rise ([Hennebry & KC, 2020](#)). Haryana's Home Minister, for example, referred to Haryanvi workers in Delhi as "Corona carriers" ([Bhanot et al., 2020](#)). Similarly, the South African government decided to construct a 40-kilometer fence along the border between South Africa and Zimbabwe to prevent the spread of Covid-19, which was perceived as creating a xenophobic atmosphere among South African citizens ([Mukumbang, 2021](#)). During the early

Subhash Kumar Baitha, Rinkal Tyagi, Souvik Chatterjee:

Impacts of Covid-19 on Migrants and Refugees

Covid-19 era, Asian people were targeted in xenophobic incidents all over the world. Later, expatriates from countries where Sars-Cov-2 has been identified, such as South Africa, the United Kingdom, Brazil, and India, have reported xenophobic incidents (Mukumbang, 2021).

Education

The children of migrants and the displaced are the ones who suffer the most from any emergency or pandemic. While more than 31 million children lived in refugee camps in 2018, approximately 33 million children were displaced from their home country in 2019. They are not provided with adequate health care, education, or living conditions; instead, they are housed in overcrowded camps. Even before the pandemic, refugee children struggled to complete their education, with language posing a significant barrier. Following Covid-19, education became increasingly reliant on online resources, making it impossible for refugee students to obtain an education.

The Jordanian lockdown affected approximately 18,000 Syrian refugee students, though UNHCR and UNICEF are assisting these students in continuing their studies. A similar problem was seen among Rohingya refugees, with the Bangladesh government promising to solve the problems of these children. But the question is whether their problems will be completely resolved. Because, once the pandemic has subsided, most children will be required to work in order to help their families cope with the financial crisis, it will be difficult for them to continue their education.

CONCLUSION

Although everyone is aware of the plight of all migrants and refugees, is this enough to comprehend their plight? It is not enough to understand the situation of migrants and refugees in today's critical pandemic; it is also necessary to find solutions to their problems. Governments all over the world must also take some sort of welfare measures to help these migrants and refugees. As previously stated, the number of refugees and migrants has increased even while the pandemic is ongoing. As the population grows, it becomes more difficult to meet their basic needs such as health and education. It is critical to solve health-related problems in the Covid-19 era. UN organisations such as WHO, UNHCR, and IOM have also stated that if the world does not include vulnerable people such as migrants and refugees in this crisis, all measures to address the crisis will fail (Ivakhnyuk, 2020). Rather than exacerbating their problems during this pandemic, there is a need to provide them with better health care and insist on improving their living conditions.

REFERENCES

- Bhanot, D., Singh, T., Verma, S. K., & Sharad, S. (2020). Stigma and Discrimination During COVID-19 Pandemic. *Frontiers in Public Health*, 8. <https://doi.org/10.3389/fpubh.2020.577018>
- Burton-Jeangros, C., Duvoisin, A., Lachat, S., Consoli, L., Fakhoury, J., & Jackson, Y. (2020). The Impact of the Covid-19 Pandemic and the Lockdown on the Health and Living Conditions of Undocumented Migrants and Migrants Undergoing Legal Status Regularization. *Frontiers in Public Health*, 8. <https://doi.org/10.3389/fpubh.2020.596887>
- Hennebry, J., & KC, H. (2020). *uarantined: Xenophobia and migrant workers during the Covid-19 pandemic*. International Organization for Migration, Geneva. <https://publications.iom.int/system/files/pdf/quarantined.pdf>

- International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies. (2020). *Least Protected, Most Affected: Migrants and refugees facing extraordinary risks during the COVID-19 pandemic*. <https://www.ifrc.org/sites/default/files/IFRC-report-COVID19-migrants-least-protected-most-affected.pdf>
- International Labour Organization. (2021, June 2). *An update on the youth labour market impact of the COVID-19 crisis: [ILO Brief]*. https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/documents/briefingnote/wcms_795479.pdf
- International Labour Organization (2022). *World Employment and Social Outlook: Trends 2021*. Retrieved from <https://www.ilo.org/global/research/global-reports/weso/trends2021/lang--en/index.html>
- Ivakhnyuk, I. (2020). Coronavirus pandemic challenges migrants worldwide and in Russia. *Population and Economics*, 4(2), 49–55. <https://doi.org/10.3897/popecon.4.e53201>
- Khanna, A. (2020). Impact of Migration of Labour Force due to Global COVID-19 Pandemic with Reference to India. *Journal of Health Management*, 22(2), 181–191. <https://doi.org/10.1177/0972063420935542>
- Leimer, R. (2021, June 25). *5 Countries with the Most Immigrants*. CitizenPath. Retrieved 13 September 2021, from <https://citizenpath.com/countries-with-the-most-immigrants/>
- Litzkow, J. (2021, July 15). *The impact of COVID-19 on refugees and migrants: data and observations from MMC's 4Mi program*. Mixed Migration Centre. Retrieved 16 September 2021, from <https://mixedmigration.org/articles/the-impact-of-covid-19-on-refugees-and-migrants-data-and-observations-from-mmcs-4mi-program/>
- Lupieri, S. (2021). Refugee Health During the Covid-19 Pandemic: A Review of Global Policy Responses. *Risk Management and Healthcare Policy*, 14, 1373–1378. <https://doi.org/10.2147/rmhp.s259680>
- Molina, V., & Forin, R. (2021, February 19). *Expectations following Biden's promises: what effect on mixed migration? (en, sp)*. Mixed Migration Centre. Retrieved 12 March 2022, from <https://mixedmigration.org/articles/expectations-following-bidens-promises-what-effect-on-mixed-migration/>
- Mukumbang, F. C. (2021). Pervasive systemic drivers underpin COVID-19 vulnerabilities in migrants. *International Journal for Equity in Health*, 20(1). <https://doi.org/10.1186/s12939-021-01487-2>
- Sheth, H. (2020, March 20). *COVID-19 could result in loss of nearly 25 million jobs worldwide: ILO*. The Hindu Business Line. Retrieved 9 October 2021, from <https://www.thehindubusinessline.com/news/covid-19-could-result-in-loss-of-nearly-25-million-jobs-worldwide-ilo/article31116414.ece>
- Siegfried, K. (2021, April). *The Refugee Brief* (No. 23). The United Nations High Commissioner for Refugees. <https://www.unhcr.org/refugeebrief/the-refugee-brief-23-april-2021/>

- Translators Without Borders & Mixed Migration Platform. (2017, September). *Putting Language on the Map in the European Refugee Response*. Mixed Migration Platform. <https://translatorswithoutborders.org/wp-content/uploads/2017/04/Putting-language-on-the-map.pdf>
- UN DESA. (2020). *International Migrant Stock | Population Division*. United Nations. <https://www.un.org/development/desa/pd/content/international-migrant-stock>
- UNHCR. (2020, December 9). *Forced displacement passes 80 million by mid-2020 as COVID-19 tests refugee protection globally*. The Office of the United Nations High Commissioner for Refugees. Retrieved 12 April 2021, from <https://www.unhcr.org/news/press/2020/12/5fcf94a04/forced-displacement-passes-80-million-mid-2020-covid-19-tests-refugee-protection.html>
- UNITED NATIONS. (2022). *Refugees and Migrants*. Retrieved 13 April 2022, from <https://refugeesmigrants.un.org/>
- United Nations Department of Economic and Social Affairs, Population Division. (2020). *International Migration 2020 Highlights* (ST/ESA/SER.A/452). <https://www.un.org/development/desa/pd/news/international-migration-2020>
- United Nations Economic and Social Commission for Western Asia. (2020). *Impact of COVID-19 on Migrants and Refugees in the Arab Region*. United Nations. https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---arabstates/---ro-beirut/documents/publication/wcms_764756.pdf
- USA for UNHCR. (2022). *What is a Refugee*. <https://www.unrefugees.org/refugee-facts/what-is-a-refugee/#:%7E:text=A%20refugee%20is%20someone%20who,in%20a%20particular%20social%20group.>
- World Health Organization. (2020). *Apart Together survey: preliminary overview of refugees and migrants self-reported impact of COVID-19*. <https://www.who.int/publications/i/item/9789240017924>



Rekonsiliasi Politik Pasca Pilpres 2019: Menumbuhkan Semangat Kebangsaan dalam Konstruksi Sosial Budaya

Jerry Indrawan^{1*}, Anwar Ilmar¹; Ardli Johan Kusuma¹

¹ Jurusan Ilmu Politik, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, 12450, Jakarta-Indonesia

Info Artikel

Dikirim: Mei 30, 2022

Diterima: Jul 17, 2022

Dipublikasi: Jul 31, 2022

Kata Kunci:

Konstruksi Sosial Budaya;
Pemilihan Presiden;
Rekonsiliasi Politik;
Semangat Kebangsaan;

Koresponden:

Jerry Indrawan

Jurusan Ilmu Politik,
Universitas Pembangunan
Veteran Jakarta

Email:

jerry.indrawan@upnvj.ac.id

Sitasi Cantuman:

Indrawan, J., Ilmar, A.,
Kusuma, A. J. K. (2022).
Rekonsiliasi Politik Pasca
Pilpres 2019: Menumbuhkan
Semangat Kebangsaan dalam
Konstruksi Sosial. *Journal of
Political Issues*. 4(1); 50-61.
<https://doi.org/10.33019/jpi.v4i1.78>



DOI:

<https://doi.org/10.33019/jpi.v4i1.78>

Lisensi:



Attribution-NonCommercial-
ShareAlike 4.0 International
(CC- BY-NC-SA 4.0)



ABSTRAK

Abstract The political contestation in the 2019 election has had a surprising impact. Regardless of who wins, this nation seems to be divided into two camps, namely Jokowi camp (01) and Prabowo camp (02). Political, social and cultural polarization occurs from the elite level to the community. The potential for national disintegration or disintegration can emerge and become a threat to the establishment of our beloved Unitary Republic of Indonesia (NKRI) if there is no real effort to improve it. For this reason, a real effort is needed to solve this problem. national reconciliation to reunite the people of the nation who are separated from their national cords. Reconciliation that occurs must be comprehensive so that it has a positive impact on all levels, both elites and communities, and is carried out simultaneously in a top-down, as well as bottom-up manner. Then, reconciliation after the presidential election must also foster a spirit of nationalism in the socio-cultural construction so that after the reconciliation of each element of the nation will automatically unite to achieve national goals and ideals. Responding to the condition of the nation, this paper wants to discuss how political reconciliation should be carried out to reunite the conflicting parties after the 2019 presidential election. This reconciliation must ultimately be able to foster a spirit of nationalism in socio-cultural construction.

Abstrak Kontestasi politik pada Pemilu 2019 lalu memiliki dampak yang cukup mengejutkan. Terlepas dari siapa yang menang, bangsa ini terkesan terbagi menjadi dua kubu, yaitu kubu Jokowi (01) dan kubu Prabowo (02). Polarisasi politik, sosial, dan budaya terjadi pada level elit hingga masyarakat. Potensi perpecahan atau disintegrasi bangsa bisa saja muncul dan menjadi ancaman bagi tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang kita cintai ini jika tidak ada upaya nyata untuk memperbaikinya. Untuk itu, diperlukan sebuah upaya nyata untuk menyelesaikan masalah ini. rekonsiliasi nasional untuk menyatukan kembali insan-insan bangsa yang terlepas tali kebangsaannya. Rekonsiliasi yang terjadi harus bersifat menyeluruh sehingga berdampak positif ke semua lapisan, baik elit, maupun masyarakat, dan dilakukan bersamaan secara top-down, maupun bottom-up. Kemudian, rekonsiliasi pasca Pilpres ini juga harus menumbuhkan semangat kebangsaan dalam konstruksi sosial budaya agar pasca rekonsiliasi setiap elemen bangsa secara otomatis akan bersatu padu untuk mencapai tujuan dan cita-cita nasional. Menyikapi kondisi bangsa yang demikian, tulisan ini ingin membahas tentang bagaimana rekonsiliasi politik sebaiknya dilakukan untuk mempersatukan kembali pihak-pihak yang bertikai pasca Pilpres 2019. Rekonsiliasi yang dilakukan ini pada akhirnya harus dapat menumbuhkan semangat kebangsaan dalam konstruksi sosial budaya.

Tentang:

Jerry Indrawan menyelesaikan Studi Magister di Universitas Pertahanan pada Tahun 2014. Saat ini penulis adalah dosen di Jurusan Ilmu Politik Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.

Anwar Ilmar menyelesaikan Studi Magister di Jurusan Ilmu Politik Universitas Indonesia pada tahun 2016. Saat ini penulis adalah dosen di Jurusan Ilmu Politik Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.

Ardli Johan Kusuma menyelesaikan Studi Doktor di Jurusan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta pada tahun 2020. Saat ini penulis adalah dosen di Jurusan Ilmu Politik Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.

PENDAHULUAN

Kemenangan Joko Widodo dan Ma'ruf Amin dalam Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) tahun 2019 lalu menyisakan kekhawatiran yang mendalam bagi pelaksanaan demokrasi di Indonesia yang baru seumur jagung ini. Peristiwa kerusuhan yang sempat melanda ibukota pasca putusan resmi Komisi Pemilihan Umum (KPU) menjadi tantangan bagi kehidupan berdemokrasi di negeri ini yang sudah berjalan kurang lebih dua dekade. Akibatnya, terjadi polarisasi politik, sosial, dan budaya terjadi pada level elit hingga masyarakat.

Polarisasi sosial dan budaya adalah potensi perpecahan yang muncul karena kuatnya perbedaan politik pasca Pilpres lalu. Kontestasi tajam antara pendukung Jokowi dan Prabowo yang terjadi di semua lini membuat persaingan ini tidak hanya terjadi di ranah politik. Bidang sosial dan budaya juga merasakan dampak dari perseteruan ini. Hal ini bisa dilihat dari panasnya situasi dan kondisi masyarakat Indonesia saat itu. Menurut penulis, ranah ini adalah ranah sosial dan budaya, bukan hanya politik, karena aktornya adalah masyarakat, bukan hanya politisi. Jika dibiarkan, potensi perpecahan atau disintegrasi bangsa bisa saja muncul dan mengancam negara ini.

Dua dekade bukanlah tanda bahwa demokrasi kita sudah berjalan efektif, di mana demokrasi substansial menjadi prioritas. Namun, dua puluh empat tahun demokrasi kita, terutama pasca Pilpres 2019 kemarin, menyadarkan kita bahwa implementasi demokrasi di Indonesia masih rapuh (*fragile*). Demokrasi yang terjadi baru sebatas prosedural, yaitu bahwa kita mampu melaksanakan prosesnya dengan baik, seperti pemilu atau pilkada berjalan rutin lima tahun sekali. Perangkat-perangkat demokrasi yang tersedia, seperti adanya lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif, juga menandakan demokrasi prosedural.

Penulis merasa bangsa ini mampu dengan baik menyelenggarakan pesta rakyat ini dengan sangat luar biasa baiknya. Sejak 1999, pelaksanaan pemilu berjalan relatif tanpa hambatan berarti. Ditambah dengan pilkada, yang juga menggunakan sistem demokrasi langsung, praktis prosedur menjalankan pemilihan umum sudah dapat dilakukan dengan optimal. Semua perangkat yang dibutuhkan untuk menyelenggarakan sebuah pemilihan politik berskala besar sudah disiapkan, mulai dari kesiapan aturan, penyelenggaraan, sampai pada pesertanya.

Namun, ada yang kurang dalam pelaksanaan pemilu macam itu. Demokrasi tidak hanya soal prosedural belaka. Pemilu bukan hanya sekedar dilakukan, seperti rakyat mencoblos dan wakil rakyat dicoblos. Demokrasi harus dilakukan secara substansial, yaitu dengan menerima hasilnya dengan baik. Demokrasi tidak diukur dari seberapa bagus instrumen yang disiapkan, namun dari seberapa bagus peserta yang ambil bagian untuk menyikapi hasilnya.

Jangan melihat demokrasi sebagai sebuah hal yang tangible, namun intangible. Kaum demokrat menempatkan kepentingan pribadinya di bawah kepentingan negara dan bangsa. Bukankah demokrasi pertama kali muncul karena kelaliman dari penguasa otoriter yang hanya mementingkan kepentingannya sendiri. Demokrasi menjadi anti-tesis dari egoisme. Demokrasi adalah sintesis yang berpihak pada apa yang terbaik bagi kepentingan orang banyak.

Demokrasi adalah alat. Alat untuk membawa sebuah bangsa menuju kesejahteraan. Jika demokrasi saja hanyalah alat, apalagi pemilu. Ekses dari pemilu adalah kesejahteraan bangsa dan negara, bukan konflik horisontal. Pemilu hanya kendaraan yang mengantar sang pemimpin terpilih untuk menerapkan kebijakan-kebijakan yang nantinya akan membawa kaum yang dipimpinnya sesuai dengan cita-cita luhur bangsa tersebut ketika awal berdiri.

Setiap negara pasti bercita-cita untuk memakmurkan dan mensejahterakan rakyat di dalamnya. Tidak ada yang ingin sebaliknya. Bahkan, konflik dan perang muncul diakibatkan semua pihak sama-sama ingin membawa kesejahteraan pada bangsanya, hanya caranya saja yang berbeda. Begitu pula di Indonesia. Tidak ada niatan, semakin-yakinnya penulis, dari

Jokowi maupun Prabowo untuk menghancurkan bangsa ini hanya agar dapat dipilih sebagai pemimpin negara. Jika hancur, negara apa yang mau dipimpin? Percuma menjadi presiden jika masyarakat yang dipimpinnya berkelahi sendiri, sehingga negara pecah.

Di Barat, konsep tentang rekonsiliasi yang menekankan akan pentingnya meningkatkan hubungan sosial diantara masyarakat ternyata sangat terbatas dan kontekstual. Sebuah kasus di Angola menunjukkan bahwa rekonsiliasi adalah sebuah konstruksi sosial, di mana pembentukannya dilakukan melalui konsepsi-konsepsi lokal. Bagi banyak masyarakat pedesaan di Angola, konsepsi sosial dan spiritual terhubung sangat erat, apalagi segi spiritualnya. Di sana, upaya rekonsiliasi sangat mengedepankan pendekatan yang sifatnya spiritual, karena itu penting bagi kita untuk mengetahui konsepsi dan makna-makna lokal Angola (Wessells, 2009).

Salah satu parameter yang menjelaskan soal konflik dan polarisasi bisa diamati dari terbagi duanya masyarakat menjadi kelompok-kelompok yang bertentangan. Salah satu contohnya adalah bentrok antara gerakan #2019GantiPresiden dengan Gerakan yang menggunakan T-shirt #DiaSibukKerja di lokasi Car Free Day, Jakarta, tahun 2019 lalu. Sebuah polarisasi yang hanya terjadi di media sosial pada awalnya, akan tetapi berkembang dan merembet ke dunia nyata, diikuti dengan gesekan-gesekan langsung secara fisik. Kejadian ini mengingatkan kita pada peristiwa serupa yang terjadi pada Pilkada DKI Jakarta tahun 2017 silam, hanya saja kali ini resonansinya lebih kencang karena tingkatnya sudah mencapai pemilu presiden (Ri'fan, 2018).

Berangkat dari realita itulah tulisan ini ingin mengangkat masalah rekonsiliasi. Bukan rekonsiliasi dalam skala besar, seperti halnya konflik bersenjata atau bahkan perang, namun rekonsiliasi politik antar kubu yang selama ini mendukung pasangan calon (paslon) 01 Jokowi dan 02 Prabowo. Penulis ingin bicara bagaimana rekonsiliasi politik harusnya dilakukan untuk merajut kembali benang ke-bhineka-an yang sempat terputus saat kontestasi digelar tahun 2019 lalu. Setelah itu, pasca rekonsiliasi dibutuhkan semangat baru dalam memandang kebangsaan kita. Hal tersebut dapat dilakukan melalui konstruksi sosial budaya.

METODE PENELITIAN

Tulisan ini menggunakan metode kualitatif yang bersifat deskriptif-analisis dengan pengumpulan data dilakukan secara studi pustaka. Metode penelitian kualitatif deskriptif juga bisa dilakukan untuk memberi deskripsi fenomena yang ada, baik alami maupun buatan manusia. Fenomena tersebut berupa bentuk, aktivitas, karakteristik, perubahan, hubungan, kesamaan, dan perbedaan antara fenomena yang satu dengan fenomena lainnya (Sukmadinata, 2006). Fenomena yang penulis teliti adalah konstruksi sosial budaya, khususnya pasca konflik yang terjadi saat Pilpres 2019 Penelitian kualitatif deskriptif merupakan penelitian untuk memecahkan masalah yang akan diteliti dengan melakukan penggambaran subjek dan objek yang akan diteliti tersebut. Subjek dan objek tersebut bisa dalam bentuk lembaga, komunitas, individu, dan lain-lain. Analisis yang dilakukan harus sesuai dengan kenyataan di lapangan, dalam arti faktual dan sesuai realita (Nawawi, 1997).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Rekonsiliasi Politik pasca Pilpres 2019

Sejak Jokowi dan Prabowo sudah digadang-gadang akan menjadi capres tahun 2019, di Indonesia tensi politik setiap harinya semakin panas. Sekalipun ada kelompok masyarakat yang memilih tetap diam, namun banyak yang terlibat dalam pertentangan dan konflik yang terjadi antara dua kubu yang bertarung tersebut. Hal ini membuat banyak perdebatan, bahkan konflik muncul di akar rumput dan diantara sesama masyarakat, antara mereka yang

Jerry Indrawan, Anwar Ilmar, Ardli Johan Kusuma:

Rekonsiliasi Politik Pasca Pilpres 2019: Menumbuhkan Semangat Kebangsaan dalam Konstruksi Sosial

mendukung Jokowi dengan yang mendukung Prabowo. Konflik ini terjadi hanya karena ada perbedaan pilihan politik. Sebuah situasi yang merusak jalannya kehidupan demokrasi di negeri ini (Rohiman, 2019).

Teori rekonsiliasi dipilih penulis dalam tulisan ini karena acapkali digunakan untuk proses perdamaian nasional. Rekonsiliasi didefinisikan sebagai upaya untuk mengembangkan sikap saling menerima perdamaian antara individu atau kelompok yang pernah atau saat ini menjadi musuh". Menurut Priscilla Hayner agar proses rekonsiliasi tercipta, sebuah kelompok (negara misalnya) mutlak harus mengetahui dan memahami terlebih dahulu kebenaran yang terjadi di masa lalu (Hayner, 2005).

Proses rekonsiliasi yang ideal menurut Bar-Tal adalah memulai proses rekonsiliasi ketika pihak-pihak yang berkonflik mulai untuk merubah keyakinan, sikap, tujuan, motivasi, dan emosinya terhadap konflik tersebut, dan juga bagaimana hubungan di masa depan antara kedua pihak yang bertikai itu. Agar proses rekonsiliasinya efektif, harus dilakukan secara top down dan bottom up secara bersamaan. Bar-Tal juga mengatakan bahwa kepercayaan akan sebuah tujuan bersama di suatu masyarakat, yang mendasari timbulnya sebuah konflik, harus dirubah. Sekarang, masyarakat harus mampu mengkompromikan tujuan bersama yang berguna bagi semua pihak, yang akan membawa pada hubungan baik antar sesama anggota masyarakat (Bar-Tal, 2009).

Selain itu, perubahan psikologis dari seorang pemimpin sangat mempengaruhi masyarakat yang dipimpinnya. Karena itu, pemimpin menjadi elemen yang sangat penting dalam proses rekonsiliasi karena pemimpinlah yang menginisiasi terjadinya negosiasi untuk mencapai resolusi damai. Pemimpin juga dalam posisi terdepan untuk memimpin proses rekonsiliasi, khususnya apabila diantara mereka memiliki komitmen besar terhadap proses tersebut dan memelihara hubungan baik antar sesama pemimpin. Pemimpin memiliki peran penting untuk memulai dan mengimplementasikan kebijakan-kebijakan yang terkait upaya rekonsiliasi dan rekonstruksi, agar dipatuhi oleh semua masyarakat yang dipimpinnya (Bar-Tal, 2009).

Secara luas, rekonsiliasi adalah soal "menutup buku" masalah-masalah yang terjadi di masa lalu. Untuk itu, rekonsiliasi harus mampu membuat harmonisasi antara perspektif atau pandangan yang tidak seimbang, serta mampu menerima kebenaran yang bisa jadi menyakitkan. Jika berhasil, setidaknya perbedaan atau konflik yang terjadi masih mampu dipahami dan dimengerti bersama. Rekonsiliasi tidak berarti melupakan kesalahan atau pelanggaran, akan tetapi diselesaikan lewat proses evaluatif. Maka dari itu, tindakan menuduh, lalu membantah, kemudian balas menuduh, yang mengakibatkan adanya perpecahan harus dihentikan (Asmal, et.al, 1996).

Rekonsiliasi memiliki beberapa area cakupan sebagai sebuah disiplin ilmu, khususnya dalam bidang resolusi konflik. Beberapa ahli telah menyusun setidaknya lima kategori rekonsiliasi. Kategori pertama, berdasarkan teori-teori dan model-model, seperti pilihan rasional atau game theory, teori kebutuhan manusia, sosial emosional versus model-model instrumental, dan model pengampunan (Muluk, 2009). Rekonsiliasi memiliki implikasi membangun atau membangun kembali hubungan yang tidak lagi dihantui konflik dan kebencian masa lalu (Hayner, 1999).

Apabila niat rekonsiliasi hendak diwujudkan, maka keempat hal yang disampaikan oleh Ubedillah Badrun berikut dapat menjadi pertimbangan. Pertama, rekonsiliasi wajib mendahulukan kepentingan nasional, bukan kelompok, serta harus dilakukan masing-masing pihak tanpa paksaan apa pun. Kedua, harus ada tokoh bangsa yang tidak terlibat kontestasi politik ini, namun siap menjadi mediator. Ketiga, universitas dapat menjadi mediator proses rekonsiliasi apabila tidak ada tokoh bangsa yang tersedia atau bersedia. Sebab, kalangan akademis diharapkan independensinya terjaga. Kampus yang memiliki rekam jejak dan kredibilitas baik dapat dipercaya untuk melakukan rekonsiliasi. Keempat, rekonsiliasi wajib mewakili kepentingan dari pihak-pihak yang bertikai, sekalipun tetap mengutamakan

kepentingan nasional di atasnya. Rekonsiliasi yang terjadi juga harus mengevaluasi sistem politik yang sedang dijalankan saat ini. Hal ini karena sistem politik Indonesia saat ini menjadi penyebab utama dari konflik, perdebatan, dan ketegangan yang terjadi pasca Pilpres (Rizqa, 2019).

Suka atau tidak kita harus mengakui bahwa pasca Pilpres 2019 konflik antara kubu paslon 01, yaitu Jokowi-Amin, dengan paslon 02, yaitu Prabowo-Sandiaga, yang terjadi secara massif, tidak hanya di antara tim sukses, namun juga pendukungnya (rakyat juga termasuk). Sebuah konflik yang membutuhkan rekonsiliasi politik untuk menyelesaikannya. Untuk itu, sebelum membahas tentang rekonsiliasi politik dan bagaimana menumbuhkan semangat kebangsaan, kita pahami dulu jenis konflik yang terjadi pasca Pilpres tersebut.

Terdapat dua jenis konflik. Pertama, konflik ideologis, yang terwujud dalam bentuk konflik antara sistem nilai yang dianut dan menjadi ideologi dari berbagai kesatuan sosial. Konflik model ini jelas terlihat dalam konflik perbedaan agama, keyakinan, dan suku bangsa. Kedua konflik politis, yang terjadi dalam bentuk pertentangan dalam pembagian status kekuasaan dan sumber-sumber ekonomi yang terbatas di masyarakat (Nasikun, 2004). Jelas bahwa konflik yang terjadi pasca Pilpres adalah konflik politis, jika kita analisa menurut jenis konflik dari Nasikun di atas. Oleh karenanya, rekonsiliasi yang harus dilakukan adalah rekonsiliasi politik dengan menumbuhkan semangat kebangsaan dalam konstruksi sosial budaya.

Masifnya perbedaan antara kubu 01 versus 02 dalam Pilpres2019, termasuk sampai kerusuhan atau demonstrasi anarkis yang terjadi 21-21 Mei tahun yang sama, membuat perlunya terjadi rekonsiliasi individual dan rekonsiliasi politik. Para elit politik harus mendorong terjadinya rekonsiliasi pada level tersebut. Konflik atau pertentangan di masa lalu harus ditinggalkan, sekalipun tidak dilupakan. “Perang” bisa saja terjadi, namun dalam konteks negosiasi dan di meja perundingan.

Rekonsiliasi di tingkat politik atau nasional, yang diinisiasi oleh para elit politik, membuat permusuhan di tingkat grassroot atau akar rumput dengan sendirinya berkurang. Rekonsiliasi individu biasanya terjadi ketika pada tataran atas, perdamaian sudah bisa dicapai. Masyarakat akan terus berkonflik jika pemimpinnya tetap melakukannya. Sebuah ajakan untuk berdamai dari elit dapat menyembuhkan luka akibat proses eleksi yang tidak dimenangkan. Rekonsiliasi individu lebih mudah tercapai karena budaya politik Indonesia yang plural dan inklusif membuat proses kembali mengikat semangat kebangsaan relatif cepat.

Sekalipun, memang kehidupan berdemokrasi masyarakat di tingkat bawah juga diuji dari peristiwa Pilpres kemarin, namun penulis berpendapat bahwa konstruksi kebangsaan dan ke-Indonesia-an kita somehow akan menihilkan semua upaya-upaya kebencian antar-sesama anak bangsa. Inklusifisme bangsa kita yang terbiasa dengan perbedaan adalah modal utama rekonsiliasi di tingkat individu. Penulis katakan di awal, demokrasi substansial menekankan pada upaya mengutamakan kepentingan bangsa dan negara, bukan pada kepentingan pribadi atau golongan, apalagi kelompok tertentu. Suasana kebatinan itu adalah arus sungai yang deras, yang akan mengantarkan bangsa ini pada semangat kebangsaan yang baru.

Selanjutnya, rekonsiliasi di tingkat masyarakat dapat dimulai dari pemerintah yang tidak membatasi kebebasan masyarakat untuk berdemokrasi, khususnya melalui medium siber. Demokrasi deliberatif menggambarkan sebuah ruang diskursus yang terbuka bagi masyarakat, yang menyediakan kesempatan untuk melakukan diskusi tentang kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Diskusi ruang publik tersebut hadir dengan segala macam argumen yang logis dan rasional, untuk kemudian menelurkan sebuah keputusan kolektif. Demokrasi deliberatif dicetuskan oleh Jurgen Habermas yang mendefinisikan demokrasi jenis ini sebagai sebuah manifestasi ruang publik yang memberikan kesempatan

Jerry Indrawan, Anwar Ilmar, Ardli Johan Kusuma:

Rekonsiliasi Politik Pasca Pilpres 2019: Menumbuhkan Semangat Kebangsaan dalam Konstruksi Sosial

bagi publik itu sendiri untuk berpendapat dan memberikan kritik terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah. Demokrasi deliberatif alhasil mampu memberikan kesempatan bagi publik untuk memperkuat demokrasi (Aji & Indrawan, 2019).

Dalam media daring otoritas individu membangun kekuasaan. Otoritas tersebut menjadi arti dari definisi media baru yang isinya tentang kemerdekaan individu mengatur dirinya sendiri. Media baru memiliki premis untuk selalu mempertanyakan otoritas yang lebih tinggi (negara) dan berpikirlah untuk diri sendiri. Sifat individu di media baru ini bisa mewujudkan ruang publik yang demokratis. Otoritas yang sebelumnya ada di tangan media-media tradisional, dan juga dibawah kekangan negara, saat ini ada di tangan para individu yang ada di media baru. Situasi yang membuat media-media daring menjadi harapan bagi pewujudan kedaulatan rakyat dalam proses demokrasi (Aji & Indrawan, 2019).

Pemerintah di negara-negara demokratis harus bekerja berdasarkan parameter kebebasan berbicara untuk membangun daya tahan (resilience) dan penangkalan (deterrence). Membangun sebuah komunitas masyarakat yang sehat digital, yang dapat dengan cepat merespon ancaman terhadap demokrasi siber yang muncul, adalah hal yang dapat dilakukan oleh pemerintah. Tidak seperti negara-negara otoriter yang mengandalkan pada solusi top-down, demokrasi memiliki keunggulan untuk melahirkan solusi langsung dari akar rumput untuk menangani masalah demokrasi siber (Aji & Indrawan, 2019).

Menurut Aji & Indrawan (2019), pendidikan politik siber dapat dimanfaatkan oleh masyarakat atau publik untuk menciptakan kontra-narasi yang konstruktif. Kontra-narasi ini contohnya adalah memberikan pembudayaan siber untuk meningkatkan taraf edukasi masyarakat terkait media baru dan juga politik siber. Hoaks dan kampanye negatif adalah masalah utama dalam politik siber, karenanya masyarakat harus melawan dengan menciptakan firewall dari dalam mereka sendiri. Peran masyarakat dalam demokrasi siber akan menjadi maksimal jika mereka sudah tercerdaskan, melalui pendidikan politik siber misalnya. Bagaimanapun, demokrasi bersifat bottom-up. Tidak ada pemerintahan yang demokratis jika rakyatnya tidak demokratis. Jika negara tanggap, dalam hal ini pemerintahan Joko Widodo, maka rekonsiliasi di tingkat masyarakat (individu) dapat berjalan dengan lancar.

Kemudian, menarik juga kita melihat usulan pengamat politik Muhammad Qodari, yang mengusulkan untuk dibuatnya kabinet rekonsiliasi oleh Presiden Jokowi untuk mencegah konflik antar-masyarakat pasca Pilpres. Pos menteri-menteri Jokowi nantinya akan ditempati oleh tokoh-tokoh terbaik dari kedua koalisi yang berkontestasi. Diperlukannya kabinet gabungan jenis ini karena menurut Qodari di beberapa wilayah, seperti Aceh, Sumatera Barat, Sulawesi Utara, dan Bali, suara kedua kandidat presiden terpaut sangat jauh di angka 80-90%. Situasi ini membuat polarisasi antar kedua kubu menjadi semakin masif dan juga ekstrem. Polarisasi ini harus dihadapi dengan rekonsiliasi politik secara total agar tidak bereskalasi menjadi konflik horisontal dan vertikal (Jamil, 2019).

Bergabungnya koalisi Prabowo ke kubu Jokowi membuktikan bahwa pendapat Qodari di atas benar adanya. Sejauh ini, Prabowo yang diamanahkan menjabat Menteri Pertahanan mampu menjalankan tugasnya dengan sangat baik, tidak hanya sebagai Menhan, namun juga sebagai figus yang merekatkan kembali dua kubu yang tahun lalu berseteru. Penulis tidak pernah membayangkan bahwa kubu “cebong” dan “kampret” tadi, yang pada pemilu 2019 bersaing seolah-olah dapat membahayakan persatuan negara, sekarang malah bekerja sama untuk bahu-membahu menahkodai kapal besar bernama Indonesia ini. Sebuah rekonsiliasi yang tidak hanya menumbuhkan semangat kebangsaan, tetapi menunjukkan pada dunia bahwa Indonesia tetap satu, sekalipun banyak sekali perbedaannya.

Konstruksi Sosial dan Budaya

Setelah membahas bagaimana rekonsiliasi politik dilakukan untuk menyelesaikan konflik yang terjadi pasca Pilpres 2019, bagian ini akan membahas bagaimana menumbuhkan

semangat kebangsaan dalam konstruksi sosial budaya. Aspek sosial budaya dibutuhkan karena sekalipun jenis konflik yang terjadi bersifat politis, namun polarisasi yang diakibatkannya menyentuh aspek sosial budaya yang ada di masyarakat (akar rumput). Akar konflik pun adalah permasalahan kepemimpinan, yaitu siapa yang akan menjadi pemimpin rakyat Indonesia.

Atas dasar itu, membahas konstruksi sosial budaya kita tidak bisa menghilangkan aspek kepemimpinan, apalagi rekonsiliasi yang ingin dibangun adalah melibatkan kontestasi di tingkat elit yang terbawa sampai ke akar rumput. Masyarakat hanya akan lestari eksistensinya apabila memiliki nilai bersama. Nilai bersama itu tumbuh melalui interaksi sosial, di mana nilai itu akhirnya mempertautkan antara mereka yang berinteraksi. Seperangkat nilai yang bertautan itulah yang akhirnya mengendap membentuk budaya (Mashad, 2004).

Gaya kepemimpinan suatu masyarakat atau negara pada umumnya merupakan cerminan dari masyarakatnya. Artinya, kepribadian pemimpin merupakan wujud mini dari kepribadian masyarakat yang telah memilihnya menjadi pemimpin. Jarang sebuah masyarakat memilih pemimpin yang berkepribadian antagonis dengan kepribadian mereka. Kepribadian pemimpin hakekatnya terbentuk tidak terlepas dari pengaruh budaya masyarakat di mana dia hidup dan dibesarkan. Sebuah masyarakat dengan kultur yang demokratis akan cenderung melahirkan seorang pemimpin yang demokratis, dan sebaliknya sebuah masyarakat yang didominasi budaya kekerasan dan otoritarianisme, niscaya akan melahirkan pemimpin yang bergaya sama. Logika ini berlaku di mana saja, termasuk dalam konteks Indonesia (Mashad, 2004).

Hubungan antara manusia (sebagai produsen) dan dunia sosial (sebagai produknya), tetap merupakan hubungan yang dialektis. Manusia dan dunia sosialnya berinteraksi satu sama lain, dan produk berbalik memengaruhi produsennya. Eksternalisasi, objektivasi, dan internalisasi merupakan momen dalam suatu proses dialektis yang berlangsung terus-menerus. Mengabaikan satu momentum ini akan menghasilkan terjadinya distorsi dari keseluruhan proses. Tiga momentum dialektik tadi menjadi dasar dari teori konstruksi sosial Berger & Luckmann (Berger & Luckmann, 1990).

Perlu juga dipahami bahwa pada umumnya tipe kepemimpinan yang dikembangkan seseorang biasanya tidak lepas dari pengaruh situasi masyarakat pada saat ia sedang memangku jabatan kepemimpinan. Dalam masyarakat yang sedang mengalami kekacauan, khususnya perseteruan antar-kelompok yang sulit diatasi, bukan mustahil akan membuat resosialisasi gaya kepemimpinan. Kendati ia lahir dan dibesarkan dalam suasana demokratis, termasuk dipilih melalui cara yang demokratis, namun karena situasi kepemimpinannya diwarnai oleh situasi kekacauan, seperti pertentangan antara suku atau agama, maka tidak mustahil si pemimpin yang demokratis akan berubah menjadi otoriter dan bertindak keras guna mengendalikan situasi dan keadaan (Berger & Luckmann, 1990).

Masyarakat Indonesia adalah sebuah masyarakat plural, agamis, kekeluargaan, pencinta damai, gotong royong, dan tentunya inklusif. Budaya ini sudah turun temurun dipraktikkan dalam kehidupan setiap insan bangsa, termasuk mereka-mereka yang akhirnya dipilih menjadi pemimpinnya. Joko Widodo dan Prabowo Subianto adalah insan bangsa yang sejak kecil terekspos dengan budaya demikian di dalam kesehariannya. Konstruksi sosial dan budaya kita berangkat dari "DNA" yang namanya toleransi. Akan sulit bagi penulis untuk memahami bahwa hanya karena kalah pemilu, pihak yang kalah akan menghancurkan negeri ini dengan cara memecah belah rakyatnya.

Rekonsiliasi memang diperlukan, namun rekonsiliasi ini hanyalah karena perbedaan politik, bukan perbedaan semangat kebangsaan. Semangat kebangsaan kita dipengaruhi oleh

konstruksi sosial budaya yang kuat, yang telah ada berabad-abad lamanya. Tidak mungkin entitas asing yang bernama demokrasi datang lalu menghabisinya perlahan-lahan.

Di saat banyak negara-negara di dunia terpecah karena demokrasi, sebut saja Libia, Republik Afrika Tengah, Sudan, Suriah, Irak, Afghanistan, dll, negara kita tetap kokoh berdiri. Itu karena demokrasi menyerap nilai-nilai sosial dan budaya yang baik yang sudah ada di Indonesia, untuk kemudian dipraktekkan dalam mekanismenya yakni pemilu. Biarlah rekonsiliasi terjadi di level politik saja, yang menurut penulis, politik jauh lebih rendah statusnya dibandingkan level sosial dan budaya bangsa ini. Kontestasi dalam politik wajar terjadi. Democracy does not turn a blind eye to conflict. Begitu pula nilai-nilai bangsa ini yang juga penuh dengan perbedaan pendapat, pola pikir, cara pandang, bahkan cara beribadah. Namun, ketika berbicara Indonesia semua itu lenyap. Toleransi mengajarkan bangsa ini untuk mengutamakan kepentingan yang lebih besar dulu, baru kepentingan diri sendiri, sama halnya dengan demokrasi.

Selanjutnya, dalam konteks cyberpolitics kita dapat memaknai bahwa segala bentuk aktifitas masyarakat yang terkait kegiatan politik dalam ruang siber juga memerlukan nilai, norma, peraturan yang merupakan implementasi dari ide dan gagasan yang dapat membentuk budaya dalam konteks kognitif dari masyarakat dalam melakukan aktifitas politik di ruang siber. Apabila dalam kognitif individu-individu dalam masyarakat sudah berkembang nilai, norma, dan budaya yang santun, tidak merendahkan orang lain, tidak melakukan kebohongan publik, tidak menginformasikan sesuatu yang tidak benar (hoaks), maka akan membudaya di masyarakatnya untuk melakukan aktifitas politik di dunia siber dengan santun, jujur, amanah, dan menjunjung tinggi nilai-nilai toleransi yang akan menjaga persatuan dan kesatuan bangsa (Aji & Indrawan, 2019).

Pergeseran nilai sosial budaya ini juga dapat dimaknai sebagai wujud dari bentuk kebudayaan yang biasa disebut sebagai sistem sosial, yaitu suatu bentuk aktifitas dan tindakan yang berpola dari manusia. Apabila dalam wujud kebudayaan yang pertama tadi lebih mengarah kepada ruang kognitif manusia, dalam wujud kebudayaan yang kedua ini lebih mengarah kepada suatu pola tindakan dan aktifitas manusia. Antara sistem budaya dan sistem sosial saling terkait dan tidak terlepas korelasinya antar yang satu dengan yang lainnya. Kita juga dapat melihat dari contoh, seperti e-learning, e-commerce, dan e-government, dan sebagainya, apabila sudah berkembang dalam masyarakat untuk melakukan aktivitas dengan pola-pola tindakan yang menjunjung tinggi asas demokrasi, hak asasi manusia, integritas, kejujuran maka perilaku-perilaku masyarakat dalam dunia siber akan dilakukan dengan tindakan-tindakan yang benar, yang mematuhi aturan hukum, bukan demokrasi yang “kebablasan” (Aji & Indrawan, 2019).

Pergeseran nilai-nilai sosial budaya dapat juga dimaknai sebagai hasil dari terciptanya benda-benda yang dapat digunakan untuk beraktivitas di dalam ruang siber. Wujud kebudayaan fisik ini dapat menunjang implementasi dari penerapan wujud kebudayaan pertama dan kedua dalam konteks pergeseran nilai-nilai sosial budaya masyarakat dalam ruang siber. Walaupun dimungkinkan juga terdapat pandangan yang sebaliknya dikarenakan situasi dan kondisi yang berbeda-beda dalam suatu masyarakat. Wujud kebudayaan yang ketiga ini dapat berupa aplikasi, internet, perlengkapan dan peralatan teknologi informasi, dan lain-lain (Aji & Indrawan, 2019).

Sebuah transisi ke perdamaian memiliki arti bahwa konflik terbuka sudah berakhir, namun tidak berarti bahwa semua kekerasan politik atau ancaman kekerasan sudah berakhir. Bila ancaman demikian berlanjut, rekonsiliasi bisa tidak berakar. Rekonsiliasi jarang terjadi dengan segera, bahkan bisa sampai puluhan tahun. Pada akhirnya, rekonsiliasi di tingkat masyarakat akan bergantung pada faktor-faktor dan dinamika-dinamika yang tidak selalu bisa diramalkan atau dikendalikan (Hayner, 2005).

Kontestasi besar antara kubu 01 vs 02 ini memang hampir membuat perseteruan besar, bahkan hampir perpecahan, diantara sesama anak bangsa. Penulis berpendapat medium

siber memiliki dampak yang sangat besar akan hal itu. Akan tetapi, penulis juga optimis bahwa masa depan negeri ini akan cerah, karena bagaimanapun medium siber adalah benda mati. Dibelakangnya tetap ada manusia dengan nilai-nilai sosial dan budaya masing-masing. Banyaknya partisipasi politik melalui medium siber ini menunjukkan bahwa masyarakat tidak antipati pada politik. Justru, hal ini menunjukkan betapa concern dan pedulinya mereka pada bangsa mereka. Tidak akan ada konstruksi nilai-nilai sosial dan budaya baru yang terbentuk di medium siber, yang ada adalah manifestasi dari penggunaannya.

Oleh karena itu, yang terpenting dalam mengembangkan kultur demokrasi adalah kemampuan pemerintah dalam menyikapi fragmentasi sebagai konsekuensi demokrasi. Ketika fragmentasi masih berada dalam tataran pemerikayaan nilai demokrasi, maka negara tidak perlu mengintervensi. Dapat dibayangkan jika seluruh elemen masyarakat memiliki aspirasi seragam, tentunya negara akan berada pada posisi stagnan. Akan tetapi, jika fragmentasi mengarah pada anarki atau semangat disintegrasi, barulah negara perlu untuk melakukan intervensi. Integrasi dalam kehidupan bernegara akan terwujud jika pemerintah memiliki kemampuan menguasai wilayah yang ada di bawah kekuasaan yuridisnya, termasuk menguasai sikap rakyat, yang digambarkan sebagai loyalitas, kepatuhan, dan kesediaan untuk menempatkan urusan-urusan nasional di atas urusan-urusan lokal atau parokial (Mashad, 2004).

Fragmentasi politik dalam proses demokrasi tidak akan mengganggu integrasi bangsa jika spektrum politik memiliki semangat dan mekanisme yang menjamin terwujudnya integrasi horisontal (antara komponen bersaing), pada saat yang sama integrasi vertikal (antara pemerintah dengan komponen-komponen yang bersaing dalam masyarakat). Melalui semangat dan mekanisme tadi, maka fragmentasi politik dalam demokrasi akan dijalankan dalam semangat tingkah laku integratif untuk mengutamakan kepentingan bersama, bukan kelompok, individu, atau parokial (Mashad, 2004).

Sebenarnya, secara filosofis ideologis, Indonesia telah mempunyai landasan dalam pengaturan kultur kehidupan bermasyarakat melalui semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang mempunyai makna sangat ideal, yaitu mewujudkan keselarasan antara keragaman dengan kesatuan. Namun, selama ini semboyan tersebut sering diinterpretasikan, bahkan diamalkan secara keliru. Bukannya *unity in diversity*, tetapi *unity from diversity*. Implementasi yang keliru tersebut dijalankan melalui strategi kekerasan dan taktik penindasan. Segala interpretasi Pancasila dan UUD 1945 yang berbeda, apalagi bertentangan, dengan pemikiran dan kebijakan pemerintah langsung dianggap sebagai pengkhianatan dan perlawanan (Mashad, 2004).

Interpretasi keliru tadi akhirnya mengarah pada pengutamaan unsur kesatuan, sehingga cenderung mengorbankan keanekaragaman. Interpretasi itu akhirnya berdampak pada pola pikir penyeragaman. Bhinneka Tunggal Ika harusnya tidak dilihat sebagai penyeragaman, melainkan sebagai perwujudan keselarasan antara keragaman dan kesatuan. Eksistensi keragaman tetap diakui dan dijunjung tinggi, dengan sebuah orientasi yang sama terhadap eksistensi dan cita-cita bangsa Indonesia. Setiap komponen bangsa yang berbeda-beda tadi tetap merasa ikut memiliki negara bangsa dan punya kepentingan yang sama untuk bersatu mewujudkan dan melindungi eksistensi bangsa dari tantangan dan ancaman yang timbul (Mashad, 2004).

Melalui kebijakan pemerintah sekaligus kesadaran elemen-elemen masyarakat tadi, segenap komponen bangsa dengan segala ciri dan aspirasi yang spesifik tetap dapat mengekspresikan diri dalam konteks ke-Indonesia-an. Alhasil, jika nurani internal komponen bangsa merasa sebagai bagian dari Indonesia, apalagi merasa bangga sebagai elemen bangsa Indonesia, niscaya secara otomatis akan menumbuhkan rasa tanggung jawab kolektif bangsa (Mashad, 2004).

Jerry Indrawan, Anwar Ilmar, Ardli Johan Kusuma:

Rekonsiliasi Politik Pasca Pilpres 2019: Menumbuhkan Semangat Kebangsaan dalam Konstruksi Sosial

Terakhir, rekonsiliasi politik menjadi skala prioritas oleh presiden terpilih siapapun pemenangnya. Rekonsiliasi politik pasca Pilpres 2019 dimaksudkan sebagai agenda nasional untuk memulihkan kembali memulihkan hubungan pasca perhelatan Pilpres 2019. baik hubungan antar kontestan, tim sukses, simpatisan termasuk hubungan antar masyarakat. Rekonsiliasi politik harus didasari pada spirit persatuan nasional sebagai wahana untuk menyatukan perbedaan pandangan, ideologi, latar belakang sosial budaya, perbedaan partai politik, dan lain sebagainya. Tanpa adanya spirit ini, maka rekonsiliasi yang dilakukan hanya akan berjalan secara seremonial belaka (Setiobudi, 2019).

Siapa yang harus memulai? Agar rekonsiliasi politik dapat berjalan efektif, maka rekonsiliasi nasional harus dimulai oleh para kontestan Pilpres 2019, yakni pasangan Jokowi-Amien dan Prabowo-Sandi. Keberadaan para kontestan sebagai simbol perjuangan dan pertarungan politik dalam Pilpres 2019 dapat menjadi medan magnet untuk mengerakkan semua tim sukses dan simpatisannya agar dapat melakukan rekonsiliasi politik di semua lini dan semua daerah di Indonesia. Dengan jiwa besar dari kedua pasangan kandidat presiden dan wakil presiden merupakan salah satu kunci sukses utama tercapainya rekonsiliasi politik pasca Pilpres 2019, sehingga keselamatan dan masa depan bangsa menjadi sesuatu yang lebih utama dibandingkan dengan kepentingan kelompok dan golongan (Setiobudi, 2019).

Salah satu nilai karakter bangsa Indonesia adalah semangat kebangsaan, di mana berdasarkan definisi dari Wibowo, semangat kebangsaan dapat diartikan sebagai cara bertindak, berpikir, dan berwawasan yang mendahulukan apa yang menjadi kepentingan bangsa dan negara, bukan kepentingan pribadi atau kelompok. Perasaan kebersamaan dari sekelompok atau gabungan individu-individu yang merasa dirinya sebagai satu bangsa juga bisa dikatakan definisi dari semangat kebangsaan. Jadi, semangat kebangsaan menjadi bagian integral dari rasa nasionalisme juga (Wibowo, 2012).

Atas dasar itulah, optimisme penulis muncul bahwa pasca Pilpres kondisi kebangsaan dan ke-Indonesia-an kita justru akan semakin baik. Perselisihan yang terjadi pasca Pilpres 2019 kemarin hanyalah riak-riak kecil yang biasa terjadi dalam demokrasi. Ditambah dengan bersedianya kubu 02 bergabung menjadi bagian dari pemerintah dengan Prabowo menjadi Menteri Pertahanan. Bisa jadi inilah tanda dari Tuhan bahwa semangat kebangsaan kita mulai menuju ke arah demokrasi substansial di mana masyarakat mulai mengerti apa esensi demokrasi, bukan hanya mengerti caranya.

SIMPULAN

Proses rekonsiliasi yang ideal adalah memulai proses rekonsiliasi ketika pihak-pihak yang berkonflik mulai untuk merubah keyakinan, sikap, tujuan, motivasi, dan emosinya terhadap konflik tersebut, dan juga bagaimana hubungan di masa depan antara kedua pihak yang bertikai itu. Rekonsiliasi bertujuan mengembalikan hubungan yang bebas dari kebencian dan konflik yang terjadi pada masa-masa sebelumnya. Agar proses rekonsiliasinya efektif, harus dilakukan secara top down dan bottom up secara bersamaan. Sekarang, masyarakat harus mampu mengkompromikan tujuan bersama yang berguna bagi semua pihak, yang akan membawa pada hubungan baik antara sesama anggota masyarakat.

Suka atau tidak kita harus mengakui bahwa pasca Pilpres 2019 konflik antara kubu paslon 01 dengan 02, yang terjadi secara massif, tidak hanya di antara tim sukses, namun juga pendukungnya, termasuk rakyat. Sebuah konflik yang membutuhkan rekonsiliasi politik untuk menyelesaikannya. Rekonsiliasi harus didasarkan pada kepentingan bangsa dan negara oleh kedua kubu yang bertikai, secara sadar. Oleh karenanya, rekonsiliasi yang harus dilakukan adalah rekonsiliasi politik dengan menumbuhkan semangat kebangsaan dalam konstruksi sosial budaya.

Aspek sosial budaya dibutuhkan karena sekalipun jenis konflik yang terjadi bersifat politis, namun polarisasi yang diakibatkannya menyentuh aspek sosial budaya yang ada di masyarakat. Rekonsiliasi memang diperlukan, namun rekonsiliasi ini hanyalah karena

perbedaan politik, bukan perbedaan semangat kebangsaan. Semangat kebangsaan kita dipengaruhi oleh konstruksi sosial budaya yang kuat, yang telah ada berabad-abad lamanya.

Niat rekonsiliasi politik ini harus diawali oleh kedua pasangan capres dan cawapres. Kehadiran dan persetujuan mereka melakukan rekonsiliasi adalah magnet bagi pengikut-pengikutnya agar mau melakukan rekonsiliasi politik total dan massal, tidak hanya di Jakarta atau kota-kota besar, tetapi seluruh penjuru Nusantara. Rekonsiliasi juga tidak berlaku pada tingkatan elit saja, tetapi juga sampai level akar rumput, serta seluruh masyarakat Indonesia

Bergabungnya Prabowo dan beberapa partai koalisinya ke dalam pemerintahan menunjukkan keberhasilan proses rekonsiliasi ini. Penunjukannya sebagai Menteri Pertahanan pun memberikan angin segar kepada masyarakat, baik kepada pendukung Prabowo sendiri, maupun kepada seluruh masyarakat, bahwa Jokowi tetap memberikan peran signifikan kepada mantan rivalnya tersebut. Keputusan politik ini adalah bentuk rekonsiliasi politik yang berdampak pada rekonsiliasi sosial dan budaya. Terbukti, saat ini polarisasi sosial dan budaya pasca Pilpres tahun lalu sudah tidak terlihat lagi. Oleh karena itu, semangat kebangsaan dan ke-Indonesia-an kita pasca Pilpres ini adalah menumbuhkan sebuah semangat baru dalam konstruksi sosial budaya bangsa yang mampu semakin menyatukan dan membawa bangsa ini ke masa depan penuh harapan.

DAFTAR PUSTAKA

- Aji, P. M., & Indrawan, J. (2019). *Cyberpolitics: Perspektif Baru Memahami Politik Era Siber*. Depok: PT Rajagrafindo Persada.
- Asmal, K, et.al. (1996). *Reconciliation Through Truth: A Reckoning of Apartheid's Criminal Governance*. Cape Town: David Philip.
- Bar-Tal, D. (2009). Reconciliation as a Foundation of Culture of Peace, dalam Joseph de Rivera (ed), *Handbook of Building Cultures of Peace*. New York: Springer.
- Berger, P., & Luckmann, T. (1990). *Tafsir Sosial atas Kenyataan: Risalah tentang Sosiologi Pengetahuan*. Jakarta: LP3ES.
- Hayner, P. B. (1999). *In Pursuit of Justice and Reconciliation: Contribution of Truth Telling*. Washington, DC and Stanford, CA: Woodrow Wilson Center Press and Stanford University Press.
- Hayner, P. B. (2005). *Kebenaran Tak Terbahasakan: Refleksi Pengalaman Komisi-Komisi Kebenaran, Kenyataan, dan Harapan*. Jakarta: Elsam.
- Jamil, A. (2019, Mei 10). *Jaga Persatuan, Pemenang Pilpres 2019 diminta Bentuk Kabinet Rekonsiliasi*. Inews.id. <https://www.inews.id/news/nasional/jk-rekonsiliasi-akan-lebih-mudah-setelah-putusan-mk/566517> (24 Desember 2021).
- Mashad, D. (2004). *Andai Aku Jadi Presiden: Menuju Format Indonesia Baru*. Jakarta: Khalifa.
- Muluk, H. (2009). Memory for Sale: How Groups “Distort” Their Collective Memory for Reconciliation Purposes and Building Peace, dalam Christina J. Montiel & Noraini M. Noor (eds), *Peace Psychology in Asia*. New York: Springer.

Jerry Indrawan, Anwar Ilmar, Ardli Johan Kusuma:

Rekonsiliasi Politik Pasca Pilpres 2019: Menumbuhkan Semangat Kebangsaan dalam Konstruksi Sosial

- Nasikun. (2004). *Sistem Sosial Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press.
- Nawawi, H. (1997). *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Ri'fan, A. (2018, Mei 21). *Meredam Polarisasi Pilpres 2019*. Detik.com. <https://news.detik.com/kolom/d-4030659/meredam-polarisasi-Pilpres-2019> (24 Desember 2021).
- Rizqa, H. (2019, April 21). *Pengamat Sarankan Empat Poin Rekonsiliasi Pasca-Pilpres*. Republika.com. <https://nasional.republika.co.id/berita/nasional/politik/pqb7wj458/pengamat-jelaskan-empat-poin-rekonsiliasi-pascaPilpres> (28 Desember 2021).
- Rohiman, A. (2019, April 27). *Upaya Rekonsiliasi Pasca Pilpres 2019*. Kompasiana.com. <https://www.kompasiana.com/ahmadrohiman/5cc3ae8795760e6429514a02/upaya-rekonsiliasi-pasca-Pilpres-2019> (3 Januari 2022).
- Setiobudi, E. (2019, April 23). *Menuju Rekonsiliasi Nasional Pasca Pilpres 2019*. Geotimes.co.id. <https://geotimes.co.id/opini/menuju-rekonsiliasi-nasional-pasca-Pilpres-2019/> (3 Januari 2022).
- Sukmadinata. (2006). *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Wessells, M. (2009). Community Reconciliation and Post-Conflict Reconstruction for Peace, dalam Joseph de Rivera (ed). *Handbook of Building Cultures of Peace*. New York: Springer.
- Wibowo, A. (2012). *Pendidikan karakter: Strategi Membangun Karakter Bangsa Berperadaban*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.



JPI: JOURNAL OF POLITICAL ISSUES

Universitas Bangka Belitung
Jurusan Ilmu Politik

Desa Balunijuk, Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka,
Kepulauan Bangka Belitung, 33172
Email: jpi@ubb.ac.id | E-ISSN: 2685-776

